



Katalog BPS : 4104001.

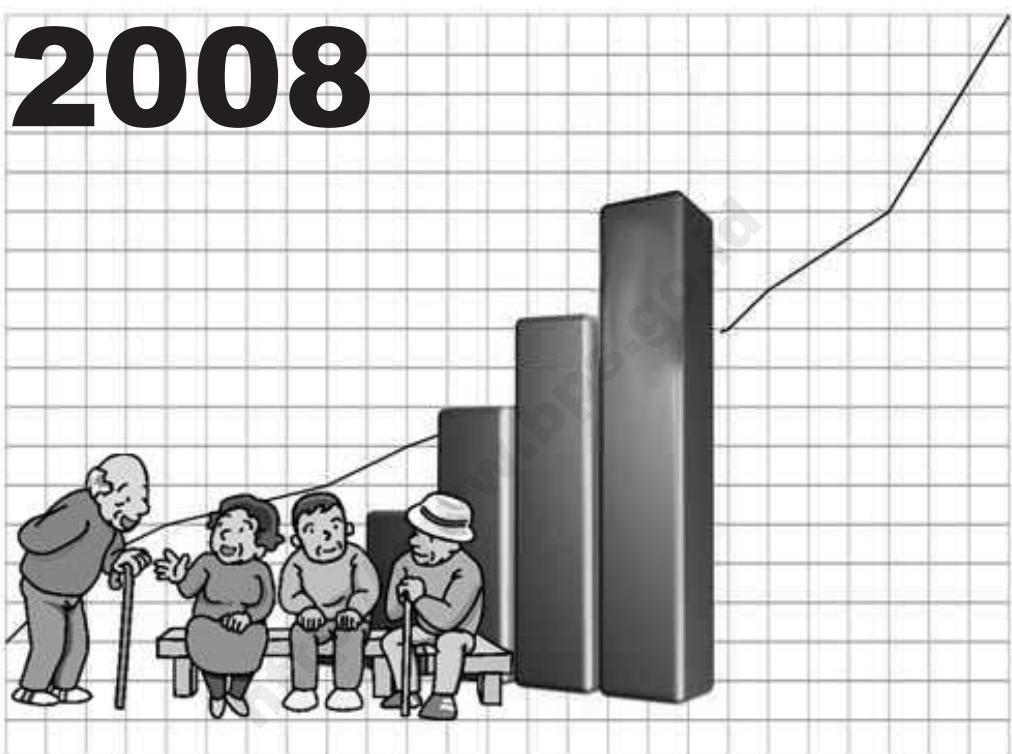
STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2008



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA

2008



STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA

2008

ISBN : 2086-1036

No. Publikasi / Publication Number : 04220.0902

Katalog BPS / BPS Catalogue : 4104001.

Ukuran Buku / Book Size : 28 Cm x 21 Cm

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Subdirectorate of Education and Social Welfare Statistics

Gambar Kulit / Cover Design :

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub Directorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS - Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan derajat kesehatan penduduk lansia yang pada umumnya berbeda dengan penduduk pada kelompok umur yang lebih muda, kebijakan pembangunan seyogianya memberikan perhatian khusus bagi penduduk lansia.

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2008 ini menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kegiatan ekonomi dari lansia. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2008 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2008. Publikasi lansia ini dilengkapi juga dengan laporan hasil studi mendalam lansia di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat sebagai informasi kualitatif yang memperkaya data kuantitatif yang dihasilkan Susenas dan Sakernas 2008.

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Nopember 2009
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Rusman Heriawan

GLOSSARY (Singkatan)

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. BLT: Bantuan Langsung Tunai
3. BPS: Badan Pusat Statistik
4. KF: Keaksaraan Fungsional
5. KMS: Kartu Menuju Sehat
6. KRT: Kepala Rumah Tangga
7. KSK: Koordinator Statistik Kecamatan
8. Lansia: Lanjut usia
9. Listing: Pendaftaran rumah tangga
10. MDGs: *Millenium Development Goals*
11. MSF: *Master Sampling Frame* (Kerangka contoh induk)
12. P4B: Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
13. PJP: Pembangunan Jangka Panjang
14. PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
15. PPS: *Probability Proportional to Size*
16. PT: Perguruan Tinggi
17. Pustu: Puskesmas Pembantu
18. RPJP: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
19. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
20. SBA: Survei Buta Aksara
21. SD: Sekolah Dasar
22. SDM: Sumber Daya Manusia
23. SLS: Satuan Lingkungan Setempat
24. SM: Sekolah Menengah
25. SMP: Sekolah Menengah Pertama
26. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
27. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

28. UU: Undang-undang
29. VSEN2008.K: Kuesioner Kor
30. VSEN2008.L: Daftar Listing
31. VSEN2008.M: Kuesioner Modul Konsumsi

http://www.bps.go.id

Ringkasan Eksekutif

Salah satu dampak dari perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat adalah meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah penduduk lansia sekitar 16,52 juta orang meningkat pada tahun 2006 menjadi sekitar 17,48 juta orang dan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi sekitar 19,50 juta orang. Angka ini adalah sekitar 8,55 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Persentase penduduk lansia yang telah mencapai angka di atas tujuh persen, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk ke kelompok negara berstruktur tua (*ageing population*). Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, khususnya sebagai cerminan dari semakin panjangnya rata-rata usia penduduk Indonesia.

Jika dilihat menurut provinsi, beberapa provinsi yang persentase penduduk lansianya sudah berada di atas rata-rata nasional, adalah D.I. Yogyakarta (14,19 persen), Jawa Timur (11,30 persen), Jawa Tengah (11,12 persen), Bali (10,46 persen), Sulawesi Utara (9,08 persen), Sumatera Barat (8,97 persen), Sulawesi Selatan (8,90 persen), Nusa Tenggara Barat (8,42 persen), Jawa Barat (8,32 persen), Lampung (8,16 persen), Nusa Tenggara Timur (7,84 persen), dan Sumatera Selatan (7,11 persen).

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk tua mengalami kenaikan dari sebesar 12,12 pada tahun 2004 menjadi sebesar 12,37 pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi sebesar 13,72 pada tahun 2008. Angka rasio sebesar 13,72 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia.

Bila dilihat dari segi pendidikan lansia, hasil Susenas 2008 menunjukkan persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi. Lansia yang berpendidikan tamatan SD sebesar 18,01 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi persentasenya yaitu 67,93 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah, yaitu sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,11 persen, SM sebesar 5,79 persen dan Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 2,16 persen.

Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lansia secara umum masih rendah. Salah satu faktor penyebab adalah keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan. Kondisi ini hampir berlaku di semua provinsi. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (57,87 persen), sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,34 persen).

Sejalan dengan tingginya lansia yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah, angka buta huruf penduduk lansia pun relatif cukup tinggi yaitu sebesar 36,47 persen dari total keseluruhan penduduk lansia. Angka buta huruf lansia tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (62,21 persen) dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara (4,46 persen).

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, persentase penduduk lansia buta huruf tertinggi (47,52 persen) berada pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah. Sebaliknya, persentase penduduk lansia buta huruf terendah (17,67 persen) berada pada kelompok 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya persentase penduduk lansia yang buta huruf cenderung mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga lansia tersebut. Semakin tinggi angka buta huruf lansia maka semakin menurun status ekonomi rumah tangga mereka.

Dari sisi kesehatan, secara umum derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan, dan angkanya pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 49,50 persen pada tahun 2004, naik menjadi 51,36 persen pada tahun 2006 dan menjadi sebesar 55,42 persen pada tahun 2008. Tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi. Persentase tertinggi berada di Provinsi Gorontalo (70,69 persen) dan terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah (47,35 persen).

Hasil Studi Lansia 2008 menyatakan bahwa jenis penyakit yang umumnya dikeluhkan lansia adalah penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, sesak nafas/asma, darah rendah, diabetes, kencing batu, dan ambeien. Jenis penyakit ini termasuk ke dalam jenis keluhan kesehatan lainnya dan dialami oleh sekitar 34,24 persen lansia. Jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia berturut-turut adalah batuk dengan persentase sebesar 20,42 persen, pilek 14,78 persen, panas 11,53 persen, dan sakit kepala berulang 11,38 persen. Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Bila dilihat perkembangannya, angka kesakitan penduduk lansia sedikit berfluktuasi. Pada tahun 2004 sebesar 30,20 persen naik pada tahun 2006

menjadi 33,17 persen, namun angkanya menurun pada tahun 2008 menjadi 29,30 persen. Dari seluruh penduduk lansia yang sakit, sebagian besar mengalami sakit tidak lebih dari seminggu, yaitu 34,65 persen menderita sakit selama 1–3 hari dan 34,16 persen selama 4–7 hari. Dilihat dari jenis obat yang digunakan, obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar penduduk lansia (63,86 persen) dalam rangka mengobati sendiri sakitnya, sedangkan mereka yang memakai obat tradisional sekitar 11,24 persen.

Selain mengobati sendiri, cara pengobatan lain yang juga dilakukan oleh penduduk lansia yang sakit adalah dengan berobat jalan. Bila dilihat dari urutannya, fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan adalah praktik tenaga kesehatan menempati urutan pertama dengan proporsi sebesar 32,71 persen, kemudian diikuti oleh puskesmas/pustu sebesar 31,06 persen dan praktik dokter sebesar 30,42 persen.

Berdasarkan data hasil Sakernas 2008, masih banyak penduduk lansia yang tergolong produktif. Dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 46,59 persen diantaranya masih bekerja. Kondisi yang sama terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu masing-masing 36,11 persen dan 52,75 persen. Mayoritas penduduk lansia yang bekerja terutama terlihat pada lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga. Hasil studi lansia menunjukkan bahwa alasan mereka bekerja antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan.

Penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada tahun 2008, TPAK penduduk lansia relatif cukup besar yaitu sebesar 47,07 persen. TPAK penduduk lansia tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (58,11 persen) dan terendah terdapat di Kepulauan Riau (29,91 persen).

Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 65,47 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa (25,21 persen) dan sektor industri (9,32 persen). Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SMA ke atas hanya sekitar 2,63 persen yang bekerja di sektor pertanian.

Bila dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 43,18 persen, sedangkan lansia yang berusaha sendiri sebesar 23,32 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,29 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas pertanian (7,21 persen), buruh/karyawan (5,87 persen), berusaha dibantu buruh tetap (3,92 persen) dan pekerja bebas non pertanian (2,21 persen).

Produktifitas tinggi yang dialami pekerja lansia tercermin pula dari jumlah jam kerja yang dilakukan yaitu 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Persentase penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh tersebut sebesar 48,70 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 36,36 persen dan sisanya adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu yaitu sebesar 14,94 persen.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
GLOSSARY (SINGKATAN)	lii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.1.1 Ruang Lingkup	8
2.1.2 Kerangka Sampel	8
2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel	10
2.1.4 Metode Pengumpulan Data	10
2.1.5 Petugas Lapangan	10
2.2 Konsep dan Definisi	11
2.2.1 Tipe Daerah	11
2.2.2 Blok Sensus	13
2.2.3 Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	14
2.3 Keterbatasan Data	18
2.4 Metode Analisis	18

Halaman

BAB III	STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA	21
3.1	Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia	23
3.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Tua	25
3.3	Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	26
3.4	Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	29
BAB IV	PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA	35
4.1	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	37
4.2	Kemampuan Membaca dan Menulis	40
BAB V	KESEHATAN PENDUDUK LANSIA	47
5.1	Keluhan Kesehatan	50
5.2	Angka Kesakitan	53
5.3	Lama Sakit	55
5.4	Cara Berobat	56
BAB VI	KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA	65
6.1	Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Lansia	67
6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia	70
6.3	Lapangan Usaha	72
6.4	Status Pekerjaan	75
6.5	Jumlah Jam Kerja	77
BAB VII	HASIL STUDI LANSIA	83
7.1	Metodologi	84
7.1.1	Cakupan Wilayah Pencacahan	84
7.1.2	Cara Pemilihan Responden	84
7.1.3	Metode Pengumpulan Data	85

Halaman

7.2 Hasil Studi Lansia	85
TABEL LAMPIRAN	93-133
DAFTAR PUSTAKA	135

PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Suwoko (2004) menyebutkan bahwa abad 21 bagi bangsa Indonesia merupakan abad lansia (*era of population ageing*), karena pertumbuhan penduduk lansia di Indonesia diperkirakan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Suwoko, Indonesia diperkirakan akan mengalami *aged population boom* pada dua dekade permulaan abad 21. Badan Perencanaan dan Pembangunan

Nasional memperkirakan pada tahun 2025, lebih dari seperlima penduduk Indonesia adalah orang lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya angka mortalitas dan meningkatnya umur harapan hidup masyarakat Indonesia. Jumlah populasi yang besar tersebut diharapkan tidak menjadi beban pembangunan tetapi merupakan aset pembangunan.

Walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian. Saat ini dirasakan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

Titik berat upaya membantu lansia mulai bergeser dari pendekatan kesejahteraan ke pendekatan pemberdayaan, dimana lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Di sisi lain, pemerintah juga masih melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang antara lain meliputi : 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, diantaranya adalah pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia. 2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik. 3) Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya,

kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. 4) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan administrasi pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup), pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.

Arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, baik pada level nasional maupun provinsi, akan sangat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan dan pemberdayaan penduduk lansia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan situasi penduduk lansia Indonesia yang dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu disajikan pula gambaran mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk lansia berdasarkan hasil studi lapangan.

Gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini dapat berguna terutama bagi para peneliti, perencana dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2008 ini disajikan dalam tujuh bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; keterbatasan data; serta konsep dan definisi.

Lima bagian berikutnya menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) adalah mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan serta jam kerja penduduk lansia yang bekerja. Pada bagian terakhir publikasi ini (Bab VII) disajikan laporan hasil studi lapangan di beberapa daerah.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

METODOLOGI

http://www.bptguo.id



Metodologi

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2008, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk dari sisi demografi, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2008, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan lansia.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. BPS melaksanakan Susenas setiap tahun sejak tahun 1963. Mulai tahun 1992 Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan khusus). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan setiap 3 tahun sekali. Data modul mencakup

modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya, serta modul perumahan dan kesehatan. Sesuai dengan gilirannya modul Susenas tahun 2008 adalah Modul konsumsi. Data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Susenas 2008, maka berikut ini uraian mengenai metodologi Susenas Juli 2009.

2.1.1 Ruang Lingkup

Sampel Susenas tahun 2008 mencakup 285.904 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Seluruh sampel dicacah dengan menggunakan kuesioner kor (VSEN2008.K) dan kuesioner modul (VSEN2008.M). Estimasi data kor dan modul Susenas tahun 2008 dapat dilakukan hingga level kabupaten/kota tetapi tidak dapat disajikan menurut daerah perkotaan atau perdesaan. Susenas tahun 2008 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas tahun 2008 terdiri dari : 1) kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus. 2) kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga atau blok sensus yang telah dibuat sub-blok sensusnya pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan 3) kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus adalah daftar blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 (Frame Blok Sensus SE06) yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Kerangka sampel blok sensus mencakup blok sensus di 457 kabupaten/kota dan dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan

adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota. Kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus adalah daftar sub-blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga. Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga yang terdapat dalam daftar pendaftaran rumah tangga (VSEN2008.L Blok IV, hasil pendaftaran rumah tangga di lapangan).

2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel

Kor Susenas 2008

Sampel **kor** Susenas tahun 2008 dirancang untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2008 adalah rancangan sampel bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Prosedur penarikan sampel Susenas tahun 2008 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1 **Tahap pertama**, dari *master sampling frame (MSF)* blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE2006) dipilih n_h blok sensus ($h = 1$, untuk perkotaan; $h = 2$, untuk perdesaan) secara *Probability Proportional to Size (PPS)* dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Pendaftaran rumah tangga/*listing* dilakukan pada setiap blok sensus terpilih.

Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan satu sub blok sensus secara *PPS – sistematik* dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B.

- 2 **Tahap kedua**, memilih sebanyak $\bar{m} = 16$ rumah tangga dari hasil listing pada setiap blok sensus terpilih secara sistematik.

Modul Konsumsi

Sampel modul merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsample) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena disamping dicacah dengan kuesioner modul, juga dicacah dengan kuesioner kor. Dengan kata lain, blok sensus yang akan digunakan untuk estimasi di tingkat provinsi (blok sensus kor-modul) dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota (blok sensus kor). Blok sensus yang tidak terpilih kor-modul 2008 disebut blok sensus kor.

2.1.4 Metode Pengumpulan Data

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancara responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, terlebih dahulu para petugas pengumpul data dilatih tentang tata cara pengisian kuesioner dan konsep/definisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh faktor *non-sampling error*.

2.1.5 Petugas Lapangan

Dalam survei BPS berskala besar seperti Susenas, staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilibatkan sebagai

koordinator tim (kortim), sedangkan yang menjadi pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Kualifikasi pendidikan mitra statistik adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

2.2 Konsep dan Definisi

2.2.1 Tipe Daerah

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau perdesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas umum. Penentuan skor suatu desa/kelurahan adalah seperti pada Tabel A. Kolom (1) menunjukkan variabel/klasifikasi yang digunakan, dan Kolom (2) menunjukkan nilai skor untuk setiap variabel.

Tabel A. Variabel, Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000

Variabel/Klasifikasi (1)	Skor (2)	Variabel/Klasifikasi (1)	Skor (2)
Total Skor		B) Sekolah Menengah Pertama	
● Skor Minimum	2	● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1
● Skor Maksimum	26	● $> 2,5$ Km	0
1. Kepadatan Penduduk/Km ²		C) Sekolah Menengah Umum	
< 500	1	● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1
500 - 1 249	2	● $> 2,5$ Km	0
1 250 - 2 499	3	D) Pasar	
2 500 - 3 999	4	● Ada atau ≤ 2 Km	1
4 000 - 5 999	5	● > 2 Km	0
6 000 - 7 499	6	E) Bioskop	
7 500 - 8 499	7	● Ada atau ≤ 5 Km	1
8 500 +	8	● > 5 Km	0

2. Persentase Rumah Tangga Pertanian		
70,00 +	1	
50,00 – 69,99	2	
30,00 – 49,99	3	
20,00 – 29,99	4	
15,00 – 19,99	5	
10,00 – 14,99	6	
5,00 – 9,99	7	
< 5,00	8	
3. Akses Fasilitas Umum	0,1,2,.....10	
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)		
● Ada atau ≤ 2,5 Km	1	
● > 2,5 Km	0	
F) Pertokoan		
● Ada atau ≤ 2 Km	1	
● > 2 Km	0	
G) Rumah Sakit		
● Ada atau ≤ 5 Km	1	
● > 5 Km	0	
H) Hotel/Bilyard/Dis-kotek/Panti pijat/Salon		
● Ada	1	
● Tidak ada	0	
I) Persentase Rumah Tangga Telepon		
● ≥ 8,00	1	
● < 8,00	0	
J) Persentase Rumah Tangga Listrik		
● ≥ 90,00	1	
● < 90,00	0	

Cara perhitungan skor adalah sebagai berikut.

- Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², dua bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 – 1 249 orang per km² dan seterusnya sampai dengan 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8 500 orang per km².
- Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1 – 8, satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50 – 69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, bila desa mempunyai 5 persen atau kurang.
- Variabel akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan.
- Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan

pertimbangan mudahnya akses kepada perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.

- e. Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa perdesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.

Dalam pelaksanaannya penentuan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk 2000.

2.2.2 Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel, blok sensus terpilih Susenas 2008 sudah ditentukan oleh BPS pusat segera setelah rancangan sampel selesai. Setiap blok sensus harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Seluruh blok sensus dalam setiap desa/kelurahan membagi habis wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

Blok sensus biasa (B) adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

Blok sensus khusus (K) adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali lembaga pemasyarakatan yang

muatannya tidak dibatasi. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus, antara lain:

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

Blok sensus persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

Blok sensus khusus dan blok sensus persiapan bukan merupakan bagian dari kerangka sampel Susenas

2.2.3 Rumah tangga dan Anggota Rumah Tangga

Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri-suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang dicapai oleh sekelompok penduduk, mulai lahir sampai meninggal.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang.

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Dapat Membaca dan Menulis adalah dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Buta Huruf adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

Kondisi kesehatan adalah keadaan kesehatan responden saat ini termasuk keadaan fisik ataupun mental.

Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). Termasuk pula yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan seperti cuti, nunggu panen, mogok dan sebagainya.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebas tugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \text{ persen}$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur terbatas 60 tahun ke atas.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara banyaknya orang

yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja terhadap angkatan kerja.

2.3 Keterbatasan Data

Disadari ada keterbatasan data yang digunakan dalam penyajian publikasi ini. Penjelasan berikut diharapkan dapat lebih memperjelas dan mempermudah bagi pengguna dan pembaca publikasi ini dalam menafsirkan data yang disajikan.

- a. Data Susenas 2008 mencakup 457 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.
- b. Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Lansia yang tinggal di panti jompo tidak dicakup.

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan sosial ekonomi lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

STRUKTUR
DEMOGRAFIS
PENDUDUK LANSIA



Struktur Demografis Penduduk Lansia

Sesuai komitmen pembangunan yang searah dengan tujuan dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), maka upaya menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat vital. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional atau disebut sebagai *human capital*. Sebagai modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada penduduknya terlebih lagi jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan berkualitas yang akan menjadi sumber potensi yang kuat dalam pembangunan. Dengan berbagai latar belakang yang ada, penduduk Indonesia sebenarnya bisa menjadi kekuatan dahsyat untuk membangun masyarakat sejahtera melalui pembangunan yang

didasarkan pada tujuan dan sasaran MDGs secara terpadu. Indonesia mempunyai potensi penduduk yang termasuk empat besar di dunia setelah Republik Rakyat China, India dan Amerika Serikat. Namun, potensi jumlah penduduk yang besar tersebut tidak akan menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Sejalan dengan itu, diperlukan data kependudukan yang dapat mendukung setiap kegiatan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan perencanaan input dan output pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan.

Data dasar mengenai kependudukan yang banyak digunakan terutama adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pada kegiatan perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografis. Sebagai contoh adalah data komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia 0–4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan; penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7–12, 13–15 dan 16–18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun ke atas atau penduduk lanjut usia (lansia). Sejalan

dengan itu, maka perumusan dan arah kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Untuk itu dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Uraian berikut ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia menurut beberapa karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan struktur dalam rumah tangga serta perkembangannya.

3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia

Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (www.haryono.com). Berdasarkan hasil penelitian United Nations ESCAP mengenai *Ageing in Asia*, diperoleh fakta bahwa sebagian besar negara-negara di Asia Pasifik mengalami perubahan menjadi negara berstruktur tua (*ageing population*) secara lebih cepat. Tahun 2002, sekitar 52 persen dari populasi penduduk lansia di dunia berada di Asia Pasifik dan diperkirakan meningkat menjadi 59 % pada tahun 2025 (ESCAP 2003:1).

Merujuk pada batasan di atas, maka negara Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk lansia yang telah mencapai 8,55 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.a. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan sosial masyarakat yang telah meningkatkan usia harapan hidup.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, persentase penduduk lansia masih sangat kecil dibandingkan dengan penduduk usia dibawah 15 tahun sebesar (29,13 persen), penduduk muda (15-35 tahun) sebesar 34,52 persen maupun penduduk dewasa (36-59 tahun) sebesar 27,80 persen. Meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan kelompok umur lainnya, namun secara agregat jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh

karena itu keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tabel 3.a
Persentase Penduduk Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Tahun 2008

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)				Total
	< 15	15-35	36-59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki	28,59	36,09	28,18	7,13	100,00
Perempuan	26,68	37,10	28,10	8,11	100,00
L+P	27,63	36,60	28,14	7,63	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki	31,45	32,23	27,46	8,86	100,00
Perempuan	29,60	32,93	27,49	9,98	100,00
L+P	30,53	32,58	27,47	9,42	100,00
K + D					
Laki-laki	30,08	34,08	27,81	8,03	100,00
Perempuan	28,18	34,96	27,79	9,07	100,00
L+P	29,13	34,52	27,80	8,55	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2008

Peran lansia yang aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih sangat diperlukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aron Buchman, neurologis dari Rush University Medical Center, Chicago AS, diperoleh fakta bahwa makin sedikit kegiatan sosial yang dilakukan seorang lansia, makin cepat pula fungsi motorik mereka menurun (www.Kompas.com). Sesuai dengan tema peringatan Hari Lansia Nasional tanggal 29 Mei 2009 "Sehat, Produktif dan Sejahtera Syarat Pembangunan Sosial yang Berkelanjutan", maka lansia dengan profesionalisme yang spesifik masih diperlukan untuk mengisi pembangunan dalam skala lokal maupun nasional, bahkan dalam skala internasional. UU No 138/1998, tentang Kesejahteraan Lansia, mengamanatkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Jika dilihat menurut provinsi, beberapa provinsi yang persentase penduduk lansianya sudah berada di atas rata-rata nasional adalah D.I. Yogyakarta (14,19 persen), Jawa Timur (11,30 persen), Jawa Tengah (11,12 persen), Bali (10,46 persen), Sulawesi Utara (9,08 persen), Sumatera Barat (8,97 persen), Sulawesi Selatan (8,90 persen), Nusa Tenggara Barat (8,42 persen), Jawa Barat (8,32 persen), Lampung (8,16 persen), Nusa Tenggara Timur (7,84 persen), dan Sumatera Selatan (7,11 persen), seperti yang terlihat pada Tabel Lampiran 3.1.3.

3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Salah satunya adalah angka beban ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan penduduk tua (*old dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk tua. Penurunan angka kelahiran, semakin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, dan jumlah penduduk yang berusia tua yang relatif besar menyebabkan angka ketergantungan penduduk tua meningkat.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk tua dalam kurun waktu 2004, 2006 dan 2008 mengalami kenaikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.b. Angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 12,12 pada tahun 2004 menjadi sebesar 12,37 pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi sebesar 13,72 pada tahun 2008. Angka rasio sebesar 13,72 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia. Angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia.

Tabel 3.b
Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua Menurut Tipe Daerah
Tahun 2004, 2006, dan 2008

Tipe Daerah	Rasio Ketergantungan		
	2004	2006	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,31	10,52	11,78
Perdesaan	13,61	13,89	15,68
Perkotaan +Perdesaan	12,12	12,37	13,72

Sumber: BPS - Susenas 2004, 2006, dan 2008

Jika dilihat menurut tipe daerah, baik daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan penduduk tua di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada tahun 2008, angka rasio ketergantungan penduduk tua di daerah perdesaan tercatat sebesar 15,68, sedangkan daerah perkotaan sebesar 11,78.

3.3 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Pada Tabel 3.c ditampilkan perkiraan jumlah dan proporsi penduduk lansia pada tahun 2004, 2006 dan 2008. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 jumlah penduduk lansia Indonesia telah mencapai 19,50 juta atau sekitar 8,55 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 jumlah penduduk lansia sekitar 16,52 juta orang naik menjadi sekitar 17,48 juta orang pada tahun 2006 dan naik lagi menjadi sekitar 19,50 juta orang pada tahun 2008. Peningkatan penduduk lansia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan terutama meningkatnya angka harapan hidup.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia, terjadi juga peningkatan proporsi penduduk lansia terhadap jumlah penduduk keseluruhan selama kurun waktu 2004-2008. Proporsi penduduk lansia pada tahun 2004 sebesar 8,24 persen naik menjadi 8,55 persen pada tahun 2008.

**Tabel 3.c
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2004, 2006, dan 2008**

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Proporsi (Perkiraan Jumlah)		
	2004	2006	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	7,23 (6 328 909)	7,48 (6 707 019)	7,63 (8 400 954)
Perdesaan	9,02 (10 193 402)	9,44 (10 771 263)	9,42 (11 101 401)
Perkotaan + Perdesaan	8,24 (16 522 311)	8,58 (17 478 282)	8,55 (19 502 355)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,75 (7 835 089)	8,10 (8 319 990)	8,03 (9 130 589)
Perempuan	8,73 (8 687 222)	9,05 (9 158 292)	9,07 (10 371 766)
Laki-laki + Perempuan	8,24 (16 522 311)	8,58 (17 478 282)	8,55 (19 502 355)

Sumber: BPS - Susenas 2004, 2006, dan 2008

Jika dilihat menurut tipe daerah dan jenis kelamin jumlah penduduk lansia pada tahun 2008 yang tinggal di daerah perkotaan sebanyak 8,40 juta orang atau proporsinya sebesar 7,63 persen dari keseluruhan penduduk perkotaan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan terlihat lebih besar jumlahnya yaitu 11,10 juta orang atau 9,42 persen dari keseluruhan penduduk perdesaan. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah lansia perempuan adalah 10,37 juta orang (9,07 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 9,13 juta orang (8,03 persen dari seluruh penduduk laki-laki). Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki disebabkan karena usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Bila dilihat antar provinsi di Indonesia, proporsi penduduk lansia sangat bervariasi seperti yang terlihat pada Tabel Lampiran 3.1.3. Pada tabel tersebut terlihat bahwa proporsi penduduk lansia berkisar antara 1,94 persen sampai dengan 14,19 persen. Provinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya berturut-turut adalah Provinsi DI Yogyakarta (14,19 persen), Jawa Timur (11,30 persen) dan Jawa Tengah (11,12 persen). Sementara provinsi yang proporsi penduduk lansianya paling rendah adalah Provinsi Papua (1,98 persen), Irian Jaya Barat (2,65 persen) dan Kalimantan Timur (4,40 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 3.d
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan
Status Perkawinan Tahun 2008**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki	0,78	84,33	1,28	13,61	100,00
Perempuan	1,32	36,63	3,76	58,30	100,00
L+P	1,07	58,77	2,60	37,56	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki	0,51	84,97	1,19	13,32	100,00
Perempuan	1,01	39,68	3,72	55,59	100,00
L+P	0,78	61,03	2,53	35,67	100,00
K + D					
Laki-laki	0,63	84,70	1,23	13,44	100,00
Perempuan	1,14	38,36	3,74	56,76	100,00
L+P	0,90	60,05	2,56	36,48	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2008

Struktur perkawinan penduduk lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan penduduk lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.3, kecuali untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Irian Jaya Barat. Kelima provinsi tersebut mempunyai pola

persentase penduduk lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan penduduk lansia perempuan. Usia harapan hidup perempuan yang umumnya lebih tinggi daripada laki-laki, diduga menjadi penyebab jumlah lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.d, penduduk lansia laki-laki lebih banyak yang berstatus kawin (84,70 persen) dibandingkan yang berstatus cerai mati (13,44 persen). Sebaliknya, penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati (56,76 persen) daripada yang berstatus kawin (38,36 persen). Pola status perkawinan yang berbeda antara penduduk lansia menurut gender ini juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

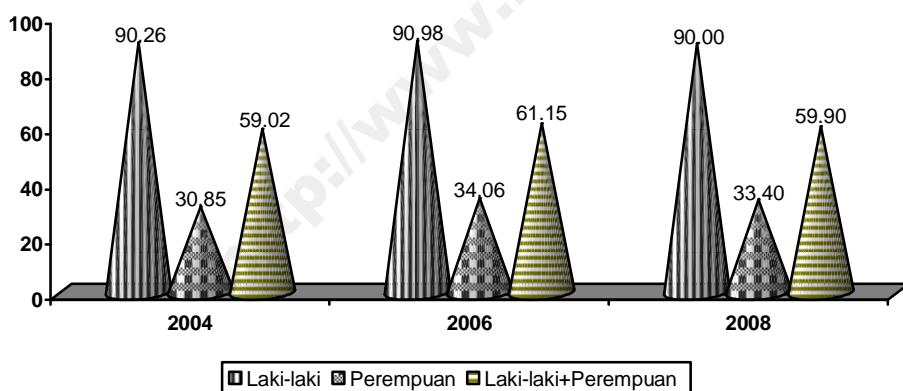
Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penduduk lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi. Kondisi ini mengakibatkan persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sangat kecil, sebaliknya proporsi mereka yang berstatus kawin cenderung tinggi.

3.4. Peranan Penduduk Lansia di dalam Rumah Tangga

Satu rumah tangga dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting perannya dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mampu mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan aktif sebagai pengambil keputusan.

Meskipun tanggung jawab seorang kepala rumah tangga sangat besar baik dilihat dari segi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak peran tersebut dipegang oleh penduduk lansia yang sudah selayaknya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Hasil studi lansia tahun 2009 menyatakan bahwa tingginya lansia sebagai kepala rumah tangga karena: 1) lansia masih menjadi tulang punggung keluarga dan 2) rumah yang ditempati milik lansia (lihat hasil temuan lapangan pada Bab 7). Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sebagian besar (59,90 persen) penduduk lansia masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga atau berstatus sebagai kepala rumah tangga. Gambaran tingginya penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga sudah terjadi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2004 sebesar 59,02 persen dan tahun 2006 sebesar 61,15 persen.

**Gambar 3.1
Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004, 2006, dan 2008**



Sumber: BPS - Susenas 2004, 2006, dan 2008

Besarnya persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga perlu mendapat perhatian serius karena mereka dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya. Hal ini didukung pula oleh tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu). Di sisi lain, seharusnya lansia sudah hidup sejahtera tanpa beban di masa tuanya. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang

kesejahteraan lansia perlu disosialisasikan terutama kepada penduduk usia produktif.

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 90,00 persen, sedangkan penduduk lansia perempuan hanya sebesar 33,40 persen.

Tabel 3.e
Persentase Penduduk 10 – 59 Tahun dan Penduduk 60 Tahun Ke Atas
Menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin, dan
Tipe Daerah Tahun 2008

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk 10 – 59 Tahun		Penduduk 60 Tahun Ke Atas	
	KRT ¹⁾ (1)	ART ²⁾ (2)	KRT ¹⁾ (4)	ART ²⁾ (5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki	50,27	49,73	90,65	9,35
Perempuan	6,04	93,96	34,68	65,32
L+P	27,92	72,08	60,65	39,35
Perdesaan (D)				
Laki-laki	51,91	48,09	89,52	10,48
Perempuan	5,25	94,75	32,41	67,59
L+P	28,64	71,36	59,33	40,67
K + D				
Laki-laki	51,10	48,90	90,00	10,00
Perempuan	5,65	94,35	33,40	66,60
L+P	28,28	71,72	59,90	40,10

Sumber: BPS - Susenas 2008

Catatan: 1) Kepala Rumah Tangga 2) Anggota Rumah Tangga

Pada Tabel 3.e ditampilkan peran keanggotaan dalam rumah tangga penduduk berumur 10-59 tahun dan penduduk lansia. Seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa sebagian besar lansia berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Pola tersebut berbeda dengan pola umum penduduk berumur 10-59 tahun ke atas. Sebagian besar (71,72 persen) penduduk berumur 10-59 tahun ke atas berkedudukan sebagai anggota rumah tangga. Keadaan ini berlaku di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk perkotaan berumur

10-59 tahun ke atas yang berkedudukan sebagai anggota rumah tangga sebesar 72,08 persen dan di perdesaan sebesar 71,36 persen.

Sementara itu, bila dilihat menurut jenis kelamin, berlaku pola yang sama antara penduduk berumur 10-59 tahun ke atas dan penduduk lansia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Laki-laki lebih banyak yang menjadi kepala rumah tangga dibandingkan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan budaya masyarakat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA



Pendidikan Penduduk Lansia

Tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan SDM di Indonesia dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan merupakan tulang punggung pengembangan SDM yang dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Suatu negara dikatakan makin maju apabila SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan (RPJP 2005-2025).

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian yang strategis dari keseluruhan program PJP II, dengan titik berat bidang ekonomi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Penduduk yang berusia tuapun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2)d tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) yang dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan ketrampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus

dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan suatu penduduk mencerminkan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang ditamatkan. Namun, pendidikan akan semakin meningkat sejalan dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua di jamannya seperti pada masa kemerdekaan.

Bila dilihat pada pendidikan lansia, hasil Susenas 2008 menunjukkan persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi. Mereka yang berpendidikan tamatan SD sebesar 18,01 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi persentasenya yaitu 67,93 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Tabel 4.a menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,11 persen, SM sebesar 5,79 persen dan Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 2,16 persen. Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia secara umum masih rendah.

Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan lansia yang masih sangat rendah. Hal ini juga sesuai dengan hasil studi lansia yang menerangkan bahwa mereka berada di usia sekolah pada masa penjajahan/kemerdekaan, sehingga tidak ada biaya untuk sekolah karena perekonomian masih sulit, fasilitas sekolah masih jarang dan jauh dari tempat tinggal.

**Tabel 4.a
Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2004, 2006, dan 2008**

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2004			2006			2008		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	25,98	53,46	40,43	22,96	46,94	35,53	19,68	46,57	33,98
Tdk tamat SD	33,99	26,96	30,29	32,26	29,41	30,77	37,40	30,91	33,95
SD	24,71	13,52	18,82	26,93	16,14	21,27	22,84	13,76	18,01
SMP	6,67	3,14	4,81	6,72	3,50	5,03	8,18	4,30	6,11
SM	6,63	2,51	4,46	8,01	3,24	5,51	8,41	3,48	5,79
PT	2,02	0,41	1,18	3,12	0,76	1,89	3,50	0,98	2,16
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004, 2006, dan 2008

Tabel 4.a juga menggambarkan bahwa budaya patriarkhi masih kental di dunia pendidikan dalam keluarga di era tahun 45-an, dimana orang tua mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kesenjangan terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 19,68 persen, sedangkan untuk penduduk lansia perempuan melebihi dua kali lipatnya yaitu sebesar 46,57 persen. Sebaliknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan

penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Sebuah fenomena yang menarik dari indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu. Ini merupakan gambaran/pola pendidikan di masa Indonesia baru merdeka di tahun '45-an.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2004 dan 2006, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan baik pada jenjang pendidikan yang rendah maupun tinggi angkanya masih relatif tinggi dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan.

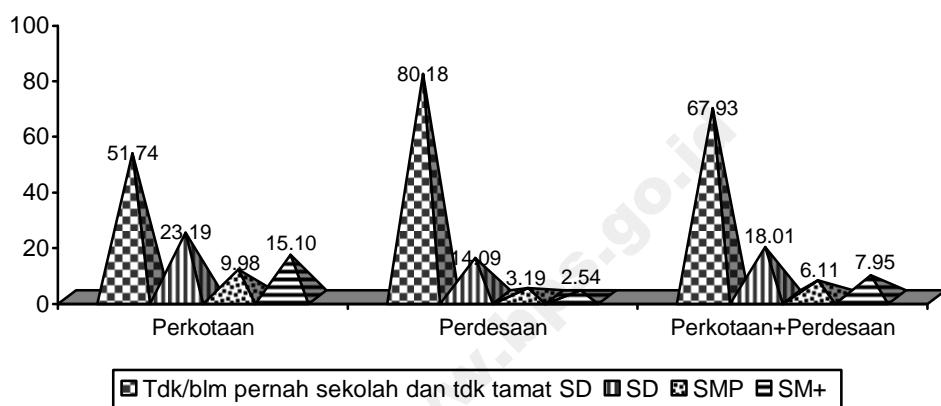
Tingkat pendidikan lansia yang secara umum masih relatif rendah, hampir terdapat di semua provinsi. Pada Tabel Lampiran 4.1.3. dapat dilihat bahwa sekitar 34 persen diantaranya tidak/belum pernah sekolah dan lebih dari 33 persen pernah sekolah tetapi tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (57,87 persen), Kalimantan Barat (46,96 persen) dan Bali (45,80 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,34 persen), Gorontalo (10,24 persen) dan Maluku (10,80 persen).

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia bila ditinjau berdasarkan tipe daerah memiliki pola yang sama dengan pola nasional, yaitu masih tingginya persentase penduduk lansia yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD tersebut terus menurun seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan, seperti yang disajikan pada Tabel 4.a.

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD ke atas cenderung lebih tinggi (48,27 persen) dan di daerah perdesaan (19,82 persen). Sebaliknya, penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan (80,18 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (51,74 persen). Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana

pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi akar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

**Gambar 4.1
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2008**



Sumber: BPS - Susenas 2008

4.2 Kemampuan membaca dan menulis

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) yang diajarkan pertama kali pada siswa adalah kemampuan dasar membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana. Dengan menguasai baca tulis huruf latin dan berhitung sederhana, diharapkan setiap orang dapat mempelajari ketrampilan dan keahlian lainnya.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut buta huruf merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta huruf menunjukkan proporsi penduduk buta huruf terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Program Keaksaraan

Fungsional (KF) bertujuan untuk pemberantasan buta huruf. Prioritas program KF adalah penduduk buta huruf usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataan hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan kemajuan untuk membaca dan menulis lansia masih cukup besar (Laporan Ringkas SBA 2006).

Pada Tabel 4.b. disajikan persentase buta huruf penduduk 15 tahun ke atas dan penduduk lansia pada tahun 2008. Tingkat buta huruf penduduk 15 tahun ke atas sebesar 7,81 persen, sebagian besar merupakan penduduk usia 45 tahun ke atas termasuk di dalamnya penduduk lansia. Sementara itu, angka buta huruf penduduk lansia relatif cukup tinggi yang mencapai dua digit yaitu sebesar 36,47 persen dari total keseluruhan penduduk lansia.

**Tabel 4.b
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Persentase Buta Huruf	
	Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Penduduk Lansia
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Laki-laki	2,34	14,18
Perempuan	6,69	38,76
Laki-laki+Perempuan	4,56	27,35
Perdesaan		
Laki-laki	6,81	27,25
Perempuan	15,04	57,75
Laki-laki+Perempuan	10,97	43,38
Perkotaan+Perdesaan		
Laki-laki	4,62	21,67
Perempuan	10,90	49,50
Laki-laki+Perempuan	7,81	36,47

Sumber: BPS - Susenas 2008

Angka buta huruf lansia yang cukup tinggi ini sejalan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga

pembangunan infra struktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan pembangunan masa kini yang mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik sehingga angka buta huruf penduduk 15 tahun ke atas jauh lebih kecil.

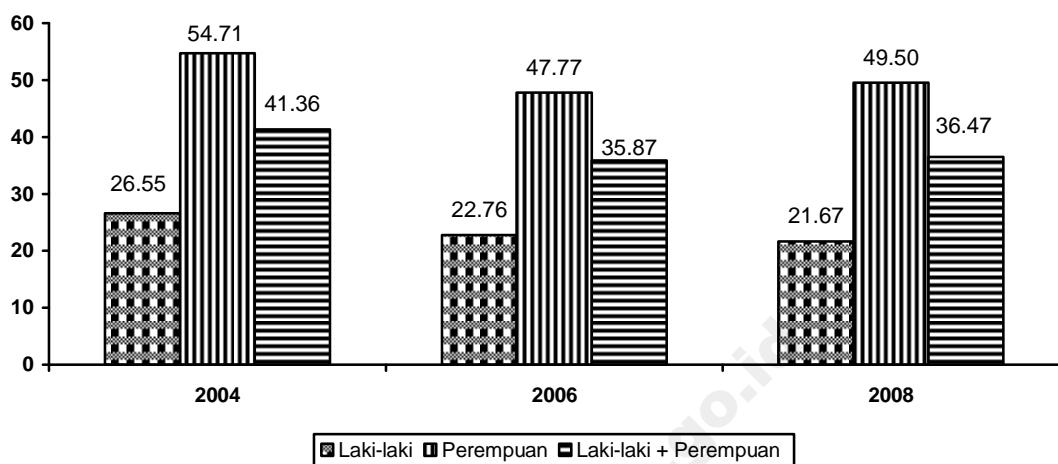
Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu cenderung lebih banyak dirasakan oleh penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini tercermin dari angka buta huruf penduduk lansia di daerah perdesaan yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Angka buta huruf penduduk lansia di daerah perdesaan mencapai sebesar 43,38, sedangkan di daerah perkotaan 27,35 persen. Pola tersebut berlaku pula untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang angkanya banyak dipengaruhi oleh penduduk lansia. Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang buta huruf mencapai 10,97 persen, sebaliknya di daerah perkotaan hanya 4,56 persen.

Gambar 4.2. menyajikan angka buta huruf penduduk lansia menurut gender pada tahun 2004, 2006 dan 2008. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan angka buta huruf lansia dari 41,36 persen pada tahun 2004 menjadi 36,47 persen pada tahun 2008. Penurunan angka buta huruf lansia tersebut menunjukkan adanya kemajuan/peningkatan kualitas penduduk lansia dalam hal kemampuan membaca dan menulis, meskipun angkanya relatif masih cukup tinggi.

Bila dilihat menurut gender, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah karena adanya sistem budaya patriarkhi masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih mengutamakan kaum laki-laki (lihat antara lain Iriantono et al, 2002). Pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa persentase penduduk lansia perempuan yang buta huruf dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki (49,50 persen berbanding 21,67 persen) pada tahun 2008. Hal yang sama terjadi pada tahun 2004 untuk lansia yang buta huruf (lansia perempuan 54,71 persen dan lansia laki-laki 26,55

persen) dan tahun 2006 untuk lansia yang buta huruf (lansia perempuan 47,77 persen dan lansia laki-laki 22,76 persen).

Gambar 4.2
Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2004, 2006, dan 2008



Sumber: BPS - Susenas 2004, 2006 dan 2008

Tabel Lampiran 4.2.9 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta huruf antar provinsi sangat bervariasi antara 4,46 – 62,21 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (62,21 persen), Jawa Timur (48,64 persen), dan Bali (48,43 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang buta huruf terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara (4,46 persen), DKI Jakarta (8,99 persen) dan Maluku (13,05 persen).

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

KESEHATAN PENDUDUK LANSIA

<http://www.bimbinganid.com>



Kesehatan Penduduk Lansia

Kualitas hidup yang lebih baik akan diperoleh apabila seseorang memiliki kesehatan yang prima. Gambaran nyata dapat dilihat bahwa seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatan sedang terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Berkaitan dengan hal di atas, berbagai program pemerintah senantiasa memperhatikan dan memberikan prioritas pada bidang kesehatan. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Peningkatan derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu

cerminan dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal itu menjadi penting sebab SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan tidak hanya mencakup penduduk balita dan dewasa saja melainkan juga mencakup penduduk lansia. Aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka telah berkurang dalam menghadapi pengaruh dari luar. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa semakin bertambah umur maka semakin menurun kekuatan dan daya tahan tubuh seseorang. Penurunan daya tahan tubuh hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Keadaan ini terutama dirasakan oleh orang yang berusia lanjut. Mereka menjadi rentan terhadap berbagai penyakit sehingga diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak agar para lansia memiliki kesehatan yang prima dalam rangka melanjutkan aktifitas kehidupannya.

Sejalan dengan itu, upaya yang dapat dilakukan agar lansia selalu memiliki kesehatan yang prima adalah dengan: (i) meningkatkan kesadaran para lansia untuk membina sendiri kesehatannya; (ii) meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan lansia; (iii) meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan kesehatan lansia; (iv) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia (Siti Partini Suardiman, 2007).

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan:

- penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia;
- upaya

penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil studi lansia ditemukan bahwa di beberapa daerah telah tersedia pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah khusus untuk lansia yaitu posyandu lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama lansia. Selain itu terdapat pula puskesmas lansia di Provinsi Riau yang merupakan satu-satunya puskesmas di Indonesia yang mengutamakan pada program lansia (lihat Bab 7).

Salah satu faktor yang dapat dianjurkan untuk penduduk lansia agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan sedikit masalah kesehatan adalah harus dapat menjaga pola hidup sehat. Namun, kondisi kesehatan penduduk lansia sekarang ini tidak saja hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, namun juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

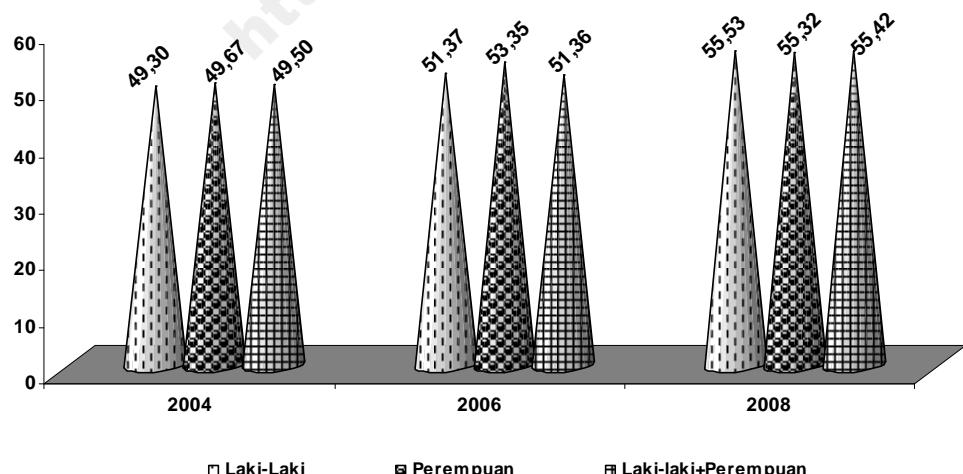
Gambaran secara makro mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia dibahas pada bagian ini secara garis besar, meliputi beberapa indikator kesehatan. Indikator kesehatan tersebut diantaranya angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat penduduk lansia.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Gambar 5.1 memperlihatkan perkembangan kondisi penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2004, 2006, dan 2008. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa perkembangannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2004 sebesar 49,50 persen, naik menjadi 51,36 persen pada tahun 2006 dan menjadi sebesar 55,42 persen pada tahun 2008. Selain terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, secara absolut angkanya pun cenderung relatif tinggi karena jumlah lansia bertambah.

**Gambar 5.1
Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004, 2006, dan 2008**



Sumber: BPS – Susenas 2004, 2006, dan 2008

Kondisi ini kurang menguntungkan lansia, jumlah lansia sehat kurang dari setengahnya selama sebulan terakhir. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara umum derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Keluhan kesehatan ini dialami baik oleh penduduk lansia laki-laki maupun perempuan dan persentase keduanya relatif sama yaitu berturut-turut 55,53 persen dan 55,32 persen pada tahun 2008.

Bila dilihat menurut provinsi, tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi dengan persentase yang bervariasi antara 47,35 – 70,69 persen (Tabel Lampiran 5.1). Tiga provinsi dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi berturut-turut adalah Provinsi Gorontalo (70,69 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (68,58 persen), dan Nusa Tenggara Timur (68,21 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah (47,35 persen), Kalimantan Timur (49,41 persen) dan Jawa Timur (50,83 persen).

Masalah umum yang dialami lansia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit, karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh lansia adalah pola hidup yang dijalani sejak usia balita hingga sekarang. Pola hidup yang kurang sehat membawa akibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga akan timbul berbagai keluhan kesehatan terutama pada masa tua.

Berbagai penelitian mengenai penduduk lansia, diantaranya penelitian Profil Penduduk Usia Lanjut di Kodya Ujung Pandang tahun 1997, temuan studi yang dilakukan Lembaga Demografi Universitas Indonesia di Kabupaten Bogor tahun 1998 dan Prosiding Semiloka "Pengembangan Pusat Pelayanan Lanjut Usia – PKBI" tahun 2001 menemukan bahwa umumnya lansia menderita bermacam-macam penyakit yang berhubungan dengan ketuaan dan merupakan penyakit kronis antara lain diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, asma, lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, kanker dan kekurangan

gizi sehingga tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan hasil temuan lapangan "Studi Lansia 2008" (lihat Bab 7).

**Tabel 5.a
Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Tahun 2008**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)								
Laki-laki	10,17	20,76	15,78	6,13	2,23	8,66	1,76	31,94
Perempuan	9,38	17,04	13,23	3,71	1,99	10,39	1,39	36,60
L+P	9,75	18,77	14,42	4,83	2,10	9,59	1,56	34,44
Perdesaan (D)								
Laki-laki	13,31	23,90	16,29	8,75	2,62	11,34	2,44	32,50
Perempuan	12,51	19,67	13,94	5,79	2,45	13,98	1,94	35,49
L+P	12,88	21,67	15,05	7,18	2,53	12,74	2,18	34,08
K + D								
Laki-laki	11,97	22,56	16,08	7,63	2,45	10,20	2,15	32,26
Perempuan	11,15	18,53	13,63	4,88	2,25	12,43	1,70	35,97
L+P	11,53	20,42	14,78	6,17	2,35	11,38	1,91	34,24

Sumber: BPS – Susenas 2008

Gambaran penyakit/keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk lansia tersebut tersaji pada Tabel 5.a. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami lansia (34,24 persen) adalah lainnya, yaitu jenis keluhan kesehatan yang umumnya diderita lansia antara lain penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, sesak nafas/asma, darah rendah, diabetes, kencing batu, dan ambeien. Jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia adalah jenis keluhan yang biasanya banyak dialami oleh masyarakat umum yaitu batuk dengan persentase sebesar 20,42 persen, pilek sebesar 14,78 persen, panas sebesar 11,53 persen dan sakit kepala berulang 11,38 persen. Sementara itu, proporsi penduduk lansia yang mengalami jenis keluhan asma, diare dan sakit gigi relatif hanya sedikit yaitu berturut-turut 6,17 persen, 2,35 persen dan 1,91 persen.

Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun pada setiap jenis keluhan proporsi penduduk lansia di daerah perdesaan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perkotaan, kecuali pada jenis keluhan kesehatan lainnya (penyakit kronis) terlihat proporsinya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan terutama pada penduduk lansia perempuan.

Bila dilihat menurut gender, pada umumnya semua jenis keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh penduduk lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan, kecuali untuk keluhan sakit kepala berulang dan penyakit lainnya. Keadaan ini berlaku pula baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

5.2 Angka Kesakitan

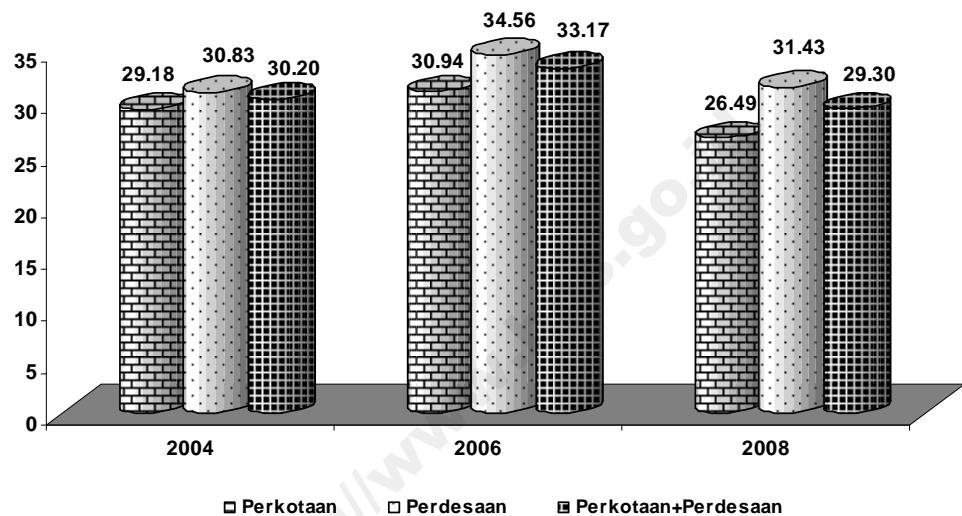
Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktifitas sehari-harinya yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Kondisi ini dapat terjadi pula pada penduduk lansia. Daya tahan tubuh yang menurun sehingga rentan terhadap penyakit merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk lansia yang mengalami sakit. Dari keterangan ini dapat diperoleh angka kesakitan. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang juga digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Namun, angka ini tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Bila dilihat perkembangannya, Gambar 5.2 menunjukkan derajat kesehatan penduduk lansia yang berfluktuasi. Angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2004 sebesar 30,20 persen naik pada tahun 2006 menjadi 33,17 persen, namun angkanya menurun pada tahun 2008 menjadi 29,30 persen.

Penurunan ini menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik meskipun sempat memburuk pada tahun-tahun sebelumnya. Angka kesakitan lansia pada tahun 2008 sebesar 29,30 persen tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 29 orang diantaranya mengalami sakit.

Gambar 5.2
Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah
Tahun 2004, 2006, dan 2008



Sumber: BPS – Susenas 2004, 2006, dan 2008

Angka kesakitan lansia yang berfluktuasi pada tahun 2004, 2006, dan 2008 terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun, bila dilihat proporsinya menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia perkotaan lebih rendah dibandingkan lansia perdesaan. Hal ini menunjukan bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan cenderung masih lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk lansia di perdesaan.

Pada Tabel Lampiran 5.2 dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk lansia bervariasi pada masing-masing provinsi dengan persentase berkisar antara 21,26 – 47,09 persen. Angka kesakitan penduduk lansia dari yang paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (47,09 persen), Maluku Utara (45,62 persen) dan Nangroe Aceh Darussalam (45,14

persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi DKI Jakarta (21,26 persen), D.I. Yogyakarta (21,81 persen) dan Jawa Tengah (25,50 persen).

5.3 Lama Sakit

Daya tahan tubuh dalam menangkal suatu jenis penyakit cenderung berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Sejalan dengan itu, waktu yang diperlukan seseorang dalam rangka proses penyembuhan sakitnya menjadi bervariasi. Ada yang cepat kembali pulih kesehatannya, sebaliknya ada pula yang memerlukan waktu yang cukup lama. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuh dapat mencerminkan berapa lama seseorang menderita sakit.

Di samping itu, lama seseorang menderita sakit juga dapat dilihat dari intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya.

Tabel 5.b
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah Tahun 2008

Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 3	36,85	33,24	34,65
4 – 7	33,29	34,72	34,16
8 – 14	7,61	9,03	8,47
15 – 21	5,13	6,46	5,94
22 – 30	17,12	16,56	16,78
T o t a l	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS – Susenas 2008

Tabel 5.b menyajikan persentase penduduk lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia mengalami sakit tidak lebih dari seminggu, yaitu sebesar 34,65 persen penduduk lansia menderita sakit selama 1–3 hari dan 34,16 persen lansia sakit selama 4–7 hari. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (sekitar 8 sampai dengan 30 hari).

Lama sakit yang diderita mayoritas penduduk lansia baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan mempunyai pola yang sama dengan pola pada umumnya yaitu mengalami sakit tidak lebih dari satu minggu. Persentase penduduk lansia perkotaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari sebesar 36,85 persen dan yang sakit selama 4–7 hari sebesar 33,29 persen, sedangkan lansia perdesaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari dan 4–7 hari masing-masing tercatat sebesar 33,24 persen dan 34,72 persen.

Pada Tabel Lampiran 5.3.3 dapat dilihat lama hari sakit penduduk lansia menurut provinsi. Pada masing-masing provinsi angkanya cukup bervariasi untuk masing-masing kelompok lama hari sakit namun tetap dominan antara 1–3 hari dan 4–7 hari. Pada kelompok lama sakit 1–3 hari, persentasenya berkisar antara 22,42–46,58 persen dan pada kelompok lama sakit 4–7 hari persentasenya antara 25,85–46,10 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1–3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi DKI Jakarta (46,58 persen), Kepulauan Bangka Belitung (46,25 persen) dan Bali (43,74 persen). Sebaliknya, pada kelompok lama sakit yang sama, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Maluku (22,42 persen), Maluku Utara (24,87 persen) dan Nusa Tenggara Timur (25,26 persen).

5.4 Cara Berobat

Setiap orang baik muda maupun tua selalu ingin memiliki tubuh yang sehat dan tidak ingin menderita sakit. Untuk itu, seseorang yang mengalami sakit biasanya melakukan berbagai cara agar kesehatannya cepat kembali pulih dan dapat melakukan berbagai aktifitas seperti semula. Salah satu cara yang dapat

dilakukan agar tubuh kembali sehat adalah dengan berobat. Kebiasaan serta cara berobat yang dilakukan seseorang, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat.

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam rangka menghilangkan penyakit yang bersarang di tubuhnya mencerminkan orang tersebut peduli akan kesehatan dan telah memiliki pola perilaku hidup sehat. Cara pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Cara pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan berbagai jenis obat baik obat tradisional, modern, lainnya (selain obat modern dan tradisional) maupun obat campuran (lebih dari satu jenis obat). Pada tahun 2008, obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar penduduk lansia (63,86 persen) dalam rangka mengobati sendiri sakitnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.c. Selain obat modern, lansia juga menggunakan jenis obat campuran, tradisional dan lainnya dalam mengobati sendiri sakitnya namun persentasenya relatif rendah. Mereka yang menggunakan obat campuran sebesar 23,66 persen, obat tradisional 11,24 persen, dan obat lainnya hanya 1,25 persen.

**Tabel 5.c
Persentase Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah Tahun 2008**

Jenis Obat yang Digunakan	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	6,20	8,33	7,35	10,57	11,71	11,24
Modern	79,21	70,50	74,51	67,91	61,05	63,86
Lainnya	1,03	1,11	1,07	1,30	1,21	1,25
Campuran	13,57	20,06	17,07	20,22	26,03	23,66
T o t a l	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS – Susenas 2008

Bila dilihat menurut tipe daerah, penggunaan obat modern tidak saja diminati oleh penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan (67,91 persen) melainkan juga banyak diminati oleh lansia yang tinggal di daerah perdesaan (61,05 persen).

Tabel 5.c juga menyajikan persentase penduduk semua umur yang berobat sendiri menurut jenis obat yang digunakan. Cara berobat sendiri dengan menggunakan obat modern tidak saja dilakukan oleh mayoritas penduduk lansia, namun juga dilakukan oleh hampir tiga perempat (74,51 persen) penduduk semua umur yang sakit. Sementara itu, jenis obat campuran, tradisional, dan obat lainnya juga digunakan penduduk semua umur dalam rangka berobat sendiri namun dengan persentase yang relatif rendah yaitu masing-masing sebesar 17,07 persen, 7,35 persen dan 1,07 persen.

Bila dilihat menurut provinsi, banyaknya penduduk lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern berada hampir di semua provinsi dengan persentase berkisar antara 37,21 – 79,01 persen. Tiga provinsi yang mempunyai persentase tertinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Utara (79,01 persen), Kalimantan Selatan (76,22 persen) dan Kepulauan Riau (74,12 persen). Sebaliknya, tiga provinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Provinsi Bali (37,21 persen), Sumatera Barat (50,74 persen) dan Jawa Timur (50,99 persen).

Selain dengan berobat sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan cara lain yaitu berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah yang bersangkutan. Tabel 5.d menampilkan proporsi penduduk semua umur dan penduduk lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Dari berbagai jenis tempat berobat atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, terdapat tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh penduduk lansia untuk berobat jalan yaitu praktek dokter, puskesmas/puskesmas pembantu (pustu), dan praktek tenaga kesehatan. Bila dilihat dari urutannya, dengan perbedaan proporsinya yang relatif kecil, praktek tenaga kesehatan menempati urutan

pertama dengan proporsi sebesar 32,71 persen, kemudian diikuti oleh puskesmas/pustu sebesar 31,06 persen dan praktek dokter sebesar 30,42 persen.

Tabel 5.d
Proporsi Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah Tahun 2008

Tempat Berobat	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit pemerintah	6,40	3,94	5,07	10,04	5,39	7,31
Rumah sakit swasta	6,11	1,90	3,84	8,33	2,40	4,86
Praktek Dokter	40,17	20,78	29,70	39,16	24,25	30,42
Puskesmas/Pustu	32,01	38,49	35,51	28,35	32,97	31,06
Praktek tenaga kesehatan	19,48	38,75	29,88	20,09	41,63	32,71
Pengobatan tradisional	1,97	2,21	2,10	2,24	2,50	2,39
Lainnya	2,51	3,13	2,84	3,01	3,30	3,18

Sumber : BPS – Susenas 2008

Pola tersebut terlihat jelas di daerah perdesaan, dimana praktek tenaga kesehatan lebih diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan dibandingkan ke puskesmas/pustu dan praktek dokter. Proporsi penduduk lansia perdesaan yang berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan sebesar 41,63 persen, sedangkan mereka yang berobat ke puskesmas/pustu dan praktek dokter masing-masing sebesar 32,97 persen dan 24,25 persen. Di daerah perkotaan pola tersebut tidak berlaku, karena proporsi penduduk lansia yang berobat jalan ke tempat praktek dokter terlihat lebih besar (39,16 persen) dibandingkan mereka yang berobat ke puskesmas/pustu (28,35 persen) dan praktek tenaga kesehatan (20,09 persen).

Dari uraian di atas terdapat pola yang berbeda dalam memilih jenis fasilitas/tempat berobat untuk berobat jalan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dengan penduduk lansia di daerah perdesaan. Tempat berobat di

praktek dokter lebih diminati oleh penduduk lansia di daerah perkotaan dibandingkan mereka yang berada di perdesaan karena umumnya praktek dokter lebih mudah diakses oleh penduduk yang berada di daerah perkotaan dan biasanya memerlukan biaya yang lebih mahal. Di sisi lain, penduduk lansia yang berada di perdesaan lebih mudah mengakses tenaga kesehatan karena biasanya fasilitas tersebut berada dekat di lingkungan penduduk desa dan biayanya lebih terjangkau.

Di sisi lain dapat dilihat bahwa puskesmas/pustu menjadi salah satu alternatif pilihan untuk berobat jalan yang juga banyak diminati penduduk lansia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Bila dilihat pada Tabel 5.d, fasilitas berobat tersebut tidak hanya diminati oleh penduduk lansia saja melainkan juga oleh penduduk pada umumnya (penduduk semua umur). Bahkan secara umum penduduk semua umur yang berobat jalan ke puskesmas/pustu mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan berobat ke praktek dokter dan tenaga kesehatan. Proporsi penduduk semua umur yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 35,51 persen, sedangkan mereka yang berobat ke praktek tenaga kesehatan dan praktek dokter yaitu berturut-turut sebesar 29,88 persen dan 29,70 persen.

Banyaknya penduduk lansia maupun penduduk pada umumnya yang berobat ke puskesmas/pustu diduga karena tempat berobat ini biasanya mudah diakses karena lebih dekat dengan rumah, lebih murah, dan dapat memberikan pelayanan gratis seperti Askeskin dan Askes.

Tabel Lampiran 5.7.3 menyajikan proporsi penduduk lansia yang sakit menurut provinsi dan tempat berobat. Pada tabel tersebut nampak bahwa pada sebagian besar provinsi di Indonesia, fasilitas kesehatan puskesmas/pustu lebih diminati penduduk lansia sebagai tempat berobat dibandingkan praktek dokter dan tenaga kesehatan. Provinsi yang lansianya berobat ke puskesmas/pustu dengan proporsi paling tinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Irian Jaya Barat (72,91 persen), Nusa Tenggara Timur (71,26 persen) dan Papua (61,99 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah secara

berturut-turut adalah Provinsi Sumatera Utara (19,05 persen), Jawa Timur (21,96 persen) dan Bali (22,18 persen).

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA



Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia

Ketenagakerjaan sudah sejak lama merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi penting karena untuk membangun perekonomian yang baik harus dilandasi oleh produktivitas yang tinggi dalam bidang ketenagakerjaan. Sejalan dengan itu, perlu diupayakan pembangunan ketenagakerjaan yang luas dan menyeluruh agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

Guna pencapaian hasil tersebut, pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah selalu diarahkan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta. Selanjutnya diharapkan dapat mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan pada

bidang ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi penduduk muda yang produktif, melainkan juga diarahkan bagi mereka yang sudah memasuki masa lansia namun masih potensial yaitu mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

Penduduk lansia potensial disebut juga sebagai lansia yang produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Oleh karena itu, pemberdayaan penduduk lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya menunjang kemandirian lansia, tidak saja dari aspek ekonomis, tetapi sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU Lansia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia.

Di sisi lain, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyoginya tinggal menikmati masa tuanya tanpa jerih payah lagi untuk bekerja. Namun, pada kenyataannya masih cukup banyak penduduk lansia yang tetap bekerja keras untuk mendapatkan hidup secara layak meskipun sudah uzur. Sejalan dengan itu, bagi lansia yang produktif diberikan hak mendapatkan kesempatan kerja seperti yang tercantum dalam UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2) c.

Selanjutnya pada UU tersebut Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal, dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Pada bagian ini akan dilihat gambaran secara makro mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Gambaran tersebut secara rinci akan dilihat dari berbagai indikator ketenagakerjaan yang mencakup tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja.

6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan dan termasuk mereka yang putus asa mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, yaitu mereka yang memiliki kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti tidak mampu bekerja, pensiun, dsb.

Penduduk lansia yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan lansia potensial. Mereka tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian tidaklah sepenuhnya benar jika dikatakan lansia tidak produktif.

Berdasarkan data hasil Sakernas 2008, penduduk lansia Indonesia masih banyak yang tergolong sebagai lansia produktif (Tabel 6.a). Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia sekitar 46,59 persen diantaranya masih bekerja, sedangkan sisanya melakukan kegiatan mengurus rumah tangga (27,47 persen), menganggur (0,47 persen) dan lainnya (25,47 persen). Tingginya partisipasi penduduk lansia yang bekerja menunjukkan bahwa peran penerimaan dari hasil bekerja (pendapatan) merupakan sumber yang sangat penting dalam menunjang kehidupan mereka. Hasil studi lansia juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia masih bekerja. Alasan mereka bekerja antara lain untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan.

Tabel 6.a
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Tahun 2008

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Bekerja	Penganggur	Mengurus Rumah Tangga		
			(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)			
- Penduduk 15 Tahun Ke Atas					
Perkotaan					
Laki-laki	72,23	8,39	2,18	17,19	100,00
Perempuan	43,04	5,75	37,99	13,22	100,00
Laki-laki+Perempuan	57,44	7,05	20,32	15,19	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	80,96	4,72	1,72	12,60	100,00
Perempuan	48,60	4,32	36,58	11,72	100,00
Laki-laki+Perempuan	64,78	4,52	19,15	13,16	100,00
Perkotaan+Perdesaan					
Laki-laki	77,13	6,33	1,92	14,61	100,00
Perempuan	46,13	4,95	37,21	11,72	100,00
Laki-laki+Perempuan	61,54	5,64	19,67	13,16	100,00
- Penduduk Lansia					
Perkotaan					
Laki-laki	48,88	0,66	11,32	39,14	100,00
Perempuan	25,22	0,20	51,87	22,71	100,00
Laki-laki+Perempuan	36,11	0,41	33,20	30,27	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	70,28	0,30	5,70	23,72	100,00
Perempuan	36,71	0,69	40,93	21,67	100,00
Laki-laki+Perempuan	52,75	0,51	24,10	22,65	100,00
Perkotaan+Perdesaan					
Laki-laki	62,54	0,43	7,73	29,29	100,00
Perempuan	32,37	0,51	45,06	22,06	100,00
Laki-laki+Perempuan	46,59	0,47	27,47	25,47	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2008

Bila ditinjau menurut tipe daerah, lansia di perkotaan maupun perdesaan memiliki kondisi yang sama. Table 6.a menunjukkan bahwa lansia perdesaan yang bekerja persentasenya lebih tinggi (52,75 persen) dibandingkan lansia perkotaan (36,11 persen). Hal ini terjadi karena umumnya penduduk lansia yang berada di perdesaan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan. Kondisi tersebut memaksa mereka harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, umumnya pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sedangkan di perkotaan lebih banyak pekerjaan yang bersifat formal sehingga diperlukan beberapa persyaratan yang umumnya tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lansia, seperti faktor umur dan pendidikan yang lebih tinggi.

Ditinjau menurut jenis kelamin, mayoritas penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga.

Pada Tabel 6.a juga disajikan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk 15 tahun ke atas memiliki kegiatan bekerja (61,54 persen). Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk lansia. Hal ini wajar mengingat penduduk 15 tahun ke atas termasuk penduduk usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar mereka bekerja karena lebih bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.

Jenis kegiatan yang juga termasuk dalam angkatan kerja adalah penganggur. Pada lansia, konsep penganggur adalah lansia yang saat ini masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, tetapi tidak termasuk yang putus asa mencari pekerjaan. Persentase lansia yang menganggur sangat rendah yaitu hanya sekitar 0,47 persen. Rendahnya persentase lansia yang menganggur sesuai dengan kenyataan bahwa banyak dari mereka yang masih bekerja dan tidak suka menganggur (hasil studi lansia), sedangkan bagi lansia yang sudah lemah fisiknya hanya melakukan kegiatan lainnya yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja.

Bila dilihat penganggur pada penduduk 15 tahun ke atas, persentasenya lebih besar (4,52 persen) dibandingkan penduduk lansia. Pada penduduk 15 tahun ke atas konsep penganggur adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah dapat pekerjaan namun belum mulai bekerja, dan termasuk mereka yang putus asa mencari pekerjaan.

Di sisi lain, Tabel 6.a juga menampilkan gambaran mengenai kegiatan penduduk lansia yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja yaitu mereka yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Dari kedua kegiatan tersebut, lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sedikit lebih tinggi persentasenya (27,47 persen) dibandingkan lansia yang melakukan kegiatan lainnya (25,47 persen). Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya pada lansia mencakup antara lain kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Sementara itu, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 13,16 persen, meliputi kegiatan olahraga, kursus, hiburan dan sejenisnya termasuk kegiatan bersekolah. Proporsi penduduk lansia yang melakukan kegiatan lainnya lebih besar daripada penduduk 15 tahun ke atas karena sebagian besar lansia termasuk kelompok penduduk tidak produktif. Secara fisik kondisi lansia juga sudah melemah sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan lainnya dibandingkan penduduk pada umumnya.

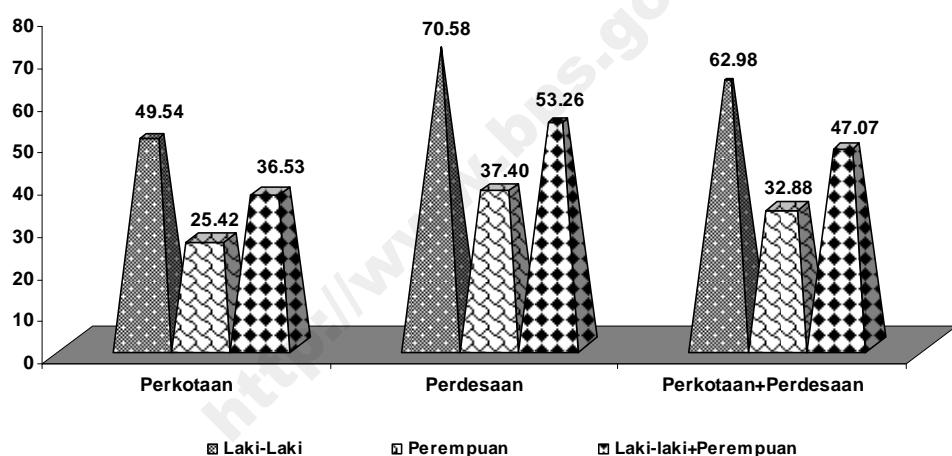
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok lansia, TPAK merupakan penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi, yaitu proporsi lansia yang bekerja dan lansia yang mencari kerja terhadap penduduk lansia itu sendiri.

Pada tahun 2008 nampak bahwa penduduk lansia yang terlibat kegiatan

ekonomi relatif cukup besar. Hal ini tercermin dari TPAK penduduk lansia sebesar 47,07 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Tingginya TPAK penduduk lansia terutama terlihat di daerah perdesaan yaitu sebesar 53,26 persen, sedangkan di daerah perkotaan angkanya lebih rendah yaitu sebesar 36,53 persen. Bila ditinjau menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK yang cukup jauh antara lansia laki-laki dan perempuan. TPAK penduduk lansia laki-laki hampir dua kali lipat lansia perempuan (62,98 persen berbanding 32,88 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 6.1
TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin
Tahun 2008



Sumber: BPS - Sakernas 2008

TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi cenderung bervariasi dengan persentase berkisar antara 29,91–58,11 persen, seperti yang ditunjukkan pada Tabel Lampiran 6.1. Tiga provinsi yang memiliki TPAK penduduk lansia tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Tengah (58,11 persen), Sulawesi Tenggara (57,20 persen) dan Papua (57,08 persen). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki TPAK penduduk lansia terendah berturut-turut adalah Kepulauan Riau (29,91 persen), DKI Jakarta (33,28 persen) dan Bangka Belitung (36,26 persen). Di daerah perkotaan, TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi berkisar antara 22,96–48,69 persen,

sedangkan di daerah perdesaan angka tersebut lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 37,34–67,70 persen.

6.3 Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Dalam hal ini, lapangan usaha mencakup banyak sektor, namun ulasan pada bab ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik/gas/air dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Ketiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Pada Tabel 6.b disajikan persentase pekerja penduduk 15 tahun ke atas dan pekerja lansia berdasarkan kelompok lapangan usaha. Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 65,47 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa (25,21 persen) dan sektor industri (9,32 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja lansia untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor primadona yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia dalam mencari nafkah, selain sektor jasa. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.b, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor jasa sebesar 40,92 persen, sektor pertanian sebesar 40,30 persen dan sisanya bekerja pada sektor industri sebesar 18,78 persen.

Tabel 6.b
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah Tahun 2008

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk 15 Tahun Ke Atas			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	10,40	61,26	40,30	31,47	79,14	65,47
Industri (M)	24,65	14,67	18,78	12,87	7,90	9,32
Jasa (S)	64,95	24,08	40,92	55,66	12,97	25,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2008

Pada Tabel 6.b juga ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia di daerah perkotaan dengan perdesaan. Sama halnya dengan penduduk pada umumnya (penduduk 15 tahun ke atas), di daerah perkotaan, mayoritas lansia bekerja di kelompok sektor jasa (55,66 persen), sedangkan lansia yang bekerja di sektor pertanian dan industri masing-masing hanya sebesar 31,47 persen dan 12,87 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan hampir 80 persen lansianya bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sebesar 12,97 persen bekerja pada sektor jasa dan 7,90 persen pada sektor industri.

Tabel Lampiran 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi. Pola struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi menunjukkan kondisi yang serupa dengan pola secara nasional dimana sektor pertanian mendominasi para pekerja lansia (berkisar antara 49,17–85,99 persen), kecuali di Provinsi Kepulauan Riau (36,47 persen) dan DKI Jakarta (1,17 persen). Penduduk lansia di kedua provinsi tersebut lebih banyak yang bekerja di sektor jasa dibandingkan bekerja di sektor pertanian.

Pola struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan secara nasional sejalan dengan sektor yang diandalkan oleh penduduk lansia di daerah perkotaan pada masing-masing provinsi, yaitu terbesar pada sektor jasa, setelah

itu disusul oleh sektor pertanian dan industri, kecuali di Provinsi Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Penduduk lansia perkotaan di empat provinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 6.2.1. Sementara itu, pada Tabel Lampiran 6.2.2 tampak bahwa sektor pertanian masih merupakan andalan utama penduduk lansia di daerah perdesaan pada semua provinsi, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar penduduk lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam memasuki pasar kerja penduduk lansia kalah bersaing dengan penduduk yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi (Bab 4). Oleh sebab itu, mayoritas lansia hanya dapat bekerja pada pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian.

Tabel 6.c
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2008

Pendidikan yang Ditamatkan	Penduduk 15 Tahun Ke Atas			Penduduk Lansia		
	Pertanian	Industri	Jasa-jasa	Pertanian	Industri	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/blm pernah sekolah	9,57	2,82	2,31	25,10	22,52	17,00
Tdk tamat SD	19,43	9,54	7,73	29,13	26,22	23,33
SD	45,93	35,19	26,20	36,03	34,34	33,50
SMP	15,39	23,18	19,57	7,11	9,75	12,81
SM	8,52	25,25	30,43	2,15	5,81	9,16
PT	1,16	4,02	13,76	0,48	1,35	4,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2008

Keadaan ini tercermin pada Tabel 6.c yang menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung semakin besar seiring jenjang pendidikannya yang semakin rendah. Lebih dari 90 persen

penduduk lansia yang berpendidikan SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMA ke atas hanya sebesar 2,63 persen yang bekerja di sektor pertanian. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini yang jauh lebih mudah (bahkan tanpa syarat pendidikan) dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi/tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

Pada Tabel 6.c juga ditampilkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelompok lapangan usaha. Secara umum, sebagian besar penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian berpendidikan tamat SD.

6.4 Status Pekerjaan

Seorang yang bekerja dalam suatu lapangan usaha akan mempunyai kedudukan dalam pekerjaannya tersebut. Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan disebut sebagai status pekerjaan. Pada Tabel 6.d disajikan persentase penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan. Secara umum dari keseluruhan jumlah penduduk lansia yang bekerja, sebagian besar lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 43,18 persen, selanjutnya disusul oleh lansia yang berusaha sendiri sebesar 23,32 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,29 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas pertanian (7,21 persen), buruh/karyawan (5,87 persen), berusaha dibantu buruh tetap (3,92 persen) dan pekerja bebas non pertanian (2,21 persen).

Banyaknya penduduk lansia yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar terlihat jelas di daerah perdesaan. Dari total penduduk lansia di perdesaan yang bekerja, hampir separuhnya (49,08 persen) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Pola ini tidak berlaku pada penduduk lansia di daerah perkotaan. Mereka lebih banyak yang bekerja

dengan berusaha sendiri yaitu sebesar 34,36 persen, sedangkan penduduk lansia di perkotaan yang berusaha dibantu buruh tidak tetap persentasenya sebesar 28,49 persen. Di samping itu, banyak pula penduduk lansia perkotaan yang menjadi buruh/karyawan, sedangkan di perdesaan lebih banyak yang menjadi pekerja tidak dibayar.

Tabel 6.d
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Tahun 2008

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Ber-usaha sendiri	Ber-usaha dibantu buruh tdk tetap	Ber-usaha dibantu buruh tetap	Buruh/ karya- wan	Pekerja bebas pertani- an	Pekerja bebas non per- tanian	Pekerja tidak di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	30,90	34,03	7,31	14,90	4,89	3,85	4,11	100,00
Perempuan	40,09	19,34	3,15	9,17	6,14	2,67	19,44	100,00
Laki-laki+Perempuan	34,36	28,49	5,75	12,74	5,36	3,40	9,89	100,00
Perdesaan								
Laki-laki	16,59	63,03	3,94	3,59	7,08	1,98	3,80	100,00
Perempuan	22,90	24,65	1,86	2,27	9,49	1,29	37,54	100,00
Laki-laki+Perempuan	18,89	49,08	3,18	3,11	7,96	1,73	16,06	100,00
Perkotaan+Perdesaan								
Laki-laki	20,63	54,84	4,89	6,78	6,46	2,50	3,89	100,00
Perempuan	27,96	23,09	2,24	4,30	8,50	1,70	32,21	100,00
Laki-laki+Perempuan	23,32	43,18	3,92	5,87	7,21	2,21	14,29	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2008

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, status berusaha dibantu buruh tidak tetap lebih didominasi oleh pekerja lansia laki-laki yaitu sebesar 54,84 persen. Pola yang sama terjadi pada pekerja lansia laki-laki yang berada di daerah perdesaan (63,03 persen) maupun mereka yang berada di daerah perkotaan (34,03 persen). Umumnya mereka bekerja dibantu oleh anggota keluarga seperti istri atau anak mereka sebagai buruh tidak dibayar. Sejalan dengan itu, penduduk lansia perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar (32,21 persen). Sifat pekerjaan ini cenderung adalah membantu keluarga di sawah/kebun atau pada usaha keluarga lainnya, seperti yang banyak terjadi di daerah perdesaan yaitu sebesar 37,54 persen lansia perempuan bekerja sebagai

buruh tidak dibayar. Namun, di daerah perkotaan lebih banyak lansia perempuan yang bekerja dengan berusaha sendiri yaitu sebesar 40,09 persen.

Bila dilihat menurut provinsi, sebagian besar provinsi mempunyai struktur status pekerjaan yang sama dengan nasional, yaitu mayoritas penduduk lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh seperti yang ditunjukkan pada Tabel Lampiran 6.3.3.

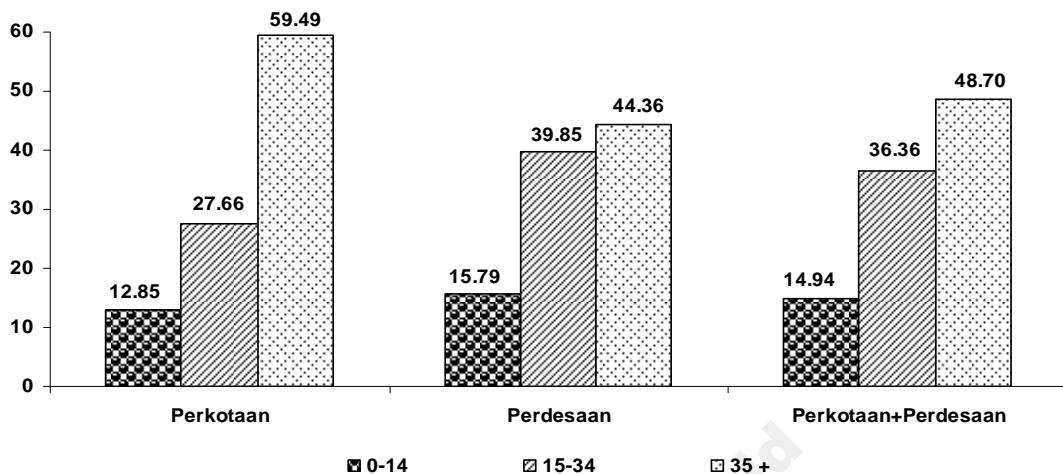
6.5 Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyoginya, penduduk lansia yang bekerja dapat bekerja dengan jam kerja hanya paruh waktu mengingat kondisi tubuhnya yang mulai melemah. Namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Hal ini menggambarkan lansia cenderung masih mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Produktivitas tinggi yang dialami pekerja lansia tercermin pada Gambar 6.2. Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia yang bekerja, hampir separuhnya (48,70 persen) bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 36,36 persen dan mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 14,94 persen.

Jika dirinci menurut tipe daerah, lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh dilakukan baik oleh penduduk lansia yang berada di daerah perkotaan maupun perdesaan, dengan persentase di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan (59,49 persen berbanding 44,36 persen). Sebaliknya, persentase lansia di daerah perdesaan yang bekerja selama 0 – 14 jam dan 15 – 34 jam relatif lebih tinggi dibanding dengan mereka yang berada di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan sektor dominan di perdesaan adalah pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor formal (jasa dan industri).

Gambar 6.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir Tahun 2008



Sumber: BPS - Sakernas 2008

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Tabel 6.e menunjukkan bahwa, pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai 53,10 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 41,13 persen.

Tabel 6.e
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2008

Jumlah Jam Kerja	Penduduk 15 Thn Ke Atas			Penduduk Lansia		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	5,75	10,87	7,68	12,34	19,43	14,94
15 – 34	20,87	31,37	24,83	34,57	39,44	36,36
35 +	73,37	57,76	67,49	53,10	41,13	48,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2008

Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dan 15-34 jam proporsinya lebih tinggi dari lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam sebesar 19,43 persen dan jumlah jam kerja 15-34 jam sebesar 39,44 persen. Sementara itu, lansia laki-laki yang bekerja 0-14 jam sebesar 12,34 persen dan yang bekerja 15-34 jam sebesar 34,57 persen. Untuk penduduk 15 tahun ke atas, baik penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai pola yang sama dalam bekerja yaitu sebagian besar dari mereka bekerja dengan jam kerja penuh yaitu masing-masing 73,37 persen dan 57,76 persen. Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh hampir terjadi di semua provinsi, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara (Tabel lampiran 6.4.3).

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

HASIL STUDI LANSIA

http://www.bpp.go.id



Hasil Studi Lansia

Studi mendalam lansia secara khusus dilaksanakan untuk mendukung informasi data yang dihasilkan Susenas maupun Sakernas, bertujuan untuk memperkaya informasi yang bersifat kualitatif, menjawab fenomena dari data lansia yang dihasilkan kedua survei tersebut yang bersifat kuantitatif. Dari hasil studi mendalam ini juga ingin dilihat gambaran lebih rinci mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk lansia dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Studi ini diharapkan akan dapat membantu memperluas gambaran lansia sehingga program pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan lansia dapat mengenai sasaran.

7.1 Metodologi

7.1.1 Cakupan Wilayah Pencacahan

Pelaksanaan studi mendalam lansia mencakup 32 rumah tangga sampel yang tersebar di 6 (enam) provinsi, dengan rincian 4 rumah tangga sampel per desa/kelurahan, dimana 1 provinsi diambil sampel sebanyak 1 atau 2 desa/kelurahan. Rumah tangga sampel yang diambil adalah yang mempunyai anggota rumah tangga berumur 60 tahun ke atas (lansia). Adapun keenam provinsi tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

No	Provinsi	Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Jambi	Muaro Jambi
2.	Riau	Dumai
3.	Bangka Belitung	Pangkal Pinang
4.	Jawa Barat	Kota Bandung
5.	D I Yogyakarta	Bantul
6.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak

Di Kota Dumai Provinsi Riau dilakukan pula pengamatan dan pendataan di Puskesmas Santun Usia Lanjut yang mengutamakan pelayanan kepada lansia.

7.1.2 Cara Pemilihan Responden

Pemilihan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan berdasarkan pada banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas (penduduk lansia) berdasarkan data Susenas 2008. Prosedur pemilihan rumah tangga dalam studi ini menggunakan metode *purposive*. Petugas bersama dengan penunjuk jalan yang ditunjuk mendatangi ketua RT di desa terpilih untuk menanyakan rumah tangga yang ada penduduk lansianya. Berdasarkan informasi dari ketua RT ini, petugas memilih sebanyak 4 rumah tangga terpilih, selanjutnya mendatangi dan melakukan wawancara terhadap seluruh responden lansia di rumah tangga terpilih dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan.

7.1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara petugas lapangan mendatangi setiap rumah tangga yang terpilih dalam studi lansia dan mewawancara langsung responden yang bersangkutan (anggota rumah tangga berumur 60 tahun ke atas) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

7.2 Hasil Studi Lansia

1. Berdasarkan hasil studi lansia, dari 32 rumah tangga terpilih diperoleh jumlah lansia sebanyak 40 orang. Dari jumlah lansia tersebut sebanyak 16 orang lansia berperan sebagai kepala rumah tangga. Beberapa alasan mereka berperan sebagai kepala keluarga adalah karena masih menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, rumah yang ditempati milik lansia, dan masih ada anak yang belum berkeluarga (mandiri). Umumnya lansia yang menjadi kepala rumah tangga adalah lansia laki-laki.
2. Tingkat pendidikan lansia relatif rendah. Dari lansia yang diwawancara, hanya sebagian kecil yang mengenyam pendidikan setingkat SMP dan SMA, sebagian besar mengatakan tidak pernah sekolah, dengan alasan pada saat mereka berada di usia sekolah adalah pada masa penjajahan Belanda/Jepang. Saat itu kehidupan mereka sangat kekurangan sehingga tidak ada biaya untuk sekolah sehingga akhirnya banyak dari mereka yang bekerja membantu orang tua. Alasan lain adalah fasilitas sekolah masih jarang dan sulit untuk dijangkau dari segi jarak. Kalaupun mereka sekolah, rata-rata pendidikan yang ditamatkan hanya sampai jenjang pendidikan dasar bahkan banyak yang tidak tamat. Bagi lansia yang tidak pernah sekolah umumnya tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf), dan beberapa dari mereka ada yang pernah ikut kejar paket tetapi tidak sampai selesai.
3. Umumnya para lansia menderita penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, sesak nafas/asma, darah rendah, dan diabetes. Sementara

itu, keluhan kesehatan yang sering diderita oleh lansia adalah nyeri tulang, pegal-pegal, maag, pusing, batuk, pilek, flu, dan panas. Jenis obat yang banyak digunakan oleh lansia pada umumnya adalah obat modern. Fasilitas pengobatan yang biasa didatangi oleh lansia untuk mengobati penyakitnya beragam. Ada yang berobat ke rumah sakit, puskesmas, pustu, dokter praktik, dan mantri kesehatan.

4. Kegiatan sehari-hari para lansia umumnya relatif sama. Kegiatan dimulai pada waktu subuh untuk melakukan sholat subuh, kemudian sebagian lansia melakukan jalan kaki, melakukan pekerjaan rumah tangga, sarapan. Bagi lansia yang bekerja, jam 7 pagi sudah siap-siap untuk berangkat bekerja ke sawah. Sementara itu, bagi lansia yang tidak bekerja hanya tidur-tiduran (istirahat santai) atau mengobrol dengan keluarga/tetangga. Hal ini disebakan karena pada umumnya mereka yang tidak bekerja adalah lansia yang sudah lemah, tidak bertenaga dan sakit-sakitan. Pada siang hari, bagi yang beragama Islam mereka sholat dan makan siang. Setelah itu, sampai sore lansia hanya duduk-duduk santai sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang lain atau menjaga cucu. Kegiatan sehari-hari lansia laki-laki dan perempuan relatif sama. Perbedaannya hanyalah pada lansia perempuan yang tidak bekerja, kegiatan mereka dari bangun pagi adalah mengurus rumah tangga, memasak, menjaga/mengasuh cucu, dan menonton televisi. Tidur malam dilakukan lansia antara jam 9 sampai 10 malam. Pada umumnya lansia masih melakukan kebiasaan rutin tanpa bantuan orang lain seperti makan, mandi bahkan ada yang masih memasak sendiri. Mereka umumnya tidak merokok. Ada sebagian kecil lansia laki-laki yang masih melakukan olahraga, seperti badminton, sekedar untuk menjaga kesehatan. Sedangkan dalam interaksi dengan masyarakat, umumnya para lansia ini mengikuti arisan di tingkat RT ataupun dusun.
5. Sebagian besar lansia masih bekerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, menjaga kesehatan badan, dan mengisi waktu luang ataupun menambah penghasilan keluarga. Pada dasarnya mereka tidak suka berdiam diri tanpa ada yang dikerjakan. Walaupun hanya

untuk mengisi waktu luang, namun penghasilan yang diperoleh mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar lansia bekerja di sektor pertanian, demikian juga riwayat pekerjaan mereka dahulu adalah petani. Ada sebagian kecil yang bekerja di sektor jasa, seperti sebagai tukang masak untuk karyawan hotel. Jenis pekerjaan yang dilakukan pada umumnya adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat dengan jam kerja yang hanya separuh waktu karena mereka menyadari sudah kurang tenaganya. Ada juga lansia yang saat ini tidak bekerja karena kondisi kesehatan. Untuk lansia yang tidak bekerja, pada umumnya dulu mereka bekerja sebagai buruh tani, tukang bangunan dan buruh serabutan, namun ada pula yang dulunya pedagang, pegawai negeri dan lain-lain.

6. Kebersamaan para lansia dengan anggota rumah tangga sangat baik dan dekat. Sebagian besar lansia memiliki kebersamaan yang cukup erat dengan art lainnya. Setiap hari mereka makan bersama, menonton televisi, dan mengobrol. Kebanyakan lansia memiliki aktifitas di luar rumah seperti berkumpul dengan tetangga, mengikuti kegiatan pengajian, arisan, ronda, dan gotong royong.
7. Ketika diwawancara mengenai keberadaan panti jompo/panti werdha, rata-rata lansia mengerti tentang keberadaan panti jompo setelah dijelaskan oleh petugas. Ada sebagian kecil yang memang sudah mengetahui keberadaan panti jompo. Namun ketika ditanya keinginan untuk tinggal di panti, rata-rata para lansia menolaknya, karena mereka lebih baik tinggal di rumah bersama anak cucu atau keluarga lainnya meskipun dalam keadaan yang serba kekurangan. Begitu juga ketika ditanyakan kepada anggota rumah tangga lainnya, rata-rata mereka menginginkan tetap tinggal bersama dan merawat lansia dalam keadaan apapun, karena menitipkan lansia ke panti jompo dianggap menelantarkannya.
8. Sebagian besar lansia tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan perlindungan sosial khusus untuk lansia seperti pelayanan prioritas dalam penggunaan fasilitas umum di puskesmas atau rumah sakit, jalan raya, kendaraan umum (diskon kereta api, pesawat terbang, dll). Bantuan sosial

dari pemerintah yang pernah diterima oleh rumah tangga lansia adalah raskin, askeskin dan BLT.

9. Lansia umumnya bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri, terutama bagi mereka yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga dan masih bekerja atau mempunyai dana pensiun. Namun, bila ada kesulitan mereka minta tolong dan berkeluh kesah kepada anak mereka. Walaupun tidak tinggal dalam satu rumah, namun umumnya rumah mereka berdekatan dalam satu desa. Ada juga lansia yang seluruh hidupnya menjadi tanggung jawab anaknya termasuk biaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi lansia yang tinggal sebatangkara mendapatkan pertolongan dari tetangga terdekat.
10. Rata-rata para lansia rutin mendatangi posyandu lansia, dimana posyandu lansia ini merupakan salah satu program pemerintah yang merupakan wujud kepedulian terhadap lansia. Kegiatan posyandu lansia setiap bulan sekali berupa cek kesehatan (pengukuran tensi darah dan timbang badan), pemberian obat, pemberian makanan tambahan dan pemberian kartu menuju sehat (KMS) lansia untuk rekap kesehatan. Program ini disambut baik oleh lansia, karena selain cek kesehatan dan pengobatan gratis juga sebagai ajang pertemuan (curhat) antar lansia. Peserta posyandu lansia dimulai pada usia pra lansia yaitu 40–54 tahun dan lansia 55 tahun ke atas. Selain itu juga dilaksanakan senam lansia setiap seminggu sekali.
11. Hasil pengamatan dan pendataan di Puskesmas Santun Usia Lanjut di Dumai diperoleh informasi mengenai keberadaan Puskesmas Santun Usila Dumai Timur yang diresmikan oleh Ibu Walikota Dumai tanggal 21 Januari 2008. Puskesmas Santun Usila dimaksud adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada usia lanjut, yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif, pro aktif, baik dan sopan serta memberikan kemudahan dan dukungan bagi usia lanjut. Visi dari puskesmas ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut dalam rangka mencapai Dumai Sehat 2010. Adapun ciri-ciri dari Puskesmas Santun Usila adalah: pelayanan baik, berkualitas dan sopan, memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan pada usia lanjut (loket

khusus, ruang pemeriksaan khusus, fasilitas: koridor dengan pegangan, kursi roda, toilet dengan pegangan, dll), memberikan keringanan/penghapusan biaya pelayanan kesehatan bagi usila tidak mampu, melakukan pelayanan kesehatan secara pro aktif, dan melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral. Kegiatan yang dilaksanakan dalam gedung adalah: pengobatan setiap hari kerja, penyuluhan setiap Hari kamis, siraman rohani dua minggu sekali, senam usila setiap Hari Kamis dan Sabtu, pemberian makanan tambahan usila setiap Hari Kamis, dan kunjungan dokter spesialis 1 x sebulan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar gedung adalah: posyandu usila sebulan sekali, pengobatan sebulan sekali, penyuluhan sebulan sekali, pemberian makanan tambahan sebulan sekali, senam usila sebulan sekali, rekreasi sebulan sekali, wirid pengajian sebulan sekali, dan pelayanan *home care* (kunjungan ke rumah) untuk kasus-kasus tertentu.

TABEL LAMPIRAN

Tabel 3.1.1. Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2008

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Laki - Laki	
	< 15	15-35	36-59	60+	Jumlah	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	32,59	37,66	23,31	6,44	100,00	2.020.688
Sumatera Utara	34,64	34,56	25,20	5,60	100,00	6.467.058
Sumatera Barat	33,57	32,73	25,78	7,91	100,00	2.194.459
Riau	33,78	37,26	23,75	5,21	100,00	2.765.735
Jambi	31,35	36,99	25,68	5,98	100,00	1.428.597
Sumatera Selatan	30,57	37,07	25,48	6,89	100,00	3.587.585
Bengkulu	32,01	36,39	25,54	6,06	100,00	877.290
Lampung	30,14	35,47	26,29	8,09	100,00	3.942.508
Bangka Belitung	29,78	37,43	26,04	6,74	100,00	520.406
Kepulauan Riau	31,36	38,43	24,53	5,68	100,00	740.573
DKI Jakarta	25,32	41,32	27,12	6,24	100,00	4.372.563
Jawa Barat	29,99	34,01	27,86	8,14	100,00	20.741.957
Jawa Tengah	27,72	30,90	31,12	10,26	100,00	15.956.945
DI Yogyakarta	21,54	33,72	31,70	13,05	100,00	1.671.610
Jawa Timur	26,53	30,93	32,36	10,18	100,00	17.658.419
Banten	30,92	38,22	24,67	6,19	100,00	5.095.009
Bali	26,54	33,02	30,61	9,83	100,00	1.756.832
Nusa Tenggara Barat	33,67	33,32	24,69	8,31	100,00	2.173.183
Nusa Tenggara Timur	39,81	30,47	22,11	7,61	100,00	2.142.710
Kalimantan Barat	32,28	35,54	25,25	6,93	100,00	2.363.248
Kalimantan Tengah	30,82	37,70	25,49	5,99	100,00	1.191.507
Kalimantan Selatan	29,48	37,38	27,23	5,92	100,00	1.684.487
Kalimantan Timur	30,86	38,17	26,43	4,54	100,00	1.584.448
Sulawesi Utara	28,08	32,96	30,73	8,23	100,00	1.129.400
Sulawesi Tengah	33,38	35,12	25,34	6,17	100,00	1.300.791
Sulawesi Selatan	33,37	33,87	24,91	7,85	100,00	3.747.046
Sulawesi Tenggara	36,50	35,37	22,23	5,89	100,00	1.104.455
Gorontalo	33,53	34,57	26,45	5,44	100,00	447.033
Sulawesi Barat	38,38	33,45	22,54	5,64	100,00	508.890
Maluku	37,98	33,46	22,28	6,28	100,00	669.543
Maluku Utara	35,94	36,54	22,61	4,92	100,00	476.084
Irian Jaya Barat	37,04	35,46	24,37	3,14	100,00	361.889
Papua	37,52	36,15	24,16	2,17	100,00	1.035.715
INDONESIA	30,08	34,08	27,81	8,03	100,00	113.718.663

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 3.1.2. Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2008

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perempuan	
	< 15	15-35	36-59	60+	Jumlah	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	29,46	39,31	23,65	7,58	100,00	2.065.245
Sumatera Utara	31,68	34,93	25,89	7,51	100,00	6.460.338
Sumatera Barat	30,32	33,39	26,31	9,98	100,00	2.288.427
Riau	32,36	39,08	23,44	5,12	100,00	2.654.925
Jambi	30,38	38,09	25,30	6,22	100,00	1.384.656
Sumatera Selatan	29,83	37,67	25,18	7,33	100,00	3.509.318
Bengkulu	30,82	37,97	24,79	6,41	100,00	843.183
Lampung	30,09	35,40	26,28	8,24	100,00	3.689.998
Bangka Belitung	30,30	36,96	26,11	6,63	100,00	496.497
Kepulauan Riau	28,74	44,05	22,62	4,59	100,00	769.613
DKI Jakarta	24,31	43,14	26,48	6,08	100,00	4.505.227
Jawa Barat	28,99	34,69	27,81	8,50	100,00	20.462.435
Jawa Tengah	25,44	31,22	31,37	11,97	100,00	16.287.059
DI Yogyakarta	20,15	31,76	32,77	15,31	100,00	1.706.670
Jawa Timur	23,72	31,78	32,14	12,36	100,00	18.343.502
Banten	29,71	39,57	24,48	6,24	100,00	5.034.415
Bali	24,91	33,07	30,93	11,08	100,00	1.756.965
Nusa Tenggara Barat	29,75	37,24	24,50	8,52	100,00	2.394.590
Nusa Tenggara Timur	36,13	32,64	23,16	8,06	100,00	2.163.845
Kalimantan Barat	31,71	36,46	25,40	6,44	100,00	2.263.325
Kalimantan Tengah	30,65	39,59	24,44	5,32	100,00	1.131.283
Kalimantan Selatan	28,42	37,78	26,36	7,44	100,00	1.716.558
Kalimantan Timur	30,78	39,78	25,19	4,25	100,00	1.458.943
Sulawesi Utara	26,69	32,48	30,88	9,96	100,00	1.096.091
Sulawesi Tengah	33,00	36,57	24,21	6,22	100,00	1.247.811
Sulawesi Selatan	29,80	35,00	25,33	9,87	100,00	4.024.625
Sulawesi Tenggara	33,79	37,38	21,96	6,87	100,00	1.151.612
Gorontalo	31,67	35,38	26,19	6,76	100,00	446.596
Sulawesi Barat	35,06	36,31	21,88	6,75	100,00	518.500
Maluku	35,61	33,42	23,92	7,05	100,00	660.274
Maluku Utara	34,59	38,34	21,96	5,10	100,00	460.826
Irian Jaya Barat	39,89	37,95	20,03	2,13	100,00	346.610
Papua	36,85	40,45	21,01	1,70	100,00	960.275
INDONESIA	28,18	34,96	27,79	9,07	100,00	114.300.237

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 3.1.3. Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2008

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Laki-laki+Perempuan	
	< 15	15-35	36-59	60+	Jumlah	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	31,00	38,50	23,48	7,02	100,00		4.085.933
Sumatera Utara	33,16	34,75	25,54	6,55	100,00		12.927.396
Sumatera Barat	31,91	33,07	26,05	8,97	100,00		4.482.886
R i a u	33,08	38,15	23,60	5,17	100,00		5.420.660
J a m b i	30,87	37,53	25,50	6,10	100,00		2.813.253
Sumatera Selatan	30,20	37,36	25,33	7,11	100,00		7.096.903
Bengkulu	31,43	37,16	25,17	6,23	100,00		1.720.473
Lampung	30,11	35,43	26,29	8,16	100,00		7.632.506
Bangka Belitung	30,03	37,20	26,08	6,69	100,00		1.016.903
Kepulauan Riau	30,03	41,29	23,56	5,13	100,00		1.510.186
DKI Jakarta	24,81	42,24	26,79	6,16	100,00		8.877.790
Jawa Barat	29,49	34,35	27,84	8,32	100,00		41.204.392
Jawa Tengah	26,57	31,06	31,25	11,12	100,00		32.244.004
DI Yogyakarta	20,84	32,73	32,24	14,19	100,00		3.378.280
Jawa Timur	25,10	31,36	32,24	11,30	100,00		36.001.921
Banten	30,32	38,89	24,57	6,21	100,00		10.129.424
B a l i	25,73	33,05	30,77	10,46	100,00		3.513.797
Nusa Tenggara Barat	31,61	35,38	24,59	8,42	100,00		4.567.773
Nusa Tenggara Timur	37,96	31,56	22,64	7,84	100,00		4.306.555
Kalimantan Barat	32,00	35,99	25,32	6,69	100,00		4.626.573
Kalimantan Tengah	30,74	38,62	24,98	5,66	100,00		2.322.790
Kalimantan Selatan	28,94	37,58	26,79	6,69	100,00		3.401.045
Kalimantan Timur	30,82	38,94	25,84	4,40	100,00		3.043.391
Sulawesi Utara	27,40	32,72	30,80	9,08	100,00		2.225.491
Sulawesi Tengah	33,19	35,83	24,79	6,19	100,00		2.548.602
Sulawesi Selatan	31,52	34,45	25,13	8,90	100,00		7.771.671
Sulawesi Tenggara	35,12	36,40	22,10	6,39	100,00		2.256.067
Gorontalo	32,60	34,98	26,32	6,10	100,00		893.629
Sulawesi Barat	36,70	34,89	22,21	6,20	100,00		1.027.390
Maluku	36,80	33,44	23,09	6,66	100,00		1.329.817
Maluku Utara	35,28	37,42	22,29	5,01	100,00		936.910
Irian Jaya Barat	38,43	36,68	22,24	2,65	100,00		708.499
Papua	37,19	38,22	22,64	1,94	100,00		1.995.990
INDONESIA	29,13	34,52	27,80	8,55	100,00	228.018.900	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nangroe Aceh Darussalam	5,08	5,71	5,40	7,00	8,33	7,67	6,44	7,58	7,02
Sumatera Utara	5,16	7,06	6,11	5,98	7,89	6,94	5,60	7,51	6,55
Sumatera Barat	6,58	9,24	7,94	8,61	10,37	9,51	7,91	9,98	8,97
Riau	4,93	5,11	5,02	5,49	5,13	5,32	5,21	5,12	5,17
Jambi	6,18	6,35	6,27	5,89	6,16	6,02	5,98	6,22	6,10
Sumatera Selatan	6,21	7,36	6,79	7,31	7,31	7,31	6,89	7,33	7,11
Bengkulu	4,90	5,71	5,31	6,66	6,82	6,74	6,06	6,41	6,23
Lampung	6,64	7,47	7,05	8,61	8,53	8,57	8,09	8,24	8,16
Bangka Belitung	7,56	7,22	7,39	6,00	6,08	6,04	6,74	6,63	6,69
Kepulauan Riau	4,29	3,55	3,90	7,18	5,82	6,50	5,68	4,59	5,13
DKI Jakarta	6,24	6,08	6,16				6,24	6,08	6,16
Jawa Barat	6,90	7,23	7,07	9,88	10,33	10,10	8,14	8,50	8,32
Jawa Tengah	9,16	10,63	9,91	11,29	13,25	12,27	10,26	11,97	11,12
DI Yogyakarta	10,44	13,38	11,90	17,91	18,69	18,31	13,05	15,31	14,19
Jawa Timur	9,12	11,06	10,11	11,20	13,61	12,43	10,18	12,36	11,30
Banten	5,67	5,25	5,46	6,96	7,77	7,36	6,19	6,24	6,21
Bali	7,92	9,43	8,67	12,49	13,30	12,90	9,83	11,08	10,46
Nusa Tenggara Barat	6,97	7,71	7,35	9,31	9,08	9,19	8,31	8,52	8,42
Nusa Tenggara Timur	5,00	5,09	5,04	8,19	8,70	8,45	7,61	8,06	7,84
Kalimantan Barat	6,72	7,06	6,89	7,01	6,20	6,61	6,93	6,44	6,69
Kalimantan Tengah	4,95	4,98	4,97	6,52	5,49	6,02	5,99	5,32	5,66
Kalimantan Selatan	5,69	7,02	6,38	6,07	7,75	6,91	5,92	7,44	6,69
Kalimantan Timur	3,71	3,81	3,75	5,90	5,00	5,47	4,54	4,25	4,40
Sulawesi Utara	6,92	9,60	8,26	9,21	10,24	9,71	8,23	9,96	9,08
Sulawesi Tengah	4,98	5,38	5,17	6,48	6,45	6,46	6,17	6,22	6,19
Sulawesi Selatan	6,18	7,76	7,00	8,64	10,87	9,80	7,85	9,87	8,90
Sulawesi Tenggara	3,81	5,47	4,67	6,50	7,29	6,91	5,89	6,87	6,39
Sulawesi Barat	5,56	8,04	6,83	5,39	6,15	5,77	5,44	6,76	6,10
Gorontalo	5,93	8,10	7,05	5,50	6,05	5,77	5,64	6,75	6,20
Maluku	5,29	6,01	5,66	6,62	7,42	7,02	6,28	7,05	6,66
Maluku Utara	4,56	4,25	4,40	5,07	5,48	5,27	4,92	5,10	5,01
Irian Jaya Barat	3,46	2,78	3,12	3,04	1,94	2,51	3,14	2,13	2,65
Papua	3,07	2,63	2,86	1,91	1,42	1,68	2,17	1,70	1,94
INDONESIA	7,13	8,11	7,63	8,86	9,98	9,42	8,03	9,07	8,55

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2008

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,64	56,53	2,76	40,07	100,00
Sumatera Utara	0,95	56,31	1,82	40,93	100,00
Sumatera Barat	0,47	55,44	3,90	40,19	100,00
R i a u	0,80	63,12	2,79	33,29	100,00
J a m b i	0,58	59,81	3,05	36,56	100,00
Sumatera Selatan	0,41	64,92	1,78	32,89	100,00
Bengkulu	0,27	62,59	2,19	34,94	100,00
Lampung	0,25	65,11	1,82	32,82	100,00
Bangka Belitung	1,44	61,18	1,87	35,52	100,00
Kepulauan Riau	0,70	66,10	1,98	31,22	100,00
DKI Jakarta	1,00	62,68	2,41	33,90	100,00
Jawa Barat	0,39	63,72	2,65	33,25	100,00
Jawa Tengah	0,65	59,37	2,09	37,88	100,00
DI Yogyakarta	1,45	64,05	2,06	32,44	100,00
Jawa Timur	0,67	55,79	2,69	40,85	100,00
Banten	0,71	62,92	3,56	32,81	100,00
B a l i	3,01	65,51	1,34	30,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,64	60,96	6,59	30,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,68	63,89	1,70	31,74	100,00
Kalimantan Barat	1,66	63,59	1,51	33,25	100,00
Kalimantan Tengah	0,94	65,83	1,49	31,74	100,00
Kalimantan Selatan	0,88	49,83	3,57	45,72	100,00
Kalimantan Timur	0,94	62,10	2,80	34,16	100,00
Sulawesi Utara	2,66	63,46	1,96	31,92	100,00
Sulawesi Tengah	2,15	59,11	3,06	35,67	100,00
Sulawesi Selatan	2,90	55,86	3,75	37,49	100,00
Sulawesi Tenggara	1,70	59,10	2,78	36,42	100,00
Sulawesi Barat	3,69	58,05	2,36	35,90	100,00
Gorontalo	2,93	52,22	4,48	40,37	100,00
Maluku	2,45	63,77	2,27	31,51	100,00
Maluku Utara	2,01	56,84	3,25	37,90	100,00
Irian Jaya Barat	1,48	61,08	0,66	36,77	100,00
Papua	0,43	68,19	1,51	29,87	100,00
INDONESIA	0,90	60,05	2,56	36,48	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2008

Provinsi	Kepala RT	Istri/Suami	Mertua/ Orangtua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	73,26	14,29	10,98	1,47	100,00
Sumatera Utara	60,99	18,95	18,02	2,05	100,00
Sumatera Barat	57,61	15,85	23,33	3,21	100,00
R i a u	61,08	15,38	20,50	3,03	100,00
J a m b i	61,53	16,32	19,85	2,31	100,00
Sumatera Selatan	54,27	18,76	24,48	2,49	100,00
Bengkulu	57,56	18,11	23,29	1,03	100,00
Lampung	59,50	19,91	18,23	2,36	100,00
Bangka Belitung	62,51	18,62	17,14	1,73	100,00
Kepulauan Riau	67,53	15,84	14,44	2,19	100,00
DKI Jakarta	64,51	18,92	13,72	2,85	100,00
Jawa Barat	65,09	19,02	13,66	2,23	100,00
Jawa Tengah	58,89	19,10	19,02	2,99	100,00
DI Yogyakarta	58,16	23,36	15,89	2,59	100,00
Jawa Timur	58,05	16,86	20,89	4,20	100,00
Banten	63,01	17,97	16,21	2,80	100,00
B a l i	42,57	19,44	32,11	5,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,62	20,02	13,13	3,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,02	18,65	21,77	5,56	100,00
Kalimantan Barat	53,44	16,33	24,87	5,36	100,00
Kalimantan Tengah	63,69	17,62	16,72	1,97	100,00
Kalimantan Selatan	65,35	12,42	18,45	3,79	100,00
Kalimantan Timur	60,62	15,16	19,63	4,60	100,00
Sulawesi Utara	53,70	21,97	19,55	4,78	100,00
Sulawesi Tengah	57,96	17,03	21,05	3,95	100,00
Sulawesi Selatan	56,45	18,48	19,15	5,92	100,00
Sulawesi Tenggara	58,21	16,44	21,06	4,29	100,00
Gorontalo	53,43	17,03	21,70	7,84	100,00
Sulawesi Barat	62,08	14,13	17,71	6,08	100,00
Maluku	49,65	19,09	26,02	5,24	100,00
Maluku Utara	53,34	15,70	25,59	5,37	100,00
Irian Jaya Barat	69,61	10,26	16,79	3,33	100,00
Papua	67,93	15,22	15,20	1,64	100,00
INDONESIA	59,90	18,24	18,56	3,31	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.1.1. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Perkotaan
							(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	11,72	29,94	27,13	14,43	12,42	4,37	100,00
Sumatera Utara	9,12	26,08	27,87	14,01	17,85	5,07	100,00
Sumatera Barat	5,75	27,91	26,93	14,52	18,67	6,22	100,00
Riau	11,36	39,09	22,19	12,15	12,17	3,03	100,00
Jambi	18,27	28,02	27,07	15,84	7,47	3,33	100,00
Sumatera Selatan	16,28	32,16	27,10	7,99	12,75	3,72	100,00
Bengkulu	18,54	40,39	18,18	9,15	12,32	1,41	100,00
Lampung	19,93	32,62	23,46	9,14	11,89	2,96	100,00
Bangka Belitung	19,33	25,22	35,21	11,66	8,26	0,32	100,00
Kepulauan Riau	23,22	22,48	31,93	11,60	9,11	1,67	100,00
DKI Jakarta	11,56	8,10	31,58	14,76	20,57	13,43	100,00
Jawa Barat	20,13	30,40	24,93	7,92	11,48	5,14	100,00
Jawa Tengah	35,96	27,27	20,11	9,26	4,40	3,01	100,00
DI Yogyakarta	35,38	11,54	24,83	9,38	10,56	8,32	100,00
Jawa Timur	32,44	27,86	20,74	10,84	7,99	0,13	100,00
Banten	27,46	20,69	17,95	5,36	16,56	11,97	100,00
Bali	37,42	9,79	35,78	6,30	7,15	3,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,26	17,87	18,48	3,26	3,93	2,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,41	25,19	25,13	14,14	18,64	5,49	100,00
Kalimantan Barat	32,31	27,74	19,76	8,15	8,83	3,22	100,00
Kalimantan Tengah	12,68	23,45	38,15	9,65	11,86	4,20	100,00
Kalimantan Selatan	17,59	52,12	3,66	13,01	9,77	3,84	100,00
Kalimantan Timur	17,65	21,84	25,44	12,82	16,51	5,74	100,00
Sulawesi Utara	0,88	27,65	24,11	17,47	21,60	8,28	100,00
Sulawesi Tengah	5,96	44,28	8,28	13,61	20,16	7,71	100,00
Sulawesi Selatan	22,95	23,78	19,80	9,41	17,91	6,15	100,00
Sulawesi Tenggara	27,12	18,09	28,31	7,51	13,29	5,68	100,00
Gorontalo	4,03	55,96	5,52	14,65	17,50	2,34	100,00
Sulawesi Barat	28,79	52,20	1,12	6,15	8,50	3,24	100,00
Maluku	8,82	11,17	37,09	14,77	18,97	9,17	100,00
Maluku Utara	13,06	24,34	26,30	13,32	15,86	7,11	100,00
Irian Jaya Barat	15,54	15,11	28,43	16,30	19,28	5,34	100,00
Papua	8,55	15,72	30,16	16,14	25,10	4,32	100,00
INDONESIA	25,59	26,14	23,19	9,98	10,72	4,38	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.1.2. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Perdesaan
							Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	29,11	42,35	19,48	4,78	3,30	0,98	100,00
Sumatera Utara	19,95	41,66	24,39	8,04	5,09	0,87	100,00
Sumatera Barat	15,58	47,78	22,02	7,13	6,19	1,30	100,00
Riau	23,93	64,00	4,46	3,86	2,96	0,79	100,00
Jambi	32,98	41,74	18,56	3,13	2,58	1,01	100,00
Sumatera Selatan	25,39	62,31	6,93	3,16	1,84	0,38	100,00
Bengkulu	32,76	46,79	14,20	4,06	1,43	0,76	100,00
Lampung	33,88	42,11	17,97	3,40	2,17	0,48	100,00
Bangka Belitung	30,33	47,00	19,33	2,35	0,98	-	100,00
Kepulauan Riau	31,02	32,75	33,64	1,05	0,97	0,57	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	33,41	47,90	14,22	1,71	2,20	0,56	100,00
Jawa Tengah	45,60	37,64	13,45	2,82	0,14	0,36	100,00
DI Yogyakarta	51,38	15,68	24,57	3,81	2,89	1,67	100,00
Jawa Timur	51,86	31,14	13,03	2,67	1,30	-	100,00
Banten	46,60	43,17	3,49	2,59	3,13	1,02	100,00
Bali	53,48	24,38	17,33	2,54	1,67	0,60	100,00
Nusa Tenggara Barat	59,96	25,73	10,85	2,12	1,01	0,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	42,69	37,88	15,21	2,02	1,97	0,22	100,00
Kalimantan Barat	52,83	32,37	11,07	2,16	1,36	0,20	100,00
Kalimantan Tengah	20,22	39,11	33,71	3,88	2,51	0,58	100,00
Kalimantan Selatan	28,93	63,57	2,40	3,09	1,59	0,41	100,00
Kalimantan Timur	37,39	34,98	20,25	3,37	3,48	0,53	100,00
Sulawesi Utara	3,30	51,65	24,75	9,20	8,98	2,12	100,00
Sulawesi Tengah	18,76	67,55	2,23	6,46	4,36	0,64	100,00
Sulawesi Selatan	50,03	37,98	5,05	3,25	3,16	0,53	100,00
Sulawesi Tenggara	48,68	32,19	13,41	2,22	3,01	0,48	100,00
Gorontalo	13,59	73,14	3,25	4,26	5,08	0,68	100,00
Sulawesi Barat	38,43	48,01	5,25	3,83	3,88	0,61	100,00
Maluku	11,36	41,87	34,41	5,43	5,99	0,94	100,00
Maluku Utara	24,78	45,77	22,09	3,39	3,42	0,55	100,00
Irian Jaya Barat	35,65	45,94	3,71	13,71	0,99	-	100,00
Papua	35,16	28,28	23,81	5,47	6,20	1,07	100,00
INDONESIA	40,33	39,85	14,09	3,19	2,06	0,48	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.1.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	Perkotaan + Perdesaan	
						(1)	(2)
Nanggro Aceh Darussalam	25,26	39,60	21,17	6,92	5,32	1,73	100,00
Sumatera Utara	15,30	34,97	25,89	10,60	10,57	2,68	100,00
Sumatera Barat	12,59	41,74	23,52	9,38	9,98	2,79	100,00
R i a u	17,78	51,81	13,14	7,92	7,47	1,89	100,00
J a m b i	28,09	37,17	21,39	7,36	4,21	1,78	100,00
Sumatera Selatan	22,03	51,16	14,38	4,94	5,87	1,61	100,00
Bengkulu	28,50	44,87	15,40	5,58	4,70	0,96	100,00
Lampung	30,62	39,89	19,25	4,74	4,44	1,06	100,00
Bangka Belitung	24,52	35,49	27,72	7,27	4,83	0,17	100,00
Kepulauan Riau	27,87	28,62	32,95	5,30	4,25	1,01	100,00
DKI Jakarta	11,56	8,10	31,58	14,76	20,57	13,43	100,00
Jawa Barat	26,78	39,16	19,57	4,81	6,84	2,85	100,00
Jawa Tengah	41,42	33,15	16,33	5,61	1,98	1,51	100,00
DI Yogyakarta	42,75	13,45	24,71	6,81	7,02	5,26	100,00
Jawa Timur	43,36	29,70	16,40	6,24	4,23	0,06	100,00
Banten	36,48	31,29	11,14	4,06	10,23	6,81	100,00
B a l i	45,80	17,40	26,16	4,34	4,29	2,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	57,87	22,86	13,64	2,53	2,08	1,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,08	36,42	16,36	3,42	3,90	0,83	100,00
Kalimantan Barat	46,96	31,05	13,56	3,88	3,50	1,06	100,00
Kalimantan Tengah	17,97	34,44	35,03	5,60	5,30	1,66	100,00
Kalimantan Selatan	24,44	59,04	2,90	7,02	4,83	1,77	100,00
Kalimantan Timur	26,92	28,01	23,00	8,38	10,39	3,30	100,00
Sulawesi Utara	2,34	42,18	24,50	12,46	13,96	4,55	100,00
Sulawesi Tengah	16,52	63,47	3,29	7,72	7,13	1,88	100,00
Sulawesi Selatan	43,17	34,38	8,79	4,81	6,90	1,95	100,00
Sulawesi Tenggara	45,06	29,82	15,91	3,11	4,74	1,35	100,00
Gorontalo	10,24	67,11	4,05	7,90	9,43	1,26	100,00
Sulawesi Barat	34,77	49,60	3,68	4,71	5,63	1,60	100,00
Maluku	10,80	35,07	35,00	7,50	8,87	2,76	100,00
Maluku Utara	21,73	40,18	23,19	5,98	6,67	2,26	100,00
Irian Jaya Barat	30,25	37,65	10,35	14,40	5,90	1,43	100,00
Papua	26,28	24,09	25,93	9,03	12,51	2,16	100,00
INDONESIA	33,98	33,95	18,01	6,11	5,79	2,16	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.1. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perkotaan - Laki-Laki	
			Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	19,07	73,30	7,63	100,00
Sumatera Utara	59,40	35,61	4,99	100,00
Sumatera Barat	50,51	45,88	3,61	100,00
R i a u	37,15	58,21	4,64	100,00
J a m b i	46,36	43,45	10,18	100,00
Sumatera Selatan	49,31	47,16	3,52	100,00
Bengkulu	57,90	28,61	13,49	100,00
Lampung	53,52	37,73	8,74	100,00
Bangka Belitung	39,25	51,07	9,68	100,00
Kepulauan Riau	22,21	67,03	10,76	100,00
DKI Jakarta	40,96	56,75	2,28	100,00
Jawa Barat	33,57	56,56	9,87	100,00
Jawa Tengah	46,06	33,16	20,78	100,00
DI Yogyakarta	44,87	33,79	21,34	100,00
Jawa Timur	45,86	34,25	19,90	100,00
Banten	34,39	50,41	15,20	100,00
B a l i	31,45	46,08	22,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,67	21,20	38,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	80,14	9,20	10,67	100,00
Kalimantan Barat	44,04	34,50	21,47	100,00
Kalimantan Tengah	47,00	47,00	6,00	100,00
Kalimantan Selatan	29,15	61,68	9,17	100,00
Kalimantan Timur	46,12	50,23	3,66	100,00
Sulawesi Utara	84,92	13,53	1,55	100,00
Sulawesi Tengah	42,02	55,53	2,45	100,00
Sulawesi Selatan	47,22	37,03	15,74	100,00
Sulawesi Tenggara	46,98	40,87	12,16	100,00
Gorontalo	49,64	43,45	6,92	100,00
Sulawesi Barat	59,42	18,73	21,85	100,00
Maluku	68,52	23,65	7,83	100,00
Maluku Utara	37,79	55,70	6,51	100,00
Irian Jaya Barat	78,14	14,62	7,24	100,00
Papua	73,31	23,60	3,09	100,00
INDONESIA	42,85	42,96	14,18	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.2. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perkotaan - Perempuan	
			Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	27,03	54,82	18,15	100,00
Sumatera Utara	51,77	30,45	17,78	100,00
Sumatera Barat	49,07	37,18	13,75	100,00
Riau	34,36	39,81	25,84	100,00
Jambi	32,38	29,96	37,66	100,00
Sumatera Selatan	43,46	39,19	17,36	100,00
Bengkulu	52,87	16,54	30,60	100,00
Lampung	39,27	28,53	32,20	100,00
Bangka Belitung	36,29	34,89	28,82	100,00
Kepulauan Riau	20,83	53,80	25,37	100,00
DKI Jakarta	32,91	51,43	15,67	100,00
Jawa Barat	23,69	48,53	27,78	100,00
Jawa Tengah	27,62	17,75	54,63	100,00
DI Yogyakarta	25,37	17,96	56,67	100,00
Jawa Timur	29,84	19,25	50,91	100,00
Banten	26,96	42,92	30,12	100,00
Bali	25,71	16,59	57,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,45	7,52	72,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,17	7,57	25,26	100,00
Kalimantan Barat	32,27	19,71	48,02	100,00
Kalimantan Tengah	45,77	31,10	23,13	100,00
Kalimantan Selatan	21,40	47,07	31,53	100,00
Kalimantan Timur	34,57	39,61	25,82	100,00
Sulawesi Utara	83,05	12,96	4,00	100,00
Sulawesi Tengah	47,03	40,49	12,48	100,00
Sulawesi Selatan	38,73	27,93	33,34	100,00
Sulawesi Tenggara	33,73	29,85	36,42	100,00
Gorontalo	37,88	45,71	16,41	100,00
Sulawesi Barat	35,75	15,53	48,72	100,00
Maluku	76,22	14,55	9,23	100,00
Maluku Utara	23,22	49,10	27,68	100,00
Irian Jaya Barat	63,86	5,91	30,23	100,00
Papua	64,81	11,99	23,20	100,00
INDONESIA	31,08	30,16	38,76	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Perkotaan - Laki-laki+Perempuan				
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	23,29	63,50	13,21	100,00
Sumatera Utara	55,00	32,64	12,36	100,00
Sumatera Barat	49,65	40,69	9,65	100,00
Riau	35,74	48,95	15,30	100,00
Jambi	39,27	36,61	24,13	100,00
Sumatera Selatan	46,11	42,80	11,08	100,00
Bengkulu	55,15	22,02	22,83	100,00
Lampung	46,03	32,89	21,07	100,00
Bangka Belitung	37,83	43,30	18,87	100,00
Kepulauan Riau	21,55	60,78	17,67	100,00
DKI Jakarta	36,93	54,08	8,99	100,00
Jawa Barat	28,53	52,46	19,02	100,00
Jawa Tengah	35,98	24,73	39,28	100,00
DI Yogyakarta	33,93	24,91	41,16	100,00
Jawa Timur	36,93	25,89	37,18	100,00
Banten	30,81	46,80	22,39	100,00
Bali	28,35	30,14	41,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,70	13,78	56,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	73,65	8,38	17,97	100,00
Kalimantan Barat	38,03	26,95	35,02	100,00
Kalimantan Tengah	46,39	39,16	14,45	100,00
Kalimantan Selatan	24,75	53,40	21,85	100,00
Kalimantan Timur	40,48	45,04	14,48	100,00
Sulawesi Utara	83,83	13,20	2,98	100,00
Sulawesi Tengah	44,58	47,85	7,57	100,00
Sulawesi Selatan	42,36	31,82	25,82	100,00
Sulawesi Tenggara	38,99	34,22	26,78	100,00
Gorontalo	42,54	44,82	12,65	100,00
Sulawesi Barat	45,40	16,84	37,76	100,00
Maluku	72,63	18,79	8,58	100,00
Maluku Utara	30,71	52,49	16,79	100,00
Irian Jaya Barat	71,81	10,76	17,43	100,00
Papua	69,55	18,46	11,99	100,00
INDONESIA	36,54	36,10	27,35	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.4. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perdesaan - Laki-laki	
			Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	21,28	64,16	14,56	100,00
Sumatera Utara	62,52	27,31	10,17	100,00
Sumatera Barat	35,94	51,21	12,85	100,00
R i a u	25,83	60,93	13,24	100,00
J a m b i	38,58	42,08	19,34	100,00
Sumatera Selatan	47,00	43,45	9,55	100,00
Bengkulu	54,13	24,06	21,81	100,00
Lampung	44,50	34,25	21,25	100,00
Bangka Belitung	30,49	57,68	11,83	100,00
Kepulauan Riau	38,64	51,68	9,69	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	32,42	49,50	18,08	100,00
Jawa Tengah	39,13	27,56	33,31	100,00
DI Yogyakarta	37,05	29,95	33,00	100,00
Jawa Timur	35,87	25,66	38,46	100,00
Banten	19,90	56,47	23,63	100,00
B a l i	27,35	37,47	35,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,73	17,87	45,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,07	2,51	38,42	100,00
Kalimantan Barat	44,40	20,49	35,11	100,00
Kalimantan Tengah	58,33	28,57	13,09	100,00
Kalimantan Selatan	30,60	51,40	18,00	100,00
Kalimantan Timur	38,61	36,50	24,89	100,00
Sulawesi Utara	84,05	11,80	4,14	100,00
Sulawesi Tengah	57,05	29,32	13,64	100,00
Sulawesi Selatan	30,86	28,44	40,71	100,00
Sulawesi Tenggara	45,56	21,67	32,77	100,00
Gorontalo	45,53	33,43	21,04	100,00
Sulawesi Barat	53,72	15,21	31,08	100,00
Maluku	65,76	24,98	9,25	100,00
Maluku Utara	42,38	38,32	19,30	100,00
Irian Jaya Barat	57,72	21,96	20,32	100,00
Papua	55,72	16,12	28,16	100,00
INDONESIA	39,02	33,72	27,25	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.5. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perdesaan - Perempuan	
			Tidak Dapat	Jumlah
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	14,57	50,82	34,61	100,00
Sumatera Utara	49,01	16,95	34,03	100,00
Sumatera Barat	28,95	44,67	26,38	100,00
R i a u	18,18	46,37	35,46	100,00
J a m b i	19,73	26,20	54,07	100,00
Sumatera Selatan	34,75	34,94	30,31	100,00
Bengkulu	35,66	13,82	50,51	100,00
Lampung	28,71	16,22	55,07	100,00
Bangka Belitung	18,69	41,42	39,89	100,00
Kepulauan Riau	28,63	31,77	39,60	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	19,74	35,14	45,12	100,00
Jawa Tengah	19,91	11,86	68,23	100,00
DI Yogyakarta	15,49	6,15	78,36	100,00
Jawa Timur	17,13	10,19	72,68	100,00
Banten	10,37	33,97	55,67	100,00
B a l i	18,53	8,59	72,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,45	3,74	83,81	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,60	1,20	61,20	100,00
Kalimantan Barat	18,86	9,49	71,65	100,00
Kalimantan Tengah	45,71	22,77	31,52	100,00
Kalimantan Selatan	17,04	36,53	46,43	100,00
Kalimantan Timur	25,77	21,37	52,87	100,00
Sulawesi Utara	85,57	7,79	6,64	100,00
Sulawesi Tengah	43,17	23,66	33,17	100,00
Sulawesi Selatan	19,62	17,98	62,40	100,00
Sulawesi Tenggara	20,77	9,81	69,42	100,00
Gorontalo	32,72	39,71	27,57	100,00
Sulawesi Barat	32,31	9,57	58,12	100,00
Maluku	66,51	14,54	18,95	100,00
Maluku Utara	29,95	13,84	56,21	100,00
Irian Jaya Barat	35,74	1,53	62,73	100,00
Papua	49,87	5,99	44,13	100,00
INDONESIA	23,12	19,13	57,75	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.6. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perdesaan - Laki-laki+Perempuan	
			Tidak Dapat	Jumlah
			(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	17,58	56,82	25,60	100,00
Sumatera Utara	54,83	21,41	23,76	100,00
Sumatera Barat	32,05	47,58	20,37	100,00
Riau	22,24	54,10	23,66	100,00
Jambi	29,16	34,15	36,69	100,00
Sumatera Selatan	41,01	39,29	19,69	100,00
Bengkulu	45,15	19,08	35,77	100,00
Lampung	36,98	25,66	37,36	100,00
Bangka Belitung	24,73	49,74	25,54	100,00
Kepulauan Riau	34,18	42,81	23,01	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	26,03	42,26	31,71	100,00
Jawa Tengah	28,73	19,06	52,21	100,00
DI Yogyakarta	25,70	17,42	56,88	100,00
Jawa Timur	25,41	17,02	57,56	100,00
Banten	14,96	44,81	40,23	100,00
Bali	22,76	22,45	54,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,03	10,48	65,50	100,00
Nusa Tenggara Timur	47,93	1,83	50,24	100,00
Kalimantan Barat	32,77	15,48	51,74	100,00
Kalimantan Tengah	52,75	26,01	21,24	100,00
Kalimantan Selatan	23,03	43,10	33,87	100,00
Kalimantan Timur	33,04	29,93	37,03	100,00
Sulawesi Utara	84,83	9,75	5,42	100,00
Sulawesi Tengah	50,28	26,56	23,17	100,00
Sulawesi Selatan	24,39	22,42	53,19	100,00
Sulawesi Tenggara	32,23	15,29	52,48	100,00
Gorontalo	38,79	36,73	24,48	100,00
Sulawesi Barat	42,51	12,26	45,23	100,00
Maluku	66,15	19,52	14,33	100,00
Maluku Utara	36,09	25,93	37,98	100,00
Irian Jaya Barat	49,44	14,27	36,29	100,00
Papua	53,33	11,99	34,68	100,00
INDONESIA	30,62	26,01	43,38	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.7. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perkotaan+Perdesaan - Laki-Laki	
			Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	20,77	66,25	12,98	100,00
Sumatera Utara	61,19	30,84	7,97	100,00
Sumatera Barat	40,08	49,70	10,22	100,00
Riau	31,18	59,64	9,18	100,00
Jambi	41,14	42,53	16,32	100,00
Sumatera Selatan	47,79	44,72	7,49	100,00
Bengkulu	55,17	25,31	19,52	100,00
Lampung	46,45	35,00	18,55	100,00
Bangka Belitung	35,16	54,16	10,68	100,00
Kepulauan Riau	32,22	57,68	10,11	100,00
DKI Jakarta	40,96	56,75	2,28	100,00
Jawa Barat	32,99	53,00	14,01	100,00
Jawa Tengah	42,11	29,96	27,93	100,00
DI Yogyakarta	41,12	31,95	26,93	100,00
Jawa Timur	40,25	29,42	30,33	100,00
Banten	27,82	53,15	19,02	100,00
Bali	29,27	41,50	29,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,13	19,06	42,81	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,59	3,31	35,10	100,00
Kalimantan Barat	44,30	24,20	31,50	100,00
Kalimantan Tengah	55,18	33,70	11,12	100,00
Kalimantan Selatan	30,03	55,42	14,55	100,00
Kalimantan Timur	42,40	43,43	14,16	100,00
Sulawesi Utara	84,36	12,42	3,21	100,00
Sulawesi Tengah	54,51	33,74	11,75	100,00
Sulawesi Selatan	35,02	30,62	34,36	100,00
Sulawesi Tenggara	45,77	24,51	29,72	100,00
Gorontalo	46,81	36,55	16,64	100,00
Sulawesi Barat	55,68	16,42	27,90	100,00
Maluku	66,36	24,69	8,94	100,00
Maluku Utara	41,15	42,99	15,86	100,00
Irian Jaya Barat	62,76	20,15	17,09	100,00
Papua	61,36	18,52	20,12	100,00
INDONESIA	40,66	37,67	21,67	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.8. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Perkotaan+Perdesaan - Perempuan	
			Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	17,25	51,68	31,07	100,00
Sumatera Utara	50,21	22,80	27,00	100,00
Sumatera Barat	35,36	42,28	22,36	100,00
Riau	26,38	43,04	30,58	100,00
Jambi	23,98	27,46	48,55	100,00
Sumatera Selatan	38,20	36,62	25,18	100,00
Bengkulu	41,25	14,70	44,05	100,00
Lampung	31,36	19,31	49,32	100,00
Bangka Belitung	27,92	38,00	34,08	100,00
Kepulauan Riau	25,38	40,96	33,66	100,00
DKI Jakarta	32,91	51,43	15,67	100,00
Jawa Barat	21,73	41,87	36,40	100,00
Jawa Tengah	23,27	14,42	62,31	100,00
DI Yogyakarta	20,97	12,71	66,32	100,00
Jawa Timur	22,69	14,15	63,17	100,00
Banten	18,85	38,54	42,61	100,00
Bali	22,03	12,49	65,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,44	5,15	79,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,91	1,91	57,18	100,00
Kalimantan Barat	23,02	12,66	64,32	100,00
Kalimantan Tengah	45,73	25,45	28,82	100,00
Kalimantan Selatan	18,78	40,74	40,48	100,00
Kalimantan Timur	30,69	31,58	37,73	100,00
Sulawesi Utara	84,49	9,99	5,52	100,00
Sulawesi Tengah	43,88	26,72	29,40	100,00
Sulawesi Selatan	24,45	20,49	55,06	100,00
Sulawesi Tenggara	23,16	13,50	63,33	100,00
Gorontalo	34,69	42,01	23,30	100,00
Sulawesi Barat	33,72	12,01	54,28	100,00
Maluku	68,70	14,54	16,76	100,00
Maluku Utara	28,25	22,76	48,99	100,00
Irian Jaya Barat	44,23	2,85	52,92	100,00
Papua	55,13	8,10	36,77	100,00
INDONESIA	26,58	23,92	49,50	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 4.2.9. Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2008

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan - Laki-laki+Perempuan			
	Huruf Latin	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	18,85	58,30	22,85	100,00
Sumatera Utara	54,90	26,23	18,86	100,00
Sumatera Barat	37,40	45,49	17,11	100,00
R i a u	28,85	51,58	19,57	100,00
J a m b i	32,53	34,97	32,51	100,00
Sumatera Selatan	42,90	40,59	16,51	100,00
Bengkulu	48,15	19,96	31,89	100,00
Lampung	39,09	27,35	33,56	100,00
Bangka Belitung	31,65	46,34	22,01	100,00
Kepulauan Riau	29,09	50,05	20,86	100,00
DKI Jakarta	36,93	54,08	8,99	100,00
Jawa Barat	27,28	47,35	25,37	100,00
Jawa Tengah	31,87	21,52	46,61	100,00
DI Yogyakarta	30,14	21,46	48,40	100,00
Jawa Timur	30,45	20,90	48,64	100,00
Banten	23,34	45,86	30,79	100,00
B a l i	25,44	26,13	48,43	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,10	11,68	62,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	50,90	2,59	46,51	100,00
Kalimantan Barat	34,28	18,77	46,95	100,00
Kalimantan Tengah	50,86	29,93	19,21	100,00
Kalimantan Selatan	23,71	47,18	29,11	100,00
Kalimantan Timur	36,98	37,94	25,07	100,00
Sulawesi Utara	84,43	11,11	4,46	100,00
Sulawesi Tengah	49,28	30,29	20,43	100,00
Sulawesi Selatan	28,94	24,80	46,26	100,00
Sulawesi Tenggara	33,36	18,47	48,17	100,00
Gorontalo	40,10	39,57	20,33	100,00
Sulawesi Barat	43,61	14,00	42,39	100,00
Maluku	67,59	19,36	13,05	100,00
Maluku Utara	34,69	32,86	32,46	100,00
Irian Jaya Barat	55,45	13,32	31,23	100,00
Papua	58,74	14,15	27,11	100,00
INDONESIA	33,17	30,36	36,47	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.1. Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggro Aceh Darussalam	61,24	70,95	66,40	67,66	70,45	69,20	66,19	70,56	68,58
Sumatera Utara	45,68	50,41	48,40	57,82	55,66	56,59	52,66	53,39	53,07
Sumatera Barat	54,01	51,35	52,42	62,91	64,06	63,55	60,38	60,01	60,17
Riau	54,64	56,73	55,69	58,76	56,44	57,67	56,81	56,59	56,70
Jambi	43,18	46,44	44,83	58,48	51,30	54,89	53,44	49,67	51,54
Sumatera Selatan	65,08	63,50	64,22	57,44	55,54	56,51	60,06	58,69	59,36
Bengkulu	60,93	55,08	57,74	54,37	53,31	53,85	56,17	53,89	55,02
Lampung	61,07	61,21	61,15	59,00	58,94	58,97	59,45	59,51	59,48
Bangka Belitung	61,03	52,98	57,16	66,15	67,92	67,01	63,42	60,09	61,81
Kepulauan Riau	55,15	57,97	56,48	57,96	57,26	57,65	56,86	57,55	57,18
DKI Jakarta	59,46	59,87	59,67	-	-	-	59,46	59,87	59,67
Jawa Barat	52,74	54,20	53,49	60,65	60,73	60,69	56,73	57,45	57,09
Jawa Tengah	51,02	52,23	51,68	52,85	50,09	51,36	52,06	51,02	51,50
DI Yogyakarta	54,48	53,64	54,01	53,10	49,92	51,43	53,82	51,99	52,82
Jawa Timur	51,77	51,94	51,86	49,21	50,68	50,03	50,33	51,23	50,83
Banten	63,89	58,72	61,40	57,82	61,02	59,48	61,14	59,85	60,49
Bali	58,43	60,29	59,43	65,48	65,19	65,33	62,18	62,80	62,51
Nusa Tenggara Barat	69,35	62,59	65,68	66,08	67,39	66,77	67,25	65,59	66,37
Nusa Tenggara Timur	66,80	68,60	67,70	66,27	70,13	68,27	66,33	69,96	68,21
Kalimantan Barat	59,35	63,06	61,24	64,37	62,39	63,47	63,04	62,60	62,83
Kalimantan Tengah	48,92	42,25	45,63	49,86	45,82	48,08	49,60	44,67	47,35
Kalimantan Selatan	61,26	67,14	64,59	66,82	63,26	64,83	64,64	64,81	64,74
Kalimantan Timur	40,23	51,48	45,72	52,90	54,45	53,57	46,50	52,78	49,41
Sulawesi Utara	50,95	45,40	47,72	62,62	58,75	60,64	58,44	53,07	55,54
Sulawesi Tengah	71,65	61,52	66,48	63,18	61,40	62,31	64,61	61,42	63,04
Sulawesi Selatan	44,66	48,26	46,73	53,99	53,75	53,85	51,62	52,36	52,05
Sulawesi Tenggara	62,74	62,44	62,56	60,90	60,65	60,77	61,18	60,98	61,07
Gorontalo	58,56	65,80	62,93	77,47	72,54	74,87	71,58	69,96	70,69
Sulawesi Barat	46,79	46,06	46,36	57,23	62,61	60,05	53,64	55,84	54,85
Maluku	61,66	50,63	55,77	55,42	56,68	56,07	56,77	55,31	56,01
Maluku Utara	54,80	60,47	57,55	55,57	59,00	57,30	55,36	59,37	57,37
Irian Jaya Barat	62,16	63,46	62,74	46,18	50,32	47,74	50,13	54,29	51,77
Papua	60,48	64,32	62,18	53,91	51,57	52,95	56,01	56,05	56,03
INDONESIA	53,96	54,39	54,19	56,71	56,03	56,35	55,53	55,32	55,42

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.2. Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	42,73	45,93	44,43	47,80	43,34	45,34	46,64	43,89	45,14
Sumatera Utara	26,70	26,99	26,87	39,22	36,19	37,50	33,90	32,21	32,93
Sumatera Barat	28,85	23,68	25,77	34,03	34,26	34,16	32,56	30,89	31,61
Riau	27,51	29,73	28,62	38,41	33,26	36,00	33,25	31,47	32,39
Jambi	21,69	28,68	25,24	39,34	31,19	35,27	33,53	30,34	31,93
Sumatera Selatan	29,98	24,94	27,22	33,69	32,36	33,04	32,42	29,42	30,89
Bengkulu	45,20	35,37	39,83	40,37	35,90	38,20	41,70	35,73	38,69
Lampung	30,16	31,23	30,72	31,80	27,44	29,72	31,45	28,39	29,96
Bangka Belitung	29,12	30,76	29,91	39,00	30,71	34,95	33,74	30,74	32,29
Kepulauan Riau	25,66	30,77	28,08	30,16	27,02	28,76	28,40	28,58	28,48
DKI Jakarta	22,39	20,15	21,26	-	-	-	22,39	20,15	21,26
Jawa Barat	27,18	28,18	27,69	31,74	29,93	30,82	29,47	29,05	29,26
Jawa Tengah	24,36	25,24	24,84	27,70	24,57	26,00	26,27	24,86	25,50
DI Yogyakarta	19,76	21,53	20,75	23,33	22,80	23,05	21,47	22,10	21,81
Jawa Timur	26,14	24,99	25,50	26,96	25,66	26,24	26,60	25,37	25,91
Banten	28,13	24,74	26,50	32,61	32,34	32,47	30,16	28,46	29,31
Bali	35,22	35,97	35,62	42,09	43,88	43,02	38,88	40,02	39,48
Nusa Tenggara Barat	37,80	32,29	34,81	35,77	37,05	36,44	36,49	35,27	35,84
Nusa Tenggara Timur	39,41	34,83	37,12	46,52	50,13	48,39	45,67	48,42	47,09
Kalimantan Barat	28,54	31,89	30,25	46,15	42,08	44,30	41,49	38,92	40,28
Kalimantan Tengah	27,18	19,70	23,49	35,34	31,59	33,68	33,07	27,77	30,65
Kalimantan Selatan	27,14	26,32	26,68	33,35	31,82	32,50	30,92	29,63	30,19
Kalimantan Timur	25,34	27,45	26,37	32,99	34,71	33,74	29,12	30,65	29,83
Sulawesi Utara	30,91	25,14	27,55	45,78	36,90	41,22	40,45	31,89	35,83
Sulawesi Tengah	39,39	38,18	38,77	43,10	42,34	42,73	42,48	41,58	42,04
Sulawesi Selatan	22,73	23,90	23,40	32,66	29,16	30,64	30,13	27,83	28,81
Sulawesi Tenggara	36,56	31,48	33,50	41,53	43,80	42,75	40,79	41,53	41,20
Gorontalo	30,92	29,99	30,35	52,28	42,21	46,98	45,63	37,54	41,15
Sulawesi Barat	24,69	25,88	25,39	39,46	40,71	40,11	34,38	34,64	34,52
Maluku	30,65	21,24	25,62	34,96	34,22	34,57	34,02	31,29	32,59
Maluku Utara	37,82	37,73	37,78	47,34	49,39	48,38	44,78	46,44	45,62
Irian Jaya Barat	47,15	52,04	49,32	38,81	37,34	38,26	40,87	41,78	41,23
Papua	34,84	31,94	33,56	39,39	35,33	37,73	37,94	34,14	36,34
INDONESIA	26,69	26,32	26,49	32,65	30,34	31,43	30,11	28,60	29,30

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.3.1. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2008

Provinsi	Lamanya Hari Sakit (hari)						Perkotaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	38,09	38,45	7,60	4,75	11,12	100,00	
Sumatera Utara	35,65	30,29	8,89	4,36	20,80	100,00	
Sumatera Barat	34,03	31,62	9,57	9,41	15,37	100,00	
Riau	31,42	36,31	4,87	4,20	23,20	100,00	
Jambi	40,17	29,95	5,20	4,84	19,84	100,00	
Sumatera Selatan	43,79	30,79	7,01	7,81	10,60	100,00	
Bengkulu	28,27	39,68	6,96	6,59	18,49	100,00	
Lampung	33,74	38,30	8,57	4,64	14,75	100,00	
Bangka Belitung	46,83	24,61	3,05	5,20	20,31	100,00	
Kepulauan Riau	34,72	36,77	5,50	8,94	14,07	100,00	
DKI Jakarta	46,58	34,39	7,52	3,32	8,20	100,00	
Jawa Barat	33,58	36,90	8,55	4,72	16,25	100,00	
Jawa Tengah	40,61	29,75	5,48	5,06	19,10	100,00	
DI Yogyakarta	39,47	32,39	5,44	4,85	17,85	100,00	
Jawa Timur	34,55	32,13	8,69	5,36	19,27	100,00	
Banten	38,05	33,42	5,96	8,14	14,43	100,00	
Bali	42,84	31,04	7,60	3,68	14,84	100,00	
Nusa Tenggara Barat	28,70	40,79	9,62	5,36	15,52	100,00	
Nusa Tenggara Timur	27,75	37,97	8,94	2,56	22,77	100,00	
Kalimantan Barat	43,64	25,14	9,16	2,99	19,07	100,00	
Kalimantan Tengah	38,09	39,58	5,92	1,40	15,01	100,00	
Kalimantan Selatan	45,02	26,12	5,32	4,19	19,34	100,00	
Kalimantan Timur	30,25	37,93	2,71	10,04	19,07	100,00	
Sulawesi Utara	30,72	39,99	10,80	4,79	13,70	100,00	
Sulawesi Tengah	33,73	45,12	7,20	4,91	9,04	100,00	
Sulawesi Selatan	39,05	26,88	8,60	5,74	19,74	100,00	
Sulawesi Tenggara	34,61	36,51	10,55	2,39	15,93	100,00	
Gorontalo	49,21	27,66	15,31	-	7,82	100,00	
Sulawesi Barat	29,42	26,71	5,64	7,10	31,13	100,00	
Maluku	24,95	35,53	8,69	13,36	17,48	100,00	
Maluku Utara	29,64	32,73	5,45	11,46	20,73	100,00	
Irian Jaya Barat	42,83	43,60	8,17	2,70	2,70	100,00	
Papua	27,56	44,05	11,69	3,45	13,25	100,00	
INDONESIA	36,85	33,29	7,61	5,13	17,12	100,00	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.3.2. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2008

Provinsi	Lamanya Hari Sakit (hari)						Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	38,10	39,53	8,28	5,76	8,34	100,00	
Sumatera Utara	31,15	32,20	8,23	7,74	20,68	100,00	
Sumatera Barat	26,56	35,54	10,29	9,30	18,31	100,00	
Riau	36,27	34,53	8,70	5,98	14,52	100,00	
Jambi	33,67	39,66	11,32	4,10	11,25	100,00	
Sumatera Selatan	33,88	38,57	10,23	7,00	10,32	100,00	
Bengkulu	30,74	37,90	10,17	5,31	15,88	100,00	
Lampung	36,82	34,66	6,58	9,40	12,54	100,00	
Bangka Belitung	45,69	27,04	5,44	4,33	17,49	100,00	
Kepulauan Riau	29,96	34,39	3,77	5,21	26,67	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	32,58	31,96	9,22	8,77	17,48	100,00	
Jawa Tengah	37,54	31,53	8,53	5,74	16,66	100,00	
DI Yogyakarta	36,52	32,84	9,56	3,07	18,01	100,00	
Jawa Timur	30,94	34,80	8,42	5,81	20,03	100,00	
Banten	28,26	42,81	7,86	6,68	14,40	100,00	
Bali	44,42	33,00	8,37	3,99	10,22	100,00	
Nusa Tenggara Barat	28,15	33,84	10,21	5,40	22,40	100,00	
Nusa Tenggara Timur	25,01	44,42	14,10	6,21	10,24	100,00	
Kalimantan Barat	40,09	34,76	5,75	5,72	13,68	100,00	
Kalimantan Tengah	37,22	36,34	9,12	5,64	11,69	100,00	
Kalimantan Selatan	37,65	32,42	6,84	6,12	16,98	100,00	
Kalimantan Timur	34,43	33,06	9,31	6,80	16,40	100,00	
Sulawesi Utara	32,78	43,69	10,26	4,66	8,61	100,00	
Sulawesi Tengah	34,83	38,79	9,13	6,53	10,72	100,00	
Sulawesi Selatan	31,39	30,84	8,70	3,65	25,41	100,00	
Sulawesi Tenggara	32,50	35,34	13,43	5,98	12,75	100,00	
Gorontalo	32,98	36,34	14,79	8,10	7,79	100,00	
Sulawesi Barat	31,05	35,33	11,30	3,50	18,83	100,00	
Maluku	21,89	45,35	11,77	7,15	13,84	100,00	
Maluku Utara	23,56	42,54	12,26	4,99	16,65	100,00	
Irian Jaya Barat	41,56	28,90	8,71	10,41	10,41	100,00	
Papua	25,30	47,01	15,32	3,97	8,41	100,00	
INDONESIA	33,24	34,72	9,03	6,46	16,56	100,00	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.3.3. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2008

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan					
	Lamanya Hari Sakit (hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	38,09	39,29	8,13	5,54	8,95	100,00
Sumatera Utara	32,73	31,53	8,46	6,56	20,72	100,00
Sumatera Barat	28,41	34,57	10,11	9,33	17,58	100,00
Riau	34,17	35,30	7,04	5,21	18,27	100,00
Jambi	35,38	37,11	9,71	4,30	13,51	100,00
Sumatera Selatan	37,10	36,04	9,18	7,27	10,41	100,00
Bengkulu	29,98	38,45	9,18	5,70	16,69	100,00
Lampung	36,08	35,53	7,06	8,26	13,07	100,00
Bangka Belitung	46,25	25,85	4,27	4,76	18,87	100,00
Kepulauan Riau	31,85	35,34	4,46	6,69	21,67	100,00
DKI Jakarta	46,58	34,39	7,52	3,32	8,20	100,00
Jawa Barat	33,05	34,29	8,90	6,86	16,90	100,00
Jawa Tengah	38,84	30,78	7,25	5,45	17,69	100,00
DI Yogyakarta	38,03	32,61	7,45	3,98	17,93	100,00
Jawa Timur	32,49	33,65	8,53	5,62	19,70	100,00
Banten	32,94	38,32	6,95	7,38	14,41	100,00
Bali	43,74	32,15	8,04	3,86	12,21	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,35	36,31	10,00	5,39	19,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,26	43,84	13,63	5,88	11,38	100,00
Kalimantan Barat	40,85	32,69	6,48	5,14	14,84	100,00
Kalimantan Tengah	37,42	37,08	8,39	4,67	12,45	100,00
Kalimantan Selatan	40,23	30,22	6,31	5,45	17,81	100,00
Kalimantan Timur	32,47	35,35	6,21	8,32	17,65	100,00
Sulawesi Utara	32,15	42,57	10,43	4,70	10,16	100,00
Sulawesi Tengah	34,66	39,82	8,82	6,27	10,44	100,00
Sulawesi Selatan	32,97	30,03	8,68	4,08	24,25	100,00
Sulawesi Tenggara	32,79	35,50	13,04	5,49	13,19	100,00
Gorontalo	37,18	34,10	14,92	6,01	7,80	100,00
Sulawesi Barat	30,59	32,92	9,72	4,50	22,26	100,00
Maluku	22,42	43,64	11,23	8,23	14,47	100,00
Maluku Utara	24,87	40,42	10,79	6,38	17,54	100,00
Irian Jaya Barat	41,97	33,63	8,54	7,93	7,93	100,00
Papua	25,99	46,10	14,20	3,81	9,90	100,00
INDONESIA	34,65	34,16	8,47	5,94	16,78	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	72,99	63,98	67,88	69,90	67,73	68,69	70,56	66,92	68,51
Sumatera Utara	60,61	67,19	64,56	68,06	62,51	64,95	65,31	64,42	64,80
Sumatera Barat	62,87	53,83	57,59	62,48	59,94	61,06	62,58	58,27	60,14
Riau	73,41	59,85	66,46	72,52	67,24	70,10	72,93	63,48	68,35
Jambi	59,89	65,88	63,04	71,04	66,29	68,82	68,07	66,16	67,15
Sumatera Selatan	69,35	65,39	67,21	73,55	68,28	71,02	71,99	67,04	69,50
Bengkulu	70,85	68,22	69,48	68,66	65,25	67,02	69,31	66,24	67,79
Lampung	60,91	59,93	60,40	67,36	62,79	65,19	65,93	62,05	64,04
Bangka Belitung	75,46	76,21	75,79	66,91	81,91	74,34	71,29	79,28	75,05
Kepulauan Riau	66,27	63,99	65,16	63,30	80,13	70,75	64,43	73,35	68,53
DKI Jakarta	57,62	55,65	56,63	-	-	-	57,62	55,65	56,63
Jawa Barat	65,76	63,34	64,51	73,12	67,41	70,24	69,73	65,48	67,56
Jawa Tengah	57,36	60,18	58,91	63,40	60,02	61,62	60,85	60,09	60,44
DI Yogyakarta	57,75	55,16	56,31	49,06	46,49	47,74	53,64	51,45	52,47
Jawa Timur	59,11	60,54	59,90	61,30	61,10	61,19	60,31	60,85	60,61
Banten	64,18	64,36	64,27	75,58	73,27	74,35	69,07	68,80	68,94
Bali	44,75	53,87	49,75	48,20	47,55	47,86	46,68	50,51	48,72
Nusa Tenggara Barat	57,41	54,16	55,73	55,22	52,31	53,68	56,02	52,97	54,42
Nusa Tenggara Timur	55,46	54,19	54,81	54,37	54,84	54,62	54,50	54,77	54,64
Kalimantan Barat	65,06	63,68	64,34	71,74	66,33	69,32	70,07	65,50	67,93
Kalimantan Tengah	72,21	72,07	72,15	73,60	74,93	74,16	73,22	74,06	73,58
Kalimantan Selatan	78,73	70,04	73,61	76,83	70,30	73,27	77,54	70,19	73,41
Kalimantan Timur	64,01	61,52	62,64	64,59	61,63	63,28	64,33	61,57	62,97
Sulawesi Utara	48,97	57,21	53,53	60,34	64,37	62,34	56,79	61,77	59,36
Sulawesi Tengah	67,53	60,03	63,98	74,56	70,59	72,65	73,24	68,66	71,05
Sulawesi Selatan	65,02	60,96	62,62	63,78	60,05	61,64	64,06	60,26	61,86
Sulawesi Tenggara	65,38	63,13	64,03	72,59	74,83	73,80	71,50	72,62	72,12
Gorontalo	69,66	60,73	64,02	84,56	85,60	85,09	80,76	76,65	78,51
Sulawesi Barat	45,57	43,59	44,41	62,94	59,43	61,02	57,73	54,08	55,69
Maluku	77,63	78,65	78,12	77,19	73,90	75,45	77,30	74,88	76,04
Maluku Utara	75,66	64,49	69,96	82,02	82,74	82,39	80,33	78,04	79,14
Irian Jaya Barat	60,24	65,70	62,69	70,18	69,40	69,87	67,14	68,09	67,53
Papua	73,78	68,16	71,21	68,01	58,70	64,31	70,01	62,52	66,86
INDONESIA	61,45	61,02	61,22	66,10	62,87	64,40	64,17	62,08	63,06

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.5.1. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2008

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan					Perkotaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	7,57	67,84	0,95	23,63	100,00	
Sumatera Utara	10,96	69,46	2,35	17,23	100,00	
Sumatera Barat	16,88	60,40	1,61	21,11	100,00	
Riau	9,05	72,66	-	18,28	100,00	
Jambi	11,46	62,44	2,11	23,98	100,00	
Sumatera Selatan	8,53	67,28	0,15	24,05	100,00	
Bengkulu	10,18	66,86	-	22,97	100,00	
Lampung	12,19	64,68	2,04	21,09	100,00	
Bangka Belitung	4,80	74,29	1,69	19,22	100,00	
Kepulauan Riau	9,70	67,46	1,21	21,64	100,00	
DKI Jakarta	9,32	70,64	1,59	18,46	100,00	
Jawa Barat	6,92	74,49	0,80	17,79	100,00	
Jawa Tengah	9,77	69,37	1,73	19,14	100,00	
DI Yogyakarta	10,53	69,86	2,86	16,75	100,00	
Jawa Timur	16,68	53,76	1,45	28,11	100,00	
Banten	6,51	77,28	0,53	15,68	100,00	
Bali	23,61	43,25	3,01	30,13	100,00	
Nusa Tenggara Barat	10,08	82,47	-	7,45	100,00	
Nusa Tenggara Timur	9,95	71,06	3,48	15,51	100,00	
Kalimantan Barat	8,40	68,03	0,48	23,09	100,00	
Kalimantan Tengah	8,74	70,06	2,67	18,53	100,00	
Kalimantan Selatan	4,71	81,84	0,92	12,54	100,00	
Kalimantan Timur	4,74	76,81	0,76	17,69	100,00	
Sulawesi Utara	8,41	83,85	0,75	6,99	100,00	
Sulawesi Tengah	7,12	85,56	-	7,32	100,00	
Sulawesi Selatan	8,83	75,85	0,52	14,81	100,00	
Sulawesi Tenggara	8,39	70,27	0,49	20,84	100,00	
Gorontalo	5,74	77,26	1,62	15,37	100,00	
Sulawesi Barat	22,97	56,18	-	20,86	100,00	
Maluku	5,85	84,12	1,52	8,51	100,00	
Maluku Utara	10,26	57,65	1,46	30,63	100,00	
Irian Jaya Barat	17,77	82,23	-	-	100,00	
Papua	12,54	71,51	-	15,95	100,00	
INDONESIA	10,57	67,91	1,30	20,22	100,00	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.5.2. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2008

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan					Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	9,11	50,37	0,78	39,74	100,00	
Sumatera Utara	10,77	69,54	1,16	18,54	100,00	
Sumatera Barat	23,33	47,45	0,84	28,38	100,00	
Riau	12,41	58,99	0,36	28,25	100,00	
Jambi	11,09	55,73	0,27	32,91	100,00	
Sumatera Selatan	12,30	52,27	2,23	33,21	100,00	
Bengkulu	13,73	58,98	0,69	26,59	100,00	
Lampung	10,42	62,34	2,50	24,75	100,00	
Bangka Belitung	7,14	62,24	0,17	30,44	100,00	
Kepulauan Riau	8,93	78,17	0,30	12,60	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	6,83	71,05	0,60	21,51	100,00	
Jawa Tengah	9,16	67,52	1,37	21,94	100,00	
DI Yogyakarta	14,27	59,89	4,64	21,21	100,00	
Jawa Timur	17,84	48,81	1,61	31,74	100,00	
Banten	7,94	66,51	0,85	24,70	100,00	
Bali	33,42	31,97	0,96	33,65	100,00	
Nusa Tenggara Barat	11,78	62,67	0,64	24,92	100,00	
Nusa Tenggara Timur	22,44	49,64	1,65	26,27	100,00	
Kalimantan Barat	7,79	57,47	1,18	33,56	100,00	
Kalimantan Tengah	5,92	65,45	1,72	26,92	100,00	
Kalimantan Selatan	4,16	72,54	0,64	22,65	100,00	
Kalimantan Timur	12,79	63,92	2,07	21,22	100,00	
Sulawesi Utara	5,87	76,88	0,25	17,00	100,00	
Sulawesi Tengah	11,01	68,69	0,84	19,46	100,00	
Sulawesi Selatan	10,92	59,14	0,84	29,10	100,00	
Sulawesi Tenggara	8,85	61,92	1,09	28,13	100,00	
Gorontalo	1,45	67,91	0,39	30,25	100,00	
Sulawesi Barat	17,27	58,65	1,46	22,61	100,00	
Maluku	8,18	60,24	-	31,58	100,00	
Maluku Utara	9,02	59,68	0,76	30,54	100,00	
Irian Jaya Barat	10,28	55,81	-	33,92	100,00	
Papua	23,82	39,83	1,52	34,83	100,00	
INDONESIA	11,71	61,05	1,21	26,03	100,00	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.5.3. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2008

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan					Perkotaan + Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	8,78	54,08	0,82	36,32	100,00	
Sumatera Utara	10,85	69,51	1,62	18,02	100,00	
Sumatera Barat	21,70	50,74	1,03	26,53	100,00	
Riau	10,84	65,38	0,19	23,59	100,00	
Jambi	11,19	57,55	0,77	30,48	100,00	
Sumatera Selatan	10,84	58,07	1,42	29,66	100,00	
Bengkulu	12,59	61,52	0,47	25,42	100,00	
Lampung	10,82	62,87	2,40	23,92	100,00	
Bangka Belitung	5,99	68,19	0,92	24,90	100,00	
Kepulauan Riau	9,22	74,12	0,64	16,02	100,00	
DKI Jakarta	9,32	70,64	1,59	18,46	100,00	
Jawa Barat	6,87	72,59	0,69	19,85	100,00	
Jawa Tengah	9,42	68,30	1,52	20,75	100,00	
DI Yogyakarta	12,06	65,79	3,59	18,57	100,00	
Jawa Timur	17,33	50,99	1,54	30,14	100,00	
Banten	7,22	71,90	0,69	20,19	100,00	
Bali	28,86	37,21	1,91	32,02	100,00	
Nusa Tenggara Barat	11,15	70,01	0,40	18,44	100,00	
Nusa Tenggara Timur	21,00	52,10	1,86	25,03	100,00	
Kalimantan Barat	7,95	60,26	0,99	30,79	100,00	
Kalimantan Tengah	6,71	66,75	1,99	24,55	100,00	
Kalimantan Selatan	4,38	76,22	0,75	18,64	100,00	
Kalimantan Timur	8,86	70,21	1,43	19,50	100,00	
Sulawesi Utara	6,64	79,01	0,41	13,94	100,00	
Sulawesi Tengah	10,36	71,50	0,70	17,44	100,00	
Sulawesi Selatan	10,44	62,99	0,77	25,81	100,00	
Sulawesi Tenggara	8,78	63,20	1,00	27,02	100,00	
Gorontalo	2,55	70,29	0,70	26,46	100,00	
Sulawesi Barat	18,73	58,02	1,08	22,16	100,00	
Maluku	7,65	65,65	0,34	26,35	100,00	
Maluku Utara	9,30	59,21	0,92	30,56	100,00	
Irian Jaya Barat	12,54	63,79		23,66	100,00	
Papua	19,37	52,32	0,92	27,39	100,00	
INDONESIA	11,24	63,86	1,25	23,66	100,00	

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.6. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	53,21	58,37	56,13	59,19	58,02	58,53	57,92	58,10	58,02
Sumatera Utara	45,67	52,53	49,79	48,12	50,71	49,57	47,22	51,45	49,66
Sumatera Barat	59,97	61,96	61,13	50,46	50,71	50,60	52,88	53,78	53,39
Riau	51,84	51,08	51,45	41,81	38,87	40,46	46,37	45,08	45,75
Jambi	44,26	47,31	45,86	44,64	47,50	45,98	44,54	47,44	45,95
Sumatera Selatan	51,11	43,99	47,26	39,33	42,33	40,77	43,70	43,04	43,37
Bengkulu	60,80	46,35	53,28	43,59	45,63	44,57	48,72	45,87	47,31
Lampung	57,25	51,86	54,41	44,94	48,59	46,68	47,67	49,43	48,53
Bangka Belitung	42,87	57,51	49,38	51,42	42,33	46,92	47,04	49,35	48,12
Kepulauan Riau	45,34	52,78	48,95	45,86	53,00	49,02	45,66	52,91	48,99
DKI Jakarta	56,44	54,22	55,32	-	-	-	56,44	54,22	55,32
Jawa Barat	54,09	53,42	53,74	48,11	43,83	45,95	50,87	48,38	49,60
Jawa Tengah	47,20	49,92	48,70	43,35	43,05	43,19	44,97	46,11	45,58
DI Yogyakarta	46,18	52,68	49,80	52,39	56,11	54,29	49,12	54,15	51,82
Jawa Timur	45,92	48,70	47,47	46,42	45,31	45,79	46,19	46,81	46,54
Banten	47,70	52,19	49,77	39,28	29,53	34,10	44,09	40,89	42,51
Bali	63,07	64,18	63,68	60,67	64,74	62,78	61,72	64,48	63,19
Nusa Tenggara Barat	54,90	52,40	53,61	49,48	49,80	49,65	51,47	50,73	51,08
Nusa Tenggara Timur	57,45	47,70	52,51	52,17	49,67	50,84	52,81	49,46	51,03
Kalimantan Barat	43,81	52,80	48,54	40,04	37,64	38,97	40,98	42,38	41,64
Kalimantan Tengah	33,50	32,38	32,99	34,76	33,07	34,05	34,42	32,86	33,74
Kalimantan Selatan	41,98	43,26	42,73	35,92	36,99	36,50	38,17	39,59	38,96
Kalimantan Timur	42,84	42,94	42,90	50,85	43,62	47,66	47,35	43,25	45,32
Sulawesi Utara	48,66	55,53	52,47	56,25	50,26	53,27	53,87	52,18	53,00
Sulawesi Tengah	37,27	54,38	45,37	41,30	39,05	40,22	40,55	41,84	41,17
Sulawesi Selatan	46,89	46,19	46,48	40,75	37,43	38,84	42,10	39,47	40,58
Sulawesi Tenggara	40,06	34,23	36,55	28,85	29,81	29,37	30,55	30,65	30,60
Gorontalo	53,02	58,24	56,31	54,76	49,54	52,10	54,31	52,67	53,41
Sulawesi Barat	51,90	43,18	46,77	31,36	37,69	34,82	37,52	39,55	38,65
Maluku	37,86	27,96	33,06	39,81	34,36	36,93	39,35	33,04	36,08
Maluku Utara	44,94	46,97	45,98	37,14	33,33	35,15	39,22	36,84	37,99
Irian Jaya Barat	23,47	23,64	23,54	45,02	42,34	43,96	38,42	35,74	37,31
Papua	31,26	27,07	29,34	43,28	51,82	46,68	39,12	41,83	40,26
INDONESIA	49,94	51,13	50,58	45,89	44,81	45,32	47,57	47,51	47,54

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.7.1. Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2008

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Perkotaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	25,39	6,00	26,57	29,22	24,84	2,77	4,05
Sumatera Utara	11,73	10,05	38,88	16,04	23,34	1,60	3,23
Sumatera Barat	16,25	2,75	22,65	37,93	24,96	8,13	1,59
Riau	12,15	14,80	46,14	17,06	13,95	2,57	1,17
Jambi	15,69	2,29	32,72	27,06	20,37	0,00	4,60
Sumatera Selatan	17,47	8,62	48,34	20,55	8,69	0,00	6,47
Bengkulu	11,51	3,99	45,07	33,37	15,15	2,09	1,42
Lampung	6,64	9,78	35,97	29,08	23,82	1,33	0,95
Bangka Belitung	13,35	9,49	30,21	34,43	19,63	2,89	0,95
Kepulauan Riau	15,16	5,23	38,28	32,74	12,63	3,39	3,16
DKI Jakarta	14,06	22,69	39,67	23,88	1,04	1,97	2,76
Jawa Barat	8,48	6,89	45,06	34,22	15,76	2,56	2,60
Jawa Tengah	7,55	6,11	36,92	32,12	22,02	2,92	2,72
DI Yogyakarta	9,88	16,80	42,91	21,48	13,99	0,00	2,03
Jawa Timur	9,29	8,86	32,96	23,01	32,01	2,76	2,94
Banten	2,78	12,01	57,35	20,06	12,72	0,00	2,94
Bali	10,81	1,82	48,67	19,69	24,94	1,75	4,30
Nusa Tenggara Barat	6,43	0,95	29,23	47,39	22,65	10,19	-
Nusa Tenggara Timur	23,78	3,61	26,29	40,69	7,71	0,00	3,54
Kalimantan Barat	9,63	6,11	39,21	23,11	26,07	1,22	3,67
Kalimantan Tengah	40,01	-	23,86	11,89	18,29	5,95	-
Kalimantan Selatan	14,41	0,57	22,64	34,70	30,28	2,94	5,12
Kalimantan Timur	11,79	11,44	43,85	28,59	10,16	0,00	0,63
Sulawesi Utara	9,86	9,33	51,00	20,89	11,12	0,00	1,95
Sulawesi Tengah	30,48	-	21,47	33,02	22,58	0,00	4,59
Sulawesi Selatan	14,24	4,38	31,97	40,49	13,21	0,64	2,63
Sulawesi Tenggara	16,15	6,52	46,51	48,20	6,55	6,45	6,52
Gorontalo	8,24	-	24,02	47,64	18,15	0,00	6,62
Sulawesi Barat	19,86	-	19,41	19,44	44,20	0,00	2,90
Maluku	16,22	-	34,90	36,11	22,94	0,00	2,09
Maluku Utara	21,78	7,79	57,67	27,78	2,74	0,00	2,86
Irian Jaya Barat	11,00	11,00	22,17	33,83	22,00	0,00	-
Papua	12,51	6,15	46,82	27,04	-	0,00	13,35
INDONESIA	10,04	8,33	39,16	28,35	20,09	2,47	2,78

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.7.2. Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2008

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Perdesaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	15,08	2,28	15,85	46,09	35,42	1,91	5,19
Sumatera Utara	6,32	5,70	21,03	20,80	47,06	2,77	5,69
Sumatera Barat	9,35	3,66	15,87	32,29	39,44	9,75	3,21
Riau	11,66	4,88	28,24	33,17	25,24	1,58	3,47
Jambi	7,42	1,98	37,60	33,43	28,68	1,75	1,36
Sumatera Selatan	7,70	2,66	18,89	29,27	44,09	2,43	4,21
Bengkulu	5,33	1,75	26,10	33,00	38,52	2,58	5,77
Lampung	2,38	2,43	20,70	23,68	59,63	2,04	3,27
Bangka Belitung	8,60	6,05	23,41	55,94	23,88	3,62	2,28
Kepulauan Riau	30,29	1,63	4,40	53,07	22,24	3,47	1,82
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,91	1,80	31,66	33,80	38,85	3,26	2,85
Jawa Tengah	3,41	2,22	31,06	24,16	45,61	1,85	2,93
DI Yogyakarta	3,55	5,76	50,46	28,66	19,36	1,26	2,75
Jawa Timur	2,93	2,24	22,71	21,15	56,26	3,08	2,12
Banten	0,74	0,92	26,08	30,28	44,16	1,85	2,31
Bali	4,04	2,47	34,14	24,16	44,95	2,15	1,64
Nusa Tenggara Barat	2,85	0,29	30,51	35,77	39,87	5,67	-
Nusa Tenggara Timur	4,08	3,41	6,63	74,63	10,94	0,53	7,08
Kalimantan Barat	3,71	2,62	5,74	42,12	47,70	1,16	1,99
Kalimantan Tengah	9,73	-	8,61	55,99	32,19	1,73	2,80
Kalimantan Selatan	6,84	0,51	10,79	42,62	44,62	4,52	3,91
Kalimantan Timur	11,57	3,09	16,02	60,92	12,65	2,04	2,68
Sulawesi Utara	7,58	3,38	33,27	32,86	31,69	1,36	0,72
Sulawesi Tengah	8,93	2,04	11,87	50,19	34,20	2,20	2,55
Sulawesi Selatan	7,81	0,82	18,48	50,67	26,99	0,86	4,46
Sulawesi Tenggara	7,45	2,40	14,84	59,18	24,73	5,59	3,62
Gorontalo	3,85	-	27,61	36,32	39,04	0,89	-
Sulawesi Barat	4,29	0,74	7,99	72,19	18,71	0,00	1,49
Maluku	12,79	1,72	4,76	61,46	17,43	2,00	9,25
Maluku Utara	8,90	0,32	9,64	68,64	17,14	1,39	3,23
Irian Jaya Barat	8,71	-	5,80	81,59	6,78	0,00	-
Papua	13,05	5,32	7,27	73,47	7,78	9,88	7,34
INDONESIA	5,39	2,40	24,25	32,97	41,63	2,67	3,13

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 5.7.3. Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2008

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Perkotaan + Perdesaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	17,19	3,04	18,04	42,65	33,26	2,08	4,96
Sumatera Utara	8,31	7,31	27,61	19,05	38,32	2,34	4,78
Sumatera Barat	11,36	3,39	17,85	33,93	35,23	9,28	2,74
Riau	11,90	9,79	37,10	25,20	19,65	2,07	2,33
Jambi	9,63	2,06	36,29	31,72	26,45	1,28	2,23
Sumatera Selatan	10,98	4,66	28,77	26,34	32,22	1,62	4,97
Bengkulu	7,55	2,56	32,91	33,13	30,14	2,40	4,21
Lampung	3,49	4,34	24,65	25,08	50,36	1,86	2,66
Bangka Belitung	11,00	7,79	26,85	45,06	21,73	3,25	1,61
Kepulauan Riau	24,86	2,93	16,57	45,77	18,79	3,44	2,30
DKI Jakarta	14,06	22,69	39,67	23,88	1,04	1,97	2,76
Jawa Barat	7,18	4,31	38,26	34,01	27,47	2,92	2,73
Jawa Tengah	5,24	3,93	33,64	27,67	35,21	2,32	2,84
DI Yogyakarta	6,76	11,36	46,62	25,01	16,64	0,62	2,38
Jawa Timur	5,69	5,11	27,16	21,96	45,74	2,94	2,48
Banten	1,83	6,88	42,87	24,79	27,28	0,86	2,65
Bali	7,04	2,18	40,59	22,18	36,07	1,97	2,82
Nusa Tenggara Barat	4,24	0,55	30,01	40,28	33,18	7,43	-
Nusa Tenggara Timur	6,04	3,43	8,58	71,26	10,62	0,48	6,73
Kalimantan Barat	5,28	3,54	14,59	37,10	41,99	1,18	2,43
Kalimantan Tengah	16,91	-	12,23	45,52	28,89	2,73	2,14
Kalimantan Selatan	9,78	0,53	15,40	39,54	39,04	3,91	4,38
Kalimantan Timur	11,67	6,86	28,62	46,29	11,53	1,12	1,75
Sulawesi Utara	8,28	5,21	38,73	29,18	25,36	0,94	1,10
Sulawesi Tengah	12,92	1,66	13,65	47,01	32,05	1,79	2,93
Sulawesi Selatan	9,28	1,63	21,56	48,35	23,84	0,81	4,05
Sulawesi Tenggara	9,09	3,18	20,83	57,10	21,30	5,75	4,17
Gorontalo	5,10	-	26,59	39,53	33,11	0,64	1,88
Sulawesi Barat	9,38	0,50	11,72	54,94	27,04	0,00	1,95
Maluku	13,48	1,37	10,83	56,35	18,54	1,60	7,81
Maluku Utara	12,72	2,53	23,87	56,54	12,87	0,98	3,12
Irian Jaya Barat	9,13	2,00	8,77	72,91	9,55	0,00	-
Papua	12,92	5,53	17,05	61,99	5,86	7,43	8,83
INDONESIA	7,31	4,86	30,42	31,06	32,71	2,58	2,99

Sumber : BPS - Susenas 2008

Tabel 6.1. TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2008

Provinsi (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan + Perdesaan (4)
Nanggroe Aceh Darussalam	41,11	48,45	46,55
Sumatera Utara	36,86	56,09	48,78
Sumatera Barat	31,53	46,39	42,72
R i a u	33,15	50,62	43,89
J a m b i	25,31	51,89	46,12
Sumatera Selatan	30,84	57,18	49,25
Bengkulu	42,69	56,82	53,30
Lampung	38,10	56,96	52,81
Bangka Belitung	22,96	49,37	36,26
Kepulauan Riau	26,38	37,34	29,91
DKI Jakarta	33,28	-	33,28
Jawa Barat	32,47	49,68	42,38
Jawa Tengah	40,36	54,94	49,57
DI Yogyakarta	43,78	60,47	52,48
Jawa Timur	38,39	54,49	48,88
Banten	36,92	45,21	41,26
B a l i	48,69	58,74	54,85
Nusa Tenggara Barat	46,08	55,49	52,22
Nusa Tenggara Timur	32,60	59,01	56,84
Kalimantan Barat	29,84	55,79	48,00
Kalimantan Tengah	35,83	65,05	58,11
Kalimantan Selatan	34,12	52,98	45,83
Kalimantan Timur	31,10	53,60	45,49
Sulawesi Utara	32,01	42,12	38,59
Sulawesi Tengah	35,11	53,55	50,35
Sulawesi Selatan	28,11	43,00	39,36
Sulawesi Tenggara	38,24	60,74	57,20
Gorontalo	32,82	47,03	42,86
Sulawesi Barat	33,75	53,80	48,28
Maluku	37,74	51,81	48,39
Maluku Utara	33,68	53,64	47,42
Irian Jaya Barat	29,48	67,70	55,71
Papua	43,94	60,27	57,08
INDONESIA	36,53	53,26	47,07

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.2.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Perkotaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	32,59	9,82	57,59	100,00
Sumatera Utara	24,61	13,62	61,78	100,00
Sumatera Barat	37,83	10,03	52,14	100,00
Riau	32,52	6,03	61,45	100,00
Jambi	33,78	13,52	52,70	100,00
Sumatera Selatan	21,59	19,37	59,04	100,00
Bengkulu	40,76	8,05	51,18	100,00
Lampung	25,43	9,89	64,68	100,00
Bangka Belitung	16,53	26,44	57,03	100,00
Kepulauan Riau	18,08	33,71	48,21	100,00
DKI Jakarta	1,17	13,70	85,13	100,00
Jawa Barat	35,45	10,56	53,99	100,00
Jawa Tengah	36,40	16,63	46,97	100,00
DI Yogyakarta	39,90	20,58	39,52	100,00
Jawa Timur	35,68	9,55	54,77	100,00
Banten	16,38	8,31	75,31	100,00
Bali	43,13	16,05	40,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,65	15,96	38,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,94	12,85	64,22	100,00
Kalimantan Barat	26,37	11,16	62,47	100,00
Kalimantan Tengah	32,72	18,99	48,29	100,00
Kalimantan Selatan	11,68	13,11	75,21	100,00
Kalimantan Timur	15,87	10,27	73,86	100,00
Sulawesi Utara	33,77	10,12	56,11	100,00
Sulawesi Tengah	21,53	9,44	69,02	100,00
Sulawesi Selatan	29,48	11,39	59,13	100,00
Sulawesi Tenggara	28,35	12,77	58,88	100,00
Gorontalo	26,20	17,81	56,00	100,00
Sulawesi Barat	38,66	7,91	53,43	100,00
Maluku	31,54	14,26	54,20	100,00
Maluku Utara	44,52	12,09	43,39	100,00
Irian Jaya Barat	23,80	9,08	67,11	100,00
Papua	6,60	17,75	75,65	100,00
INDONESIA	31,47	12,87	55,66	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Perdesaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	78,86	7,17	13,97	100,00
Sumatera Utara	84,69	5,15	10,16	100,00
Sumatera Barat	75,53	6,39	18,08	100,00
Riau	81,93	3,57	14,50	100,00
Jambi	85,62	3,29	11,10	100,00
Sumatera Selatan	84,84	4,77	10,39	100,00
Bengkulu	89,99	3,22	6,78	100,00
Lampung	80,42	6,96	12,62	100,00
Bangka Belitung	73,15	15,54	11,31	100,00
Kepulauan Riau	62,65	13,99	23,36	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	72,41	10,68	16,90	100,00
Jawa Tengah	77,35	9,75	12,90	100,00
DI Yogyakarta	82,06	7,12	10,82	100,00
Jawa Timur	79,58	7,29	13,13	100,00
Banten	72,82	8,16	19,02	100,00
Bali	80,38	8,53	11,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	73,83	12,64	13,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	89,10	7,22	3,67	100,00
Kalimantan Barat	88,09	4,01	7,90	100,00
Kalimantan Tengah	87,28	6,58	6,14	100,00
Kalimantan Selatan	77,08	7,30	15,62	100,00
Kalimantan Timur	77,22	7,53	15,25	100,00
Sulawesi Utara	77,57	5,45	16,97	100,00
Sulawesi Tengah	83,49	7,20	9,32	100,00
Sulawesi Selatan	83,48	4,53	11,99	100,00
Sulawesi Tenggara	83,52	5,90	10,58	100,00
Gorontalo	70,36	11,02	18,62	100,00
Sulawesi Barat	87,98	6,03	5,99	100,00
Maluku	85,97	5,55	8,48	100,00
Maluku Utara	87,58	5,96	6,46	100,00
Irian Jaya Barat	78,82	8,85	12,33	100,00
Papua	86,09	3,71	10,21	100,00
INDONESIA	79,14	7,90	12,97	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian
Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi
Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Perkotaan + Perdesaan
				(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	68,46	7,77	23,78	100,00
Sumatera Utara	67,51	7,57	24,92	100,00
Sumatera Barat	68,73	7,05	24,22	100,00
R i a u	67,60	4,28	28,12	100,00
J a m b i	79,43	4,51	16,07	100,00
Sumatera Selatan	72,94	7,52	19,54	100,00
Bengkulu	80,24	4,18	15,58	100,00
Lampung	71,63	7,43	20,94	100,00
Bangka Belitung	55,37	18,97	25,67	100,00
Kepulauan Riau	36,47	25,57	37,96	100,00
DKI Jakarta	1,17	13,70	85,13	100,00
Jawa Barat	60,39	10,64	28,97	100,00
Jawa Tengah	65,05	11,82	23,14	100,00
DI Yogyakarta	65,26	12,48	22,25	100,00
Jawa Timur	67,55	7,91	24,54	100,00
Banten	49,17	8,22	42,60	100,00
B a l i	67,53	11,12	21,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,15	13,66	21,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	85,99	7,49	6,52	100,00
Kalimantan Barat	76,58	5,34	18,08	100,00
Kalimantan Tengah	79,22	8,41	12,37	100,00
Kalimantan Selatan	58,85	8,92	32,23	100,00
Kalimantan Timur	62,20	8,20	29,60	100,00
Sulawesi Utara	64,91	6,80	28,28	100,00
Sulawesi Tengah	75,96	7,47	16,57	100,00
Sulawesi Selatan	74,12	5,72	20,16	100,00
Sulawesi Tenggara	77,70	6,63	15,67	100,00
Gorontalo	60,41	12,55	27,05	100,00
Sulawesi Barat	78,57	6,39	15,05	100,00
Maluku	75,77	7,18	17,05	100,00
Maluku Utara	78,05	7,32	14,63	100,00
Irian Jaya Barat	69,84	8,89	21,28	100,00
Papua	74,44	5,77	19,79	100,00
INDONESIA	65,47	9,32	25,21	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian
Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi
Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.3.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2008

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Perkotaan
						(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	29,80	40,15	18,16	7,36	4,53	100,00
Sumatera Utara	34,19	33,73	18,04	4,11	9,93	100,00
Sumatera Barat	40,69	33,00	11,03	7,81	7,46	100,00
Riau	44,94	30,84	10,97	5,54	7,71	100,00
Jambi	34,81	36,60	12,32	7,81	8,46	100,00
Sumatera Selatan	35,47	32,82	18,16	6,87	6,67	100,00
Bengkulu	31,80	28,84	14,72	9,70	14,94	100,00
Lampung	36,58	32,28	16,10	6,49	8,56	100,00
Bangka Belitung	45,03	16,87	29,71	0,92	7,47	100,00
Kepulauan Riau	41,80	17,62	33,10	5,52	1,97	100,00
DKI Jakarta	37,39	29,35	24,02	2,51	6,73	100,00
Jawa Barat	32,34	31,72	13,55	13,88	8,51	100,00
Jawa Tengah	31,43	39,91	8,04	10,08	10,53	100,00
DI Yogyakarta	26,54	40,85	7,95	7,63	17,03	100,00
Jawa Timur	34,85	32,93	11,08	10,27	10,87	100,00
Banten	52,53	19,21	19,11	4,87	4,28	100,00
Bali	23,97	40,42	7,82	5,68	22,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,22	46,65	5,92	7,88	10,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,59	40,87	10,03	1,76	17,75	100,00
Kalimantan Barat	37,55	35,43	15,32	2,96	8,74	100,00
Kalimantan Tengah	34,62	37,17	18,46	1,97	7,78	100,00
Kalimantan Selatan	42,64	30,58	13,21	6,69	6,89	100,00
Kalimantan Timur	45,96	22,11	25,16	2,77	3,99	100,00
Sulawesi Utara	41,92	32,42	11,67	7,40	6,58	100,00
Sulawesi Tengah	35,98	38,88	14,02	0,33	10,79	100,00
Sulawesi Selatan	34,65	38,00	13,95	5,26	8,13	100,00
Sulawesi Tenggara	47,10	35,20	5,22	2,75	9,72	100,00
Gorontalo	51,14	25,04	18,25	1,47	4,08	100,00
Sulawesi Barat	56,47	31,08	6,03	0,00	6,42	100,00
Maluku	45,44	29,65	10,73	4,04	10,14	100,00
Maluku Utara	36,05	25,10	8,51	0,00	30,34	100,00
Irian Jaya Barat	22,28	40,11	28,39	1,96	7,27	100,00
Papua	52,49	16,34	27,92	0,00	3,25	100,00
INDONESIA	34,36	34,24	12,74	8,77	9,89	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.3.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2008

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Perdesaan
						(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	31,40	47,70	6,05	4,87	9,98	100,00
Sumatera Utara	21,30	52,66	4,39	5,00	16,65	100,00
Sumatera Barat	26,73	46,18	4,21	8,34	14,53	100,00
R i a u	46,71	35,91	6,33	5,50	5,56	100,00
J a m b i	29,33	48,67	5,58	5,24	11,18	100,00
Sumatera Selatan	15,09	55,53	3,80	8,22	17,35	100,00
Bengkulu	16,59	60,80	2,96	4,36	15,30	100,00
Lampung	16,02	57,81	2,26	7,60	16,31	100,00
Bangka Belitung	44,98	29,83	6,43	9,91	8,84	100,00
Kepulauan Riau	67,23	12,96	5,04	5,33	9,44	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	19,41	48,39	3,13	17,94	11,14	100,00
Jawa Tengah	15,06	54,76	2,01	10,76	17,40	100,00
DI Yogyakarta	7,77	57,38	2,91	6,31	25,63	100,00
Jawa Timur	17,53	49,52	3,49	11,38	18,09	100,00
Banten	20,30	54,51	3,92	12,26	9,01	100,00
B a l i	14,98	52,51	1,28	3,12	28,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,35	52,90	0,91	12,05	10,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,33	65,25	1,08	0,41	20,93	100,00
Kalimantan Barat	15,80	59,22	3,72	1,99	19,26	100,00
Kalimantan Tengah	24,58	50,89	3,58	6,24	14,71	100,00
Kalimantan Selatan	26,77	53,68	3,14	4,01	12,41	100,00
Kalimantan Timur	31,71	40,85	7,24	4,00	16,19	100,00
Sulawesi Utara	39,13	39,01	2,72	5,97	13,18	100,00
Sulawesi Tengah	21,08	60,55	1,19	2,39	14,79	100,00
Sulawesi Selatan	19,43	58,91	3,70	4,42	13,54	100,00
Sulawesi Tenggara	19,76	60,14	1,90	1,27	16,93	100,00
Gorontalo	33,56	46,80	5,43	6,68	7,52	100,00
Sulawesi Barat	20,18	62,31	1,03	2,47	14,00	100,00
Maluku	32,53	42,84	4,35	0,88	19,42	100,00
Maluku Utara	25,01	56,93	1,87	3,42	12,77	100,00
Irian Jaya Barat	22,59	52,13	9,15	5,58	10,55	100,00
Papua	21,72	57,48	5,35	2,07	13,39	100,00
INDONESIA	18,89	52,26	3,11	9,68	16,06	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.3.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2008

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan					
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggro Aceh Darussalam	31,04	46,00	8,77	5,43	8,76	100,00
Sumatera Utara	24,98	47,25	8,30	4,74	14,73	100,00
Sumatera Barat	29,25	43,81	5,44	8,25	13,26	100,00
R i a u	46,20	34,44	7,67	5,51	6,18	100,00
J a m b i	29,99	47,23	6,39	5,55	10,85	100,00
Sumatera Selatan	18,93	51,26	6,51	7,96	15,34	100,00
Bengkulu	19,60	54,47	5,29	5,42	15,23	100,00
Lampung	19,31	53,72	4,47	7,42	15,07	100,00
Bangka Belitung	45,00	25,76	13,74	7,09	8,41	100,00
Kepulauan Riau	52,29	15,70	21,52	5,44	5,05	100,00
DKI Jakarta	37,39	29,35	24,02	2,51	6,73	100,00
Jawa Barat	23,61	42,96	6,52	16,62	10,28	100,00
Jawa Tengah	19,98	50,30	3,82	10,56	15,34	100,00
DI Yogyakarta	15,25	50,80	4,92	6,83	22,20	100,00
Jawa Timur	22,27	44,98	5,57	11,08	16,11	100,00
Banten	33,80	39,72	10,28	9,16	7,03	100,00
B a l i	18,08	48,34	3,53	4,00	26,04	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,16	50,98	2,45	10,77	10,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,15	64,10	1,50	0,48	20,78	100,00
Kalimantan Barat	19,85	54,78	5,88	2,18	17,30	100,00
Kalimantan Tengah	26,07	48,86	5,78	5,61	13,68	100,00
Kalimantan Selatan	31,19	47,24	5,95	4,75	10,87	100,00
Kalimantan Timur	35,20	36,27	11,63	3,70	13,20	100,00
Sulawesi Utara	39,93	37,11	5,31	6,38	11,27	100,00
Sulawesi Tengah	22,89	57,92	2,75	2,14	14,31	100,00
Sulawesi Selatan	22,07	55,29	5,48	4,57	12,60	100,00
Sulawesi Tenggara	22,64	57,52	2,25	1,42	16,17	100,00
Gorontalo	37,53	41,90	8,32	5,51	6,75	100,00
Sulawesi Barat	27,11	56,36	1,98	2,00	12,55	100,00
Maluku	34,95	40,37	5,54	1,47	17,68	100,00
Maluku Utara	27,45	49,89	3,34	2,66	16,66	100,00
Irian Jaya Barat	22,54	50,17	12,29	4,99	10,01	100,00
Papua	26,22	51,45	8,65	1,77	11,91	100,00
INDONESIA	23,32	47,09	5,87	9,42	14,29	100,00

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.4.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2008

Provinsi	Perkotaan								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nangroe Aceh Darussalam	2,26	16,28	81,47	4,82	35,71	59,48	3,09	22,61	74,30
Sumatera Utara	2,73	9,92	87,35	6,01	22,74	71,26	3,91	14,54	81,55
Sumatera Barat	6,07	13,78	80,16	10,53	23,41	66,06	7,77	17,45	74,77
Riau	2,92	11,57	85,51	6,56	18,46	74,98	4,03	13,67	82,30
Jambi	2,12	12,21	85,68	3,99	23,07	72,94	2,74	15,80	81,46
Sumatera Selatan	4,67	13,67	81,66	9,13	21,31	69,56	6,49	16,79	76,72
Bengkulu	4,46	12,60	82,94	7,70	25,10	67,21	5,53	16,74	77,72
Lampung	5,46	14,31	80,24	8,77	22,85	68,37	6,55	17,12	76,34
Bangka Belitung	5,18	13,69	81,12	9,89	23,58	66,53	6,42	16,28	77,30
Kepulauan Riau	2,87	6,52	90,62	4,10	7,39	88,51	3,32	6,84	89,85
DKI Jakarta	2,83	6,37	90,81	5,08	11,20	83,72	3,72	8,28	87,99
Jawa Barat	4,22	11,37	84,42	7,09	18,50	74,40	5,18	13,75	81,07
Jawa Tengah	4,56	14,50	80,94	5,63	21,70	72,67	5,02	17,62	77,36
DI Yogyakarta	5,22	12,49	82,28	8,78	18,37	72,85	6,78	15,07	78,15
Jawa Timur	4,83	15,01	80,16	8,52	22,11	69,37	6,34	17,90	75,76
Banten	3,39	9,99	86,62	4,29	15,76	79,95	3,70	11,97	84,34
Bali	7,64	18,79	73,56	10,34	24,58	65,08	8,83	21,33	69,85
Nusa Tenggara Barat	8,19	24,04	67,77	13,83	29,83	56,34	10,64	26,55	62,81
Nusa Tenggara Timur	7,16	13,07	79,77	12,37	19,04	68,59	9,20	15,41	75,38
Kalimantan Barat	4,91	13,71	81,38	8,08	23,80	68,12	6,10	17,51	76,39
Kalimantan Tengah	3,37	11,37	85,26	4,63	24,32	71,05	3,82	16,05	80,13
Kalimantan Selatan	6,99	15,09	77,92	9,31	25,39	65,30	7,91	19,18	72,91
Kalimantan Timur	3,87	9,59	86,53	5,60	18,27	76,12	4,38	12,15	83,47
Sulawesi Utara	4,86	13,11	82,03	8,82	20,71	70,46	6,09	15,47	78,44
Sulawesi Tengah	6,21	11,20	82,59	8,46	20,90	70,65	7,14	15,21	77,65
Sulawesi Selatan	5,90	12,40	81,70	8,57	17,91	73,52	6,90	14,46	78,65
Sulawesi Tenggara	5,64	17,31	77,05	10,56	29,84	59,60	7,47	21,98	70,55
Gorontalo	4,74	11,80	83,46	9,45	22,64	67,90	6,45	15,76	77,79
Sulawesi Barat	8,55	21,80	69,66	5,53	25,27	69,20	7,47	23,04	69,49
Maluku	5,68	14,76	79,56	11,59	24,93	63,48	7,75	18,32	73,92
Maluku Utara	7,23	15,78	76,99	13,68	32,10	54,21	9,52	21,57	68,92
Irian Jaya Barat	2,05	11,22	86,73	7,04	24,16	68,80	3,44	14,82	81,75
Papua	2,61	10,25	87,14	4,21	17,91	77,88	3,10	12,60	84,30
INDONESIA	4,37	12,44	83,19	7,17	20,05	72,78	5,43	15,33	79,23

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.4.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2008

Provinsi	Perdesaan								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	5,64	28,16	66,20	12,46	48,02	39,52	7,99	35,01	56,99
Sumatera Utara	7,23	27,93	64,84	11,14	38,49	50,37	8,85	32,32	58,83
Sumatera Barat	7,28	25,14	67,57	13,61	35,04	51,35	9,79	29,07	61,14
Riau	8,16	32,14	59,70	13,84	40,18	45,98	9,64	34,24	56,12
Jambi	5,32	34,52	60,16	9,50	44,16	46,34	6,77	37,87	55,36
Sumatera Selatan	7,50	38,03	54,47	11,20	46,05	42,75	8,88	41,00	50,12
Bengkulu	5,55	26,73	67,72	9,38	42,13	48,49	7,11	32,99	59,90
Lampung	9,78	25,51	64,71	14,25	38,14	47,61	11,33	29,90	58,76
Bangka Belitung	6,57	27,82	65,60	12,25	45,53	42,22	8,31	33,26	58,43
Kepulauan Riau	9,18	31,85	58,97	19,80	42,35	37,85	13,38	36,00	50,62
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,36	23,11	70,53	12,22	39,09	48,69	8,20	28,14	63,66
Jawa Tengah	6,89	23,83	69,27	14,28	37,00	48,72	9,86	29,11	61,03
DI Yogyakarta	4,35	19,40	76,25	10,38	38,47	51,15	6,95	27,65	65,40
Jawa Timur	7,19	26,83	65,98	15,47	38,73	45,80	10,42	31,47	58,11
Banten	6,72	20,53	72,75	18,47	33,36	48,16	10,82	25,01	64,17
Bali	6,81	22,54	70,65	11,37	33,82	54,81	8,92	27,76	63,32
Nusa Tenggara Barat	13,90	30,56	55,54	19,88	38,46	41,65	16,55	34,06	49,39
Nusa Tenggara Timur	7,51	37,18	55,31	16,27	48,07	35,66	11,22	41,79	46,99
Kalimantan Barat	5,73	29,24	65,03	8,94	41,39	49,67	7,08	34,34	58,59
Kalimantan Tengah	3,05	25,46	71,49	5,31	39,97	54,72	3,82	30,38	65,81
Kalimantan Selatan	6,85	30,69	62,46	12,68	39,49	47,82	9,18	34,21	56,60
Kalimantan Timur	4,22	23,17	72,61	12,00	35,47	52,53	6,58	26,89	66,53
Sulawesi Utara	5,10	26,52	68,38	15,09	35,20	49,71	7,70	28,78	63,52
Sulawesi Tengah	8,65	29,61	61,74	20,44	41,95	37,62	12,68	33,83	53,49
Sulawesi Selatan	12,27	31,78	55,95	19,35	40,60	40,05	14,83	34,97	50,20
Sulawesi Tenggara	9,24	28,53	62,23	21,31	42,65	36,04	14,21	34,35	51,43
Gorontalo	8,83	20,91	70,26	19,24	35,49	45,27	11,85	25,15	63,00
Sulawesi Barat	10,02	38,50	51,48	18,94	44,97	36,09	13,27	40,86	45,87
Maluku	6,77	29,44	63,79	15,38	42,32	42,30	9,78	33,94	56,28
Maluku Utara	6,74	33,05	60,21	18,36	45,82	35,83	11,04	37,78	51,18
Irian Jaya Barat	2,96	30,60	66,45	8,27	43,92	47,81	4,85	35,34	59,81
Papua	2,57	26,23	71,20	4,57	42,20	53,23	3,43	33,12	63,45
INDONESIA	7,22	26,97	65,82	13,95	39,41	46,65	9,74	31,63	58,63

Sumber : BPS - Sakernas 2008

Tabel 6.4.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2008

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	8,57	33,86	57,57	17,07	47,27	35,66	11,20	38,01	50,78
Sumatera Utara	10,68	34,48	54,84	13,97	38,81	47,22	12,04	36,27	51,69
Sumatera Barat	10,53	32,17	57,30	20,32	36,13	43,55	14,38	33,73	51,89
Riau	16,67	33,05	50,28	31,54	31,75	36,71	20,14	32,74	47,11
Jambi	10,12	38,11	51,77	14,07	44,01	41,93	11,20	39,74	49,06
Sumatera Selatan	10,87	39,46	49,67	15,24	41,03	43,73	12,36	39,99	47,65
Bengkulu	10,32	28,40	61,28	12,30	43,04	44,66	11,01	33,48	55,51
Lampung	14,28	30,65	55,07	24,26	38,71	37,04	17,45	33,21	49,34
Bangka Belitung	11,27	36,00	52,73	17,10	40,67	42,23	12,71	37,16	50,13
Kepulauan Riau	7,29	25,83	66,88	35,60	30,28	34,12	15,34	27,10	57,56
DKI Jakarta	14,30	15,44	70,26	20,99	18,61	60,41	16,44	16,46	67,10
Jawa Barat	12,32	33,46	54,22	18,99	44,40	36,60	14,34	36,77	48,88
Jawa Tengah	12,74	36,21	51,05	18,41	39,13	42,46	15,05	37,40	47,54
DI Yogyakarta	11,64	32,51	55,85	17,18	41,81	41,01	14,26	36,91	48,83
Jawa Timur	11,76	36,69	51,55	20,68	38,14	41,18	15,24	37,26	47,51
Banten	11,40	25,05	63,55	25,11	41,10	33,79	15,56	29,92	54,52
Bali	8,90	33,91	57,19	15,70	38,85	45,45	11,83	36,04	52,13
Nusa Tenggara Barat	16,84	36,44	46,72	21,12	32,71	46,17	18,51	34,99	46,51
Nusa Tenggara Timur	14,09	43,84	42,08	21,58	44,91	33,51	17,07	44,26	38,66
Kalimantan Barat	9,61	30,26	60,13	13,48	43,12	43,40	10,97	34,76	54,27
Kalimantan Tengah	6,65	32,92	60,44	11,19	44,64	44,17	8,05	36,53	55,42
Kalimantan Selatan	13,76	36,19	50,04	20,54	40,98	38,48	16,52	38,14	45,33
Kalimantan Timur	9,40	24,03	66,56	14,69	39,47	45,84	10,91	28,44	60,65
Sulawesi Utara	14,55	33,63	51,82	20,76	36,05	43,18	16,28	34,30	49,42
Sulawesi Tengah	16,06	36,40	47,53	24,89	36,85	38,26	18,77	36,54	44,69
Sulawesi Selatan	18,21	34,54	47,25	26,07	36,50	37,43	20,91	35,21	43,88
Sulawesi Tenggara	11,45	38,87	49,68	22,68	43,41	33,91	16,13	40,76	43,11
Gorontalo	17,42	26,95	55,62	26,36	28,26	45,38	19,84	27,31	52,85
Sulawesi Barat	14,87	44,75	40,39	20,26	39,40	40,35	16,73	42,90	40,37
Maluku	13,86	35,80	50,34	19,59	39,87	40,54	15,79	37,17	47,04
Maluku Utara	14,16	45,00	40,84	37,67	38,69	23,63	22,15	42,86	35,00
Irian Jaya Barat	4,10	28,71	67,19	17,11	39,54	43,35	7,16	31,26	61,58
Papua	5,36	43,36	51,28	14,10	50,73	35,17	8,11	45,68	46,22
INDONESIA	12,34	34,57	53,10	19,43	39,44	41,13	14,94	36,36	48,70

Sumber : BPS - Sakernas 2008

DAFTAR PUSTAKA

1. **BPS, 2004**, “Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2004”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2004.
2. **BPS, 2005**, “Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2005”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2005.
3. **BPS, 2006**, “Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2006”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006.
4. **BPS, 2007**, “Pedoman Pencacahan Susenas Kor, 2007”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2007.
5. **BPS, 2002**, “Indikator Olahraga Indonesia, 2002”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2002.
6. <http://www.depkes.go.id/>, “Jumlah Penduduk Lanjut Usia Meningkat”, Depkes, Jakarta, 2008.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
8. **PKBI, 2001**, “Prosiding Seminar dan Loka Karya Pengembangan Pusat Pelayanan Lanjut Usia”, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta, 2001.
9. **Siti Partini Suardiman**, “DIY Provinsi Lansia”, Kepala Pusat Studi Sumberdaya Lansia UNY, Yogyakarta.
10. **Sukarni Mariyati, 1994**, “Kesehatan Keluarga dan Lingkungan”, Yogyakarta : Kanisius.
11. **Suratkabar Media Indonesia Desember 2007**, Jakarta 2007.
12. **TEMPO Interaktif, 2007**, “Pada 2025, Seperlima Penduduk Indonesia Lansia”, Jakarta 2007.
13. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id